

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN
BAGI ANAK DARI KELUARGA MISKIN
(Studi pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kediri)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

Disusun Oleh:

PUTRI ANGGUN ARVIANI

0810310328



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2012**

MOTTO

*“Apapun yang Menghalangi, Visi dan Misi Harus
Terus Berjalan.”*

(best quote from me)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar
9 Tahun Bagi Anak Dari Keluarga Miskin (Studi pada
Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten
Kediri)

Disusun oleh : PUTRI ANGGUN ARVIANI

NIM : 0810310328

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Malang, 6 Juli 2012

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota



Dr. Survadi, MS

NIP. 19601103 198703 1 003



Ainul Hayat, S.Pd, M.Si

NIP. 19730713 200604 1 001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

Jalan. MT. Haryono 163, Malang 65145, Jawa Timur, Indonesia; Telp. +62-341-553737,
568914, 558226 Fax. +62-341-558227 ; E-mail: fia@ub.ac.id ; Website: <http://fia.ub.ac.id>

Program Studi: • Sarjana: - Ilmu Administrasi Publik - Administrasi Pemerintahan - Perencanaan Pembangunan - Ilmu Perpustakaan - Ilmu Administrasi Bisnis - Perpejakan
- Bisnis Internasional - Hospitality dan Pariwisata • Magister: - Ilmu Administrasi Publik - Ilmu Administrasi Bisnis • Doktor Ilmu Administrasi

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya,
pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 1 Agustus 2012

Jam : 08.00 WIB

Skripsi atas nama : Putri Anggun Arviani

Judul : Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Bagi Anak
Dari Keluarga Miskin.

**dan dinyatakan lulus
MAJELIS PENGUJI**

Ketua

Dr. Suryadi, MS
NIP. 19601103 198703 1 003

Anggota

Ainul Hayat, S.Pd, M.Si
NIP. 19730713 200604 1 001

Anggota

Dr. Imam Hardjanto, MAP
NIP. 19460619 197412 1 001

Anggota

Drs. Romula Adiono, MAP
NIP. 19620401 198703 1 003

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan pasal 70).

Malang, Juli 2012



PUTRI ANGGUN ARVIANI
0810310328

RINGKASAN

Putri Anggun Arviani, 2012, **Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Bagi Anak Dari Keluarga Miskin** (Studi pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kediri), Komisi Pembimbing, Ketua: Dr. Suryadi, MS, Anggota: Ainul Hayat, S.Pd, M.Si. (178 Hal + xiv)

Penelitian ini dilakukan atas dasar kompleksitas implementasi kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Kediri, dimana sejak diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999, dan telah disempurnakan mejadi UU Nomor 32 Tahun 2004, memberikan ruang gerak dan inisiatif bagi pemerintah kabupaten, termasuk Kabupaten Kediri untuk meningkatkan layanan pendidikan, khususnya layanan pendidikan dasar bagi anak dari keluarga miskin.

Rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain: Bagaimanakah implementasi kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun bagi anak dari keluarga miskin di Kabupaten Kediri. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun bagi anak dari keluarga miskin di Kabupaten Kediri.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu, wawancara (*interview*), observasi dan dokumentasi. Data analisis yang digunakan yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan program-program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun tersebut telah banyak memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam membantu meringankan beban anak dari keluarga miskin, akan tetapi pada kenyataannya masih saja terdapat anak pada usia sekolah dasar yang tidak bisa melanjutkan sekolah atau putus di tengah jalan. Adapun faktor pendukung implementasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun antara lain, dukungan sarana dan prasarana, serta ketersediaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sedangkan yang menjadi kendala utama implementasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Kediri adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan.

Saran dari peneliti, demi mensukseskan implementasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, maka perlu meningkatkan integrasi program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dengan program sektor terkait lainnya. Dan juga perlu dilakukannya pemberian *reward* terhadap setiap kecamatan yang berhasil dalam penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Selain itu juga perlunya penggalakan sosialisasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun terutama terhadap masyarakat daerah pinggiran, serta melibatkan masyarakat untuk turut berpartisipasi secara langsung dalam mensukseskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

SUMMARY

Putri Anggun Arviani, 2012, **Implementation of Compulsory Primary Education Policy 9 Years for Children From Poor Families** (Study at the Department of Education, Youth and Sport Kediri), Supervisor: Dr. Suryadi, MS, Co-supervisor: Ainul Hayat, S. Pd, M.Si. (Page 178 + xiv)

This research was conducted on the basis of the complexity Implementation of Compulsory Primary Education Policy 9 Years in District of Kediri. Where since the enactment of Law Number 22 of 1999, and has been refined form the Law Number 32 of 2004, which includes areas of decentralized education, providing the space and the initiative for the district, including Kediri to improve educational services, particularly in this is the basic education services for children from poor families.

Formulation of the problem in this study include: How the implementation of Compulsory Primary Education Policy of 9 Years for children of poor families in the District of Kediri. What are the factors supporting and inhibiting the implementation of Compulsory Primary Education Policy of 9 Years for children from poor families in the District of Kediri.

The method used is a qualitative method that is descriptive. Data collection techniques, namely, the interview, observation and documentation. Data analysis used, namely, data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of the study showed that although the implementation of the programs Compulsory Primary Education 9 Year has many significant contribution in helping the children of poor families, but in fact there are still at primary school age children who can not pursue school or break in the middle of the road. The factors supporting the implementation of Compulsory Primary Education 9 Year, among others, support facilities and infrastructure, as well as the availability of funds the School Operational Assistance (BOS). Whereas the main constraint implementation Compulsory Primary Education 9 Years in District of Kediri is the lack of public awareness of the importance of education. Suggestion that, for the sake of the success of the implementation of Compulsory Primary Education 9 Years, it is necessary to improve the integration of the program Compulsory Primary Education 9 Years of the program related sectors. And also need to be done giving reward to any successful districts in the implementation of Compulsory Primary Education 9 Years. There was also need for the promotion of socialization Compulsory Primary Education 9 Years to the community, especially the suburbs, as well as engage the public to participate directly in the success of Compulsory Primary Education 9 Years.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



*Kupersembahkan Karyaku
Kepada Ayahanda dan Ibundaku tercinta
Adik-adikku tersayang
Serta semua sahabat-sahabatku*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Bagi Anak Dari Keluarga Miskin.”

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof Dr. Sumartono, M.S., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. M.R Khoirul Muluk, S.Sos, M.Si, selaku Ketua urusan Ilmu Administrasi Publik.
3. Bapak Dr. Suryadi, MS dan Bapak Ainul Hayat, S.Pd, M.Si, selaku dosen pembimbing yang penuh kesabaran dan pengertian dalam memberikan bimbingan, petunjuk, kritikan, dan saran yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.
4. Kedua orang tua saya, Gatot Arsiono dan Suwaibah Khilmiyah yang telah memberikan segalanya baik doa maupun semangat dalam penyelesaian skripsi saya ini.
5. Fajar Syahputra dan Alamsyah Wahyudi, saudara-saudaraku yang telah memberikan dukungan dan doa.
6. Beny Ari Gunawan, yang telah memberikan semangat, saran, bantuan, dan juga perhatian selama saya menyelesaikan skripsi ini.
7. Para Pejabat dan Staf Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kediri, atas segala bimbingan dan bantuannya dalam proses penyusunan skripsi ini.

DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO.....	i
LEMBAR PERSETUUAN	ii
TANDA PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
RINGKASAN.....	v
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kontribusi Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	11
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Konsep Dasar Kebijakan Publik.....	14
1. Pengertian Kebijakan Publik.....	14
2. Proses Kebijakan Publik.....	16
3. Hakikat Kebijakan Publik.....	17
B. Implementasi Kebijakan Publik.....	20
1. Pengertian Implementasi Kebijakan.....	20
2. Pendekatan-pendekatan Implementasi Kebijakan.....	22
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Implementasi Kebijakan.....	24
C. Konsep Dasar Pendidikan.....	27
D. Kebijakan Pendidikan Nasional.....	31
1. Pendidikan Nasional.....	31
2. Desentralisasi Pendidikan.....	33
3. Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.....	36
E. Kemiskinan.....	47
1. Pengertian Kemiskinan.....	47
2. Pengertian Keluarga Miskin.....	52
3. Problem Pendidikan bagi Anak dari Keluarga Miskin.....	54
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode dan Jenis Penelitian.....	58
B. Fokus Penelitian.....	59
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	60

D. Jenis dan Sumber Data.....	63
E. Teknik Pengumpulan Data.....	64
F. Instrumen Penelitian.....	65
G. Analisis Data.....	66

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

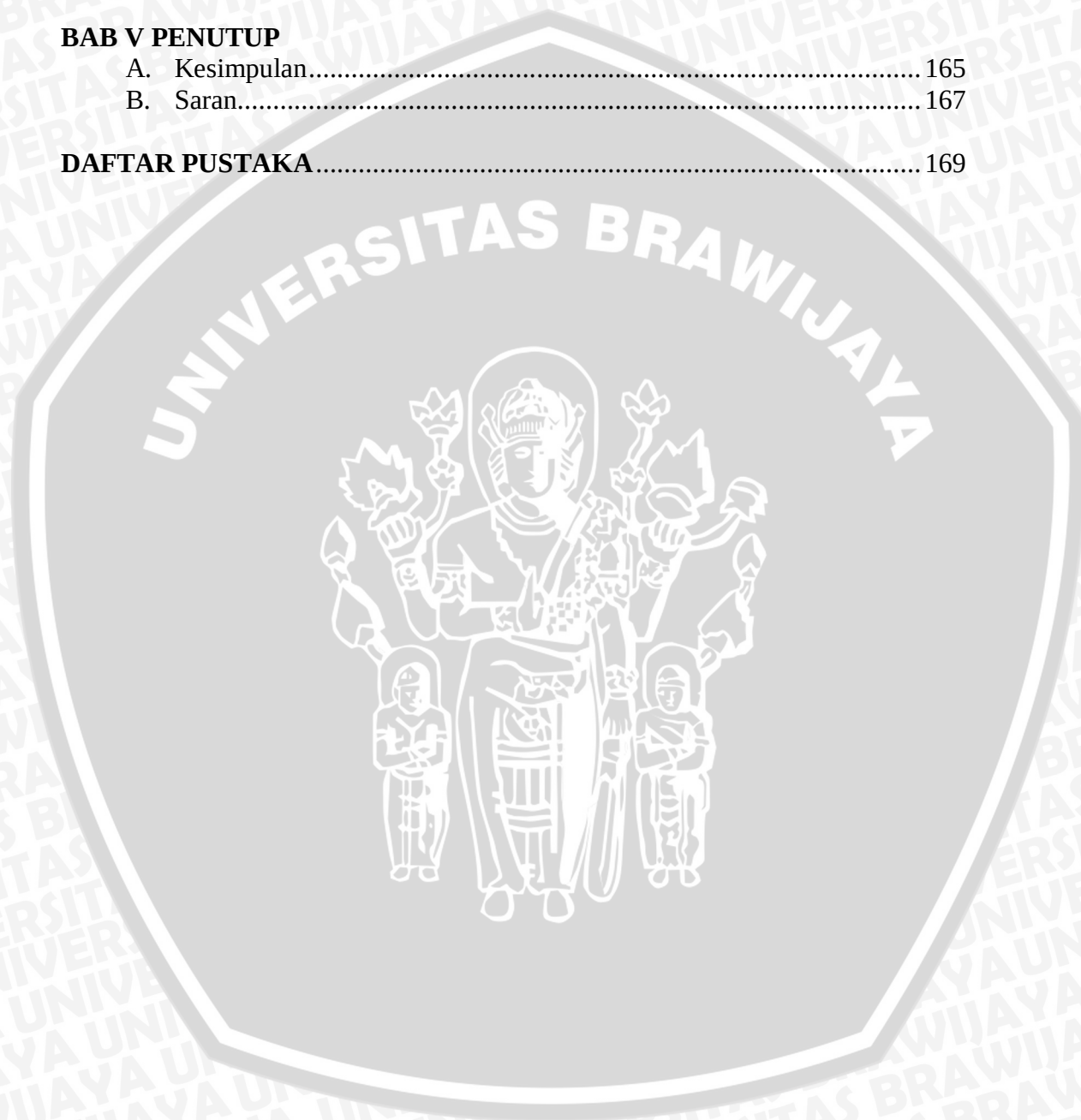
A. Gambaran Umum	68
1. Gambaran Umum Kabupaten Kediri	68
2. Visi dan Misi Kabupaten Kediri.....	77
3. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kediri.....	80
a. Struktur Organisasi	80
b. Tugas Pokok dan Fungsi	82
4. Gambaran Umum Pendidikan di Kabupaten Kediri.....	83
a. Perkembangan Penduduk Usia Sekolah, Siswa, dan Fasilitas Pendidikan.....	83
b. Pemerataan Pendidikan	90
c. Peningkatan Mutu Pendidikan.....	93
d. Pendidikan Luar Biasa	96
e. Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah	97
f. Keragaman Antar Kecamatan Di Kabupaten Kediri	100
a) Akses Terhadap Pendidikan SD/MI.....	100
b) Akses Terhadap Pendidikan SMP/MTs	102
c) Keragaman Antar Jenis Kelamin	104
5. Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Kediri ..	104
a. Visi.....	104
b. Misi	106
c. Tujuan	107
d. Sasaran	109
6. Target Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.....	116
a. SD/MI.....	116
b. SMP/MTs	117
B. Penyajian Data Fokus Penelitian.....	117
1. Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun bagi Anak dari Keluarga Miskin	117
a. Bentuk-bentuk Program	118
b. Pelaksanaan Program	127
c. Hasil Implementasi	139
2. Faktor Pendukung dan Penghambat	145
a. Faktor Pendukung	146
b. Faktor Penghambat	147
C. Pembahasan	153
1. Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun bagi Anak dari Keluarga Miskin	153
a. Bentuk-bentuk Program	155
b. Pelaksanaan Program	156

c. Hasil Implementasi	157
2. Faktor Pendukung dan Penghambat	158
a. Faktor Pendukung	158
b. Faktor Penghambat	160

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	165
B. Saran.....	167

DAFTAR PUSTAKA.....	169
----------------------------	------------

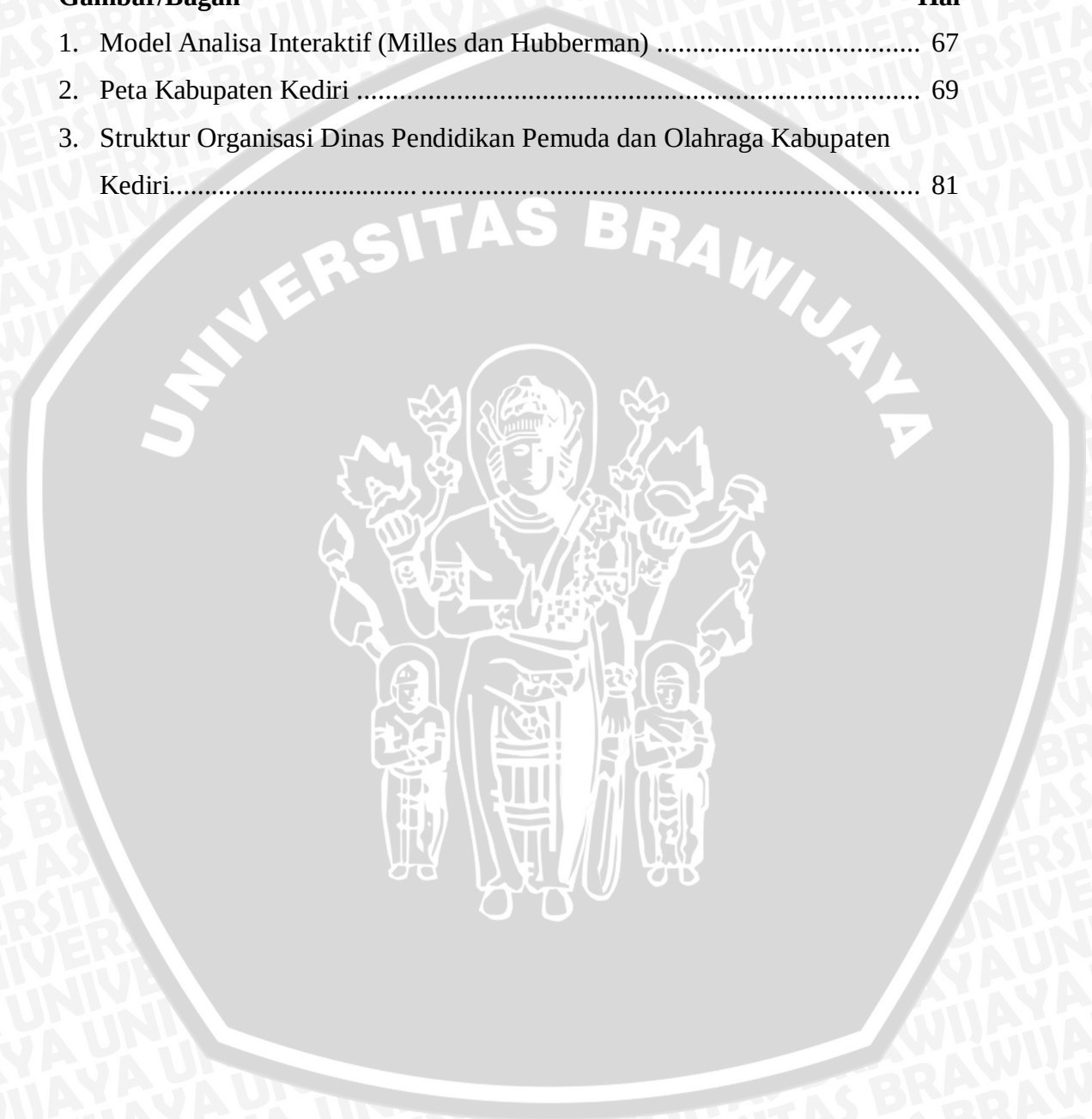


DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1. Perkembangan Penduduk, Siswa, Guru, Rombongan Belajar, APK TK dan SLB Tahun 2006/2007 s.d 2009/2010	85
2. Perkembangan Penduduk, Siswa, Guru, Ruang Kelas dan APK SD dan MI Tahun 2006/2007 s.d 2009/2010	87
3. Perkembangan Penduduk, Siswa, Guru, Ruang Kelas dan APK SMP dan MTs Tahun 2006/2007 s.d 2009/2010	88
4. Perkembangan Penduduk, Siswa, Guru, Ruang Kelas dan APK SMA, SMK dan MA Tahun 2006/2007 s.d 2009/2010	89
5. Indikator Pemerataan Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2009/2010	90
6. Indikator Mutu Pendidikan - Tahun 2009/2010.....	94
7. Siswa, Sekolah, dan Guru Pendidikan Luar Biasa 2009/2010	97
8. Jumlah Penduduk Buta Huruf Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur Kabupaten Kediri –Tahun 2009.....	99
9. Sasaran Program PAUD di Kab. Kediri Tahun 2009.....	99
10. Jumlah Warga Belajar, Kelompok Belajar, dan Tutor Tahun 2009.....	100
11. Keragaman APK dan APM SD/MI Kecamatan Per 2008/2009 dan 2009/2010	101
12. Keragaman APK dan APM SMP/MTs Kecamatan Per 2008/2009 dan 2009/2010.....	103
13. Perbandingan Disparitas Gender dalam APK antar Jenjang Tahun 2009/2010	104
14. Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kediri Tahun 2011-2015.....	112
15. Target Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun di Kab. Kediri	116
16. Proyeksi Capaian APK/APM SD dan MI di Kab. Kediri	117
17. Daya Tampung Lembaga Pendidikan dalam Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.....	139
18. Trend Angka Melanjutkan Sekolah SD/MI ke Jenjang SMP	140
19. Perkembangan Penduduk, Siswa, dan Angka Partisipasi Sekolah pada Jenjang Pendidikan SD/MI.....	141
20. Perkembangan Penduduk, Siswa, dan Angka Partisipasi Sekolah pada Jenjang Pendidikan SD/MI.....	142
21. Pencapaian Angka Partisipasi Sekolah.....	143

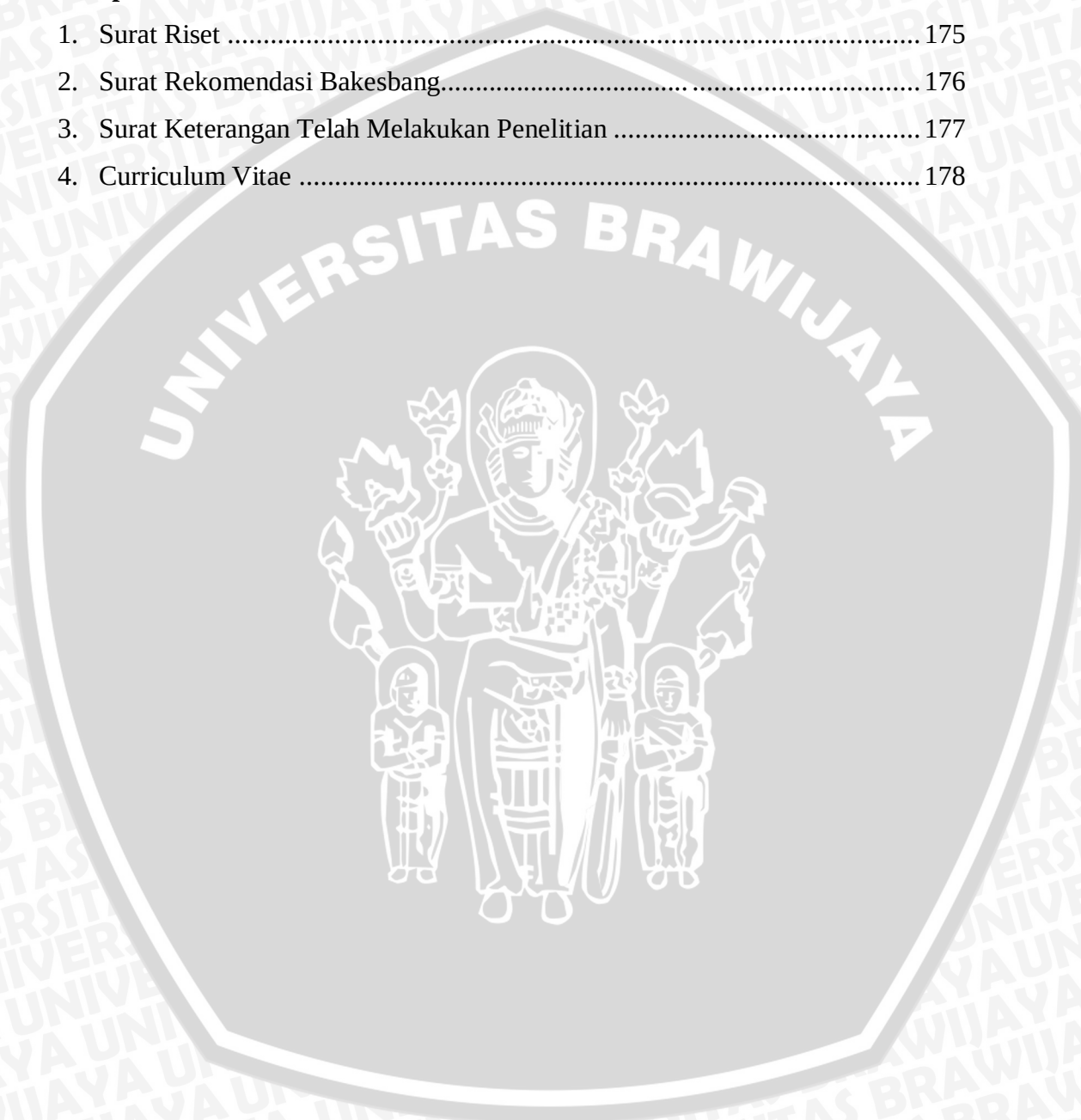
DAFTAR GAMBAR/BAGAN

Gambar/Bagan	Hal
1. Model Analisa Interaktif (Milles dan Hubberman)	67
2. Peta Kabupaten Kediri	69
3. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kediri.....	81



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Hal
1. Surat Riset	175
2. Surat Rekomendasi Bakesbang.....	176
3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	177
4. Curriculum Vitae	178



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting bagi pembangunan bangsa. Ketika di Asia Timur muncul negara-negara industri baru, banyak ahli menyatakan keberhasilan pembangunan negara-negara tersebut karena didukung oleh tersedianya penduduk yang terdidik dalam jumlah yang memadai. Karena itu, hampir semua bangsa menempatkan pembangunan pendidikan sebagai prioritas utama dalam program pembangunan nasional mereka. Sumber Daya Manusia bermutu yang merupakan produk pendidikan adalah merupakan kunci keberhasilan pembangunan suatu negara (Bappenas, 2009).

Dalam pembangunan Sumber Daya Manusia, bahkan kinerja pendidikan yaitu gabungan Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi dan angka melek aksara digunakan sebagai variabel dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bersama-sama dengan variabel kesehatan dan ekonomi. Pembangunan pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global (BPS, 2008).

Pembangunan pendidikan nasional di Indonesia dalam kurun waktu 2004-2009 telah mempertimbangkan kesepakatan-kesepakatan internasional, seperti Pendidikan Untuk Semua (*Education For All*), Konvensi Hak Anak (*Convention*

of the right of child) dan *Millenium Development Goals (MDGs)* serta *World Summit on Sustainable Development* yang secara jelas menekankan pentingnya pendidikan sebagai salah satu cara untuk penanggulangan kemiskinan, peningkatan keadilan dan kesetaraan gender, pemahaman nilai-nilai budaya dan multikulturalisme, serta peningkatan keadilan sosial. Deklarasi dunia tentang Pendidikan Untuk Semua (*Education for All Declaration*) pada konferensi UNESCO, di Thailand (1990) merupakan komitmen bersama dalam menyediakan pendidikan dasar yang bermutu dan non diskriminatif. Realisasi deklarasi tersebut juga sekaligus merupakan upaya untuk memenuhi hak pendidikan (sesuai pasal 26 Deklarasi Umum HAM: “Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus gratis, setidaknya untuk tingkat sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan dasar diperlukan untuk menjaga perdamaian.” (*Pusat Statistik Pendidikan, 2011*).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjamin hak atas “pendidikan dasar” bagi warga negara Indonesia yang berusia 7-15 tahun. Salah satu upaya untuk meningkatkan taraf pendidikan penduduk Indonesia adalah melalui peningkatan secara nyata persentase penduduk yang dapat menyelesaikan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang dimulai pada tahun 1994 ini mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar dengan menargetkan semua warga negara Indonesia memiliki pendidikan minimal setara Sekolah Menengah Pertama dengan mutu yang baik. Sehingga diharapkan seluruh warga negara Indonesia

dapat mengembangkan dirinya lebih lanjut yang akhirnya mampu memilih dan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki, sekaligus berperan serta dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Bappenas, 2009).

Tidak sedikit kebijakan, termasuk upaya dan langkah telah dilakukan pemerintah untuk mewujudkan semua itu. Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 1971 tentang Pembangunan Sekolah Dasar yang diikuti dengan inpres-inpres lainnya cukup menjadi isyarat bahwa sejak lama pemerintah mempunyai tekad untuk bisa memberikan pelayanan pendidikan yang bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Bukan hanya itu, berbagai program layanan pendidikan, baik yang dilakukan melalui jalur pendidikan formal maupun non formal terus dikembangkan, disamping dilakukan pula melalui penyelenggaraan berbagai bentuk bantuan yang diharapkan bisa membantu meringankan beban pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Munculnya partisipasi masyarakat yang terwujud dalam lembaga yang dikenal dengan sebutan GNOTA (Gerakan Nasional Orang Tua Asuh), salah satunya adalah bukti bahwa di negeri ini masih ada kalangan masyarakat, khususnya kalangan masyarakat mampu yang peduli akan arti pentingnya membantu anak dari keluarga miskin dalam mengakses pendidikan dasar ini. Melalui GNOTA, beban sebagian keluarga miskin dalam menyekolahkan anaknya bisa terbantu. Lahirnya kebijakan pemerintah dalam bentuk pemberian bantuan yang dikenal dengan sebutan “Biaya Operasional Sekolah” atau BOS, adalah misi lain dari sekian banyak program yang intinya tidak lain dalam rangka melakukan akselerasi peningkatan pencapaian Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun (Depdiknas, 2007).

Namun dalam perjalanannya, tidak sedikit masalah, hambatan serta tantangan yang harus dihadapi. Kondisi ini diperparah oleh datangnya gelombang krisis tahun 1997 yang telah membuat porak poranda hampir seluruh aspek kehidupan di negeri ini, termasuk di dalamnya adalah aspek pendidikan. Sampai tahun 1998/1999, tidak mengherankan jika saja masih ada sekitar 0,9 juta anak usia 7-12 tahun dan sebanyak 930 ribu anak usia 13-15 tahun yang tidak berada pada sistem persekolahan karena tidak mendaftar sekolah kalau bukan putus sekolah alias *drop out*. Menurut sumber Depdiknas dan Bappenas sebagaimana yang dikutip oleh Jalal dan Supriadi (2001), hal tersebut terjadi karena begitu banyaknya jumlah penduduk miskin di desa tertinggal dan daerah kumuh perkotaan yang tidak mampu membiayai pendidikan anaknya.

Sumber data Depdiknas (2007) juga mengungkapkan bahwa angka siswa *drop out* yang semula dapat dikendalikan dan cenderung menurun, mulai tahun 1998 kembali menunjukkan peningkatan. Gambarannya, angka putus sekolah yang pada tahun 1998 mencatat angka 458 ribu atau 4,91 persen, dua tahun setelah krisis ekonomi membengkak menjadi sebesar 1,4 juta atau 14,7 persen. Gambaran lainnya, dari 28,51 juta siswa SD/MI yang terdaftar pada tahun ajaran 1999/2000, ada sebanyak 960,7 ribu siswa yang terpaksa putus sekolah di tengah jalan, dan ada 770,5 ribu siswa yang walaupun berhasil menamatkan pendidikan SD/MI, namun mereka tidak mampu melanjutkan ke jenjang SLTP/MTs, apalagi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Berdasarkan data Kemendikbud, pada tahun 2011 terdapat 1,18 juta siswa putus sekolah dan 2,33 juta lulusan sekolah dasar sampai sekolah menengah yang

tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena alasan faktor ekonomi. Tidak mengherankan pula jika target Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang semula diharapkan bisa dicapai dalam kurun waktu 15 tahun, bahkan kemudian dipercepat menjadi hanya dalam kurun waktu 10 tahun sejak dicanangkannya pada tahun 1994, realisasinya sampai saat ini ternyata menunjukkan hasil yang masih jauh dari yang telah ditargetkan.

Angka-angka tersebut sengaja diungkap sekedar untuk menegaskan bahwa betapa berat beban yang harus dipikul negara selama ini. Bahkan tidak mengherankan kalau *United Nation Development Programme* (UNDP) 2011 melaporkan bahwa peringkat IPM Indonesia pada 2011 melorot drastis dari posisi peringkat ke-111 dari 182 negara ke posisi 124 dari 187 negara. Bidang pendidikan yang terus landai grafiknya pada 2010-2011 menjadi salah satu penyebab turunnya peringkat IPM Indonesia. UNDP mengukur peringkat pendidikan suatu negara berdasarkan lama waktu sekolah. Menurut laporan UNDP saat ini rata-rata lama sekolah (*rate of years schooling*) untuk Indonesia ternyata masih rendah, yaitu hanya 5,8 tahun (tidak lulus SD). Hal tersebut merupakan suatu fakta yang memprihatinkan.

Jika dirinci, mungkin masih banyak faktor yang menjadi penyebab anak pada usia itu tidak mampu melanjutkan sekolah. Toenlie (1994) mengemukakan paling sedikit ada dua hal penyebab rendahnya jumlah lulusan SD yang melanjutkan ke SLTP, yakni rendahnya kemampuan ekonomi orang tua kalau bukan berkait dengan masalah kesadaran orang tua akan pentingnya tingkat pendidikan SLTP

bagi anaknya. Dua faktor itu, faktor ekonomi dan kesadaran, memang merupakan faktor yang sulit untuk dipisahkan satu sama lainnya.

Sen (2001), mengungkapkan bahwa dalam kemiskinan ekonomi itu melekat secara *inheren* bentuk kemiskinan lain, termasuk miskin ilmu pengetahuan, motivasi atau kesadaran, bahkan miskin kebebasan. Padahal kebebasan merupakan modal penting yang memungkinkan seseorang bisa mengakses haknya untuk mendapatkan pendidikan. Pendapat yang sama juga dikemukakan Bruner dan Manap, dkk. Intinya, bahwa kemampuan ekonomi masyarakat yang rendah dapat mengurangi hasrat orang tua dan semangat anak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Berkaitan dengan itu orang tua lebih merasa tertolong jika anaknya dapat membantu pekerjaannya, atau cepat bekerja untuk menunjang pendapatan keluarganya (Bruner, 1970: Manap, dkk. 1993)

Menurut hasil kajian yang dilakukan Irwanto dkk (1995:143), anak-anak dalam usia didik sebenarnya lebih senang sekolah daripada bekerja. Tetapi, akibat dari faktor-faktor yang sifatnya struktural dan karena di kalangan orang tua masih belum tumbuh dengan baik kesadaran akan pentingnya pendidikan, di wilayah pedesaan pada khususnya masih sering terjadi anak-anak yang terpaksa harus berhenti sekolah di tengah jalan atau *drop out*. Di sini, masalah ketidak mampuan ekonomi yang diperparah oleh rendahnya kesadaran orang tua menjadi faktor yang semakin berdampak terhadap ketertinggalan pendidikan bagi anak dari keluarga miskin.

Sebagai akibat dari kemampuan ekonomi masyarakat yang rendah, maka bagi sebagian masyarakat biaya pendidikan dirasakan mahal. Bahkan karena ketidakmampuannya, didukung pula oleh karena kurang sadaran akan arti pentingnya pendidikan, mereka menganggap bahwa sekolah hanyalah pemborosan semata (Manap, 1993). Kemiskinan dengan banyak karakteristiknya, itulah salah satu faktor kunci yang menurut peneliti hadir menjadi salah satu akar penyebab sulitnya pencapaian target Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun selama ini. Kondisi itu diperparah pula oleh lemahnya komitmen, disamping terbatasnya kemampuan pemerintah dalam menyediakan fasilitas layanan pendidikan dasar yang bisa dijangkau masyarakat miskin.

Bahkan walaupun komitmen pemerintah terhadap sektor pendidikan dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan adanya peningkatan yang antara lain ditandai dengan semakin meningkatnya anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan di sektor yang satu ini, namun dalam penjabarannya di lapangan masih belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Dengan kata lain ada faktor-faktor eksternal, di samping faktor internal sistem pendidikan yang bisa diangkat untuk menjelaskan tantangan yang menghambat kelancaran pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun selama ini. Seperti yang diungkapkan oleh Bruner dan Makmun, bahwa secara eksternal pelaksanaan pendidikan itu, termasuk tentunya penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dasar, sangat dipengaruhi oleh faktor sosial budaya, ekonomi, demografis serta iklim geografis yang kurang menguntungkan (Bruner, 1970: Makmun, 1987).

Temuan tersebut sekaligus mengungkap bahwa selama ini tidak sedikit kebijakan berhasil dirumuskan dan disahkan atau dilegitimasi, namun proses implementasinya karena berbagai faktor dan alasan, masih sering dipersoalkan. Menurut Gun sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Wahab (2004), “Selama ini para pakar sering keasyikan dengan persoalan-persoalan perumusan kebijakan, namun kurang perhatian atau sering melupakan pada tataran implementasinya.”

Beberapa paparan di atas sangatlah menarik untuk diteliti dan dikaji karena berdasarkan begitu banyak dan kompleksnya berbagai permasalahan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka begitu banyak faktor saling terkait sebagai penghambat yang bisa dikaji berkaitan dengan implementasi kebijakan percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang selama ini masih banyak menyisakan masalah dan kendala.

Banyak dan kompleksnya permasalahan yang terkait sebagai penghambat implementasi kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun juga dialami oleh Kabupaten Kediri. Salah satunya adalah masih banyaknya angka putus sekolah di Kabupaten Kediri. [Angka putus sekolah di Kabupaten Kediri](#) tampaknya masih sulit untuk ditekan. Data yang diperoleh dari Humas Pemerintah *Kabupaten Kediri*, angka putus sekolah tingkat SD mencapai 814 anak pada tahun 2010. Dari total angka tersebut, sekitar 151 anak, di antaranya tidak menamatkan SD dan gagal melanjutkan ke SMP. Sementara untuk mereka yang gagal menamatkan SMP mencapai angka 663 anak. Dimana, putus sekolah tingkat SD banyak ditemukan di daerah pinggiran, seperti Kecamatan Kepung, Kecamatan Puncu, Kecamatan Banyakan, dan Kecamatan Tarokan. Rata-rata setiap desa

ditemukan sedikitnya 10 anak putus sekolah. Hal ini dikarenakan, lokasi pendidikan jauh dan sulit ditempuh. Ditambahkan, benturan ekonomi yang mengharuskan mereka memilih bekerja daripada menuntut ilmu (<http://lintas.me/article/beritajatim.com>).

Seperti yang terlihat di wilayah Dusun Wates, Desa-Kecamatan Tarokan. Disana banyak sekali anak-anak yang tergolong usia sekolah sudah harus bekerja. Mulai pagi hari mereka sudah harus pergi ke ladang dan hutan untuk mencari kayu dan pakan ternak. Hal tersebut harus mereka lakukan untuk membantu orang tua memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. SMP terdekat ada di wilayah Desa Tarokan. Jarak antara kampung Wates dengan SMP tersebut sekitar 6 km. Namun infrastruktur tak mendukung. Jalan aspal sempit dan sudah rusak. Di jalur ini juga tidak ada fasilitas angkutan desa. Ada ojek harus membayar Rp 15.000 PP (<http://edukasi.kompas.com/read/2010>).

Penyebab tingginya angka putus sekolah di Kabupaten Kediri ini beragam, namun rata-rata dikarenakan faktor ekonomi. Pemikiran orang tua kadang ada yang masih menilai anak mereka cukup bersekolah sampai pada jenjang sekolah dasar saja, setelahnya diminta membantu bekerja. Tingkat ekonomi yang minim membuat orangtua menuntut anaknya untuk bekerja, menambah penghasilan keluarga daripada melanjutkan sekolah. Tingginya jumlah angka putus sekolah ini dikhawatirkan akan menghambat program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Apalagi sebagian besar faktor penghambat tersebut karena kondisi ekonomi orang tua mereka yang kurang mampu.

Berdasarkan pada pemikiran di atas, maka menarik minat dan perhatian peneliti untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul **“Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Bagi Anak Dari Keluarga Miskin” (Studi Pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kediri).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang akan menjadi kajian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun bagi anak dari keluarga miskin di Kabupaten Kediri?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun bagi anak dari keluarga miskin di Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun bagi anak dari keluarga miskin di Kabupaten Kediri.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Wajib

Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun bagi anak dari keluarga miskin di Kabupaten Kediri.

D. Kontribusi Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Kontribusi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi dunia akademik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun bagi anak dari keluarga miskin.

2. Kontribusi Praktis

- a. Bagi masyarakat sebagai media pengetahuan mengenai pentingnya pendidikan. Sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan.
- b. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan dalam pengambilan kebijakan di bidang pendidikan, khususnya oleh Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kediri sekaligus sebagai sumbangan pikiran dalam mensukseskan pembangunan pendidikan di Kabupaten Kediri.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai skripsi ini, di bawah ini disampaikan pokok-pokok penulisan yang ada dalam setiap bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang yang mengemukakan tentang alasan yang melatar belakangi penelitian, perumusan masalah yang merupakan masalah yang timbul dan akan dicari jawabannya, tujuan penelitian yang menguraikan hasil apa yang ingin dicapai dalam penelitian, kontribusi penelitian merupakan pernyataan tentang kontribusi hasil penelitian secara spesifik.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan teori-teori yang digunakan dalam disiplin ilmu sosial yang ada kaitannya dengan materi penulisan skripsi, dalam hal ini mengenai masalah implementasi kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun bagi anak dari keluarga miskin di Kabupaten Kediri. Adapun teori-teori yang digunakan antara lain, Konsep Dasar Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik, Konsep Dasar Pendidikan, Kebijakan Pendidikan Nasional, dan Kemiskinan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan bagaimana penelitian akan dilaksanakan. Metode penelitian meliputi fokus penelitian yaitu masalah yang menjadi perhatian utama untuk diteliti, sumber data yaitu orang yang terlibat dalam penelitian, teknik pengumpulan data yaitu cara-cara yang akan digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan, instrumen penelitian yang menerangkan alat yang akan digunakan dalam menggali dan menganalisa data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang data-data yang diperoleh selama penelitian berlangsung sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu juga dimuat tentang gambaran umum Kabupaten Kediri dan gambaran umum Dinas Pendidikan beserta kondisi pendidikan yang ada di Kabupaten Kediri. Dalam bab ini juga dimuat pembahasan untuk membahas hasil penelitian berdasarkan teori-teori yang berhubungan dengan apa yang diteliti.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari analisa data dan interpretasi data yang diperoleh dari bab sebelumnya disertai dengan saran-saran oleh penulis sebagai masukan kepada instansi terkait dengan implementasi kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun bagi anak dari keluarga miskin di Kabupaten Kediri.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah salah satu aspek yang harus dikaji dalam ilmu administrasi publik. Dalam administrasi publik terdapat ragam istilah yang mengartikan kebijakan publik. Salah satunya adalah istilah kebijakan publik yang diartikan sebagai suatu pernyataan mengenai tujuan umum dan keadaan tertentu yang dikehendaki. Istilah kebijakan ini dipakai untuk menunjukkan adanya pernyataan-pernyataan kehendak pemerintah mengenai tujuan-tujuan umum dari kegiatan-kegiatan yang diberlakukannya dalam suatu bidang tertentu, atau mengenai keadaan umum yang diharapkan dapat dicapai pada kurun waktu tertentu (Abdul Wahab, 2008). Kebijakan publik mencakup semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dan termasuk adalah hal pendidikan.

Secara teoritik, banyak pakar telah merumuskan definisi tentang kebijakan yang merupakan terjemahan dari kata *policy* ini. Menurut Friedrich sebagaimana yang dikutip oleh Winarno (2005):

“Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.”

Berkait dengan itu, Islamy (2000) mengungkapkan bahwa ada tiga elemen penting dalam pengertian sebuah kebijakan, yaitu:

- 1) Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai,
- 2) Taktik dan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan, dan
- 3) Penyediaan berbagai input yang memungkinkan penerapan taktik dan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan.

Masih berkait dengan definisi, Mustopadijaja (2003) mencoba merumuskan lebih operasional lagi (*workable*), yaitu:

“Kebijakan publik pada dasarnya merupakan suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh instansi berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah, negara dan pembangunan.”

Masih menurutnya, dalam kehidupan administrasi negara, secara formal, keputusan tersebut biasanya dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka definisi kebijakan publik yang akan digunakan untuk kepentingan penelitian ini merupakan sintesis dari semua pendapat para ahli, yaitu serangkaian keputusan yang memberikan arah atau koridor bertindak bagi yang berwenang, yakni pemerintah untuk memecahkan permasalahan publik, dalam hal ini adalah masalah pendidikan, khususnya menyangkut serangkaian keputusan atau aturan, termasuk penjabarannya dalam berbagai bentuk program berkait dengan penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun bagi anak dari keluarga miskin.

2. Proses Kebijakan Publik

Pakar kebijakan publik, Anderson (1979) menetapkan proses kebijakan publik sebagai berikut:

- 1) Formulasi masalah (*problem formulation*)
Apa masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah.
- 2) Formulasi kebijakan (*formulation*)
Bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? Siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?
- 3) Penentuan kebijakan (*adaption*)
Bagaimana alternatif ditetapkan? Persyaratan atau kriteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan? Apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan?
- 4) Implementasi (*implementation*)
Siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan?
- 5) Evaluasi (*evaluation*)
Bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan?

Sementara itu dalam pandangan Ripley sebagaimana dikutip oleh Subarsono, (2005), tahapan kebijakan publik terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Penyusunan Agenda Kebijakan
Dalam tahap ini ada 3 kegiatan yang perlu dilaksanakan:
 - a. Membangun persepsi di kalangan *stakeholders* bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah. Hal ini penting karena bisa jadi suatu gejala yang oleh sekelompok masyarakat tertentu dianggap sebagai masalah, tetapi oleh kelompok masyarakat yang lainnya atau bahkan oleh para *elite* politik bukan dianggap sebagai suatu masalah.
 - b. Membuat batasan masalah. Tidak semua masalah harus masuk dalam penyusunan agenda kebijakan dan memiliki tingkat urgensi yang tinggi, sehingga perlu dilakukan pembatasan terhadap masalah-masalah tersebut.
 - c. Memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah. Memobilisasi dukungan ini dapat dilakukan dengan cara mengorganisasi kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, dan kekuatan-kekuatan politik, publikasi melalui media massa dan sebagainya.

2. Tahap Formulasi dan Legitimasi Kebijakan
Pada tahap ini analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi, sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih.
3. Tahap Implementasi Kebijakan
Pada tahap ini perlu memperoleh dukungan sumberdaya, dan penyusunan organisasi pelaksana kebijakan. Dalam proses implementasi sering ada mekanisme insentif dan sanksi agar implementasi kebijakan tersebut berjalan dengan baik.
4. Tahap Evaluasi terhadap Implementasi, Kinerja dan Dampak Kebijakan
Tindakan (implementasi) kebijakan akan dihasilkan kinerja dan dampak kebijakan, yang memerlukan proses berikutnya yakni evaluasi. Hasil evaluasi tersebut berguna bagi penentuan kebijakan baru di masa yang akan datang, agar kebijakan yang akan datang lebih baik dan berhasil.

Michael Howlet dan M. Ramesh sebagaimana dikutip oleh Subarsono (2005) menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut:

- a. Penyusunan agenda (*agenda setting*), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.
- b. Formulasi kebijakan (*policy formulation*), yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
- c. Pembuatan kebijakan (*decicion making*), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
- d. Implementasi kebijakan (*policy implementation*), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
- e. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

3. Hakikat Kebijakan Publik

Menurut Hoogerwerf sebagaimana dikutip oleh Sjahrir (1988) pada hakekatnya kebijakan adalah: “Semacam jawaban terhadap suatu masalah, merupakan upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah dengan cara tertentu, yaitu dengan tindakan yang terarah”.

Berdasarkan pengertian atau definisi yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat dinyatakan bahwa kebijakan publik memiliki elemen-elemen sebagaimana dikemukakan oleh Anderson sebagaimana dikutip oleh Widodo (2007):

- a. Kebijakan publik merupakan tindakan yang selalu berorientasi kepada tujuan bukan sesuatu yang muncul begitu saja.
- b. Kebijakan publik merupakan satu rangkaian tindakan yang terkait satu sama lain yang dilakukan secara konsisten, mulai dari pembentukan agenda, kemudian disusun dengan perumusan atau formulasi kebijakan, dilanjutkan dengan implementasi sampai dengan evaluasi kebijakan tersebut.
- c. Kebijakan publik itu merupakan sesuatu yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah, bukan yang hendak dilakukan atau yang mereka katakan untuk dilakukan.
- d. Setiap kebijakan selalu memiliki elemen-elemen apakah itu sifatnya positif ataukah negatif. Dikatakan positif karena apa yang diputuskan oleh pemerintah biasanya untuk menyelesaikan sebuah persoalan, dan dikatakan negatif karena pemerintah dapat saja tidak melakukan apa-apa untuk menyelesaikan persoalan yang ada dalam masyarakat.
- e. Kebijakan yang dibuat dalam sebuah negara pasti punya dasar hukumnya, bukan yang dibuat dengan sekenak hati penguasa saja. Dan dikatakan otoritatif karena mengandung makna yang sifatnya mengikat.

Sementara itu dalam pandangan beberapa ahli seperti Thomas Dye, William Dunn dan Mustopadidjaja sebagaimana dikutip oleh Widodo (2007) bahwa terdapat elemen-elemen dalam kebijakan publik antara lain: kebijakan publik (*policy content*), pelaku kebijakan, lingkungan kebijakan (*policy environment*), dan kelompok sasaran kebijakan (*target groups*). Elemen-elemen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pelaku Kebijakan, dalam hal ini adalah para pemegang kekuasaan dan pengambil keputusan, merekalah yang membuat dan menjadi sumber munculnya suatu kebijakan dan yang biasanya menjadi isu studi adalah adanya konflik kepentingan dan bagaimana menyelesaikannya.
- b. Lingkungan, merupakan sumber munculnya kebijakan, dalam sebuah sistem, lingkungan inilah yang menjadi fase input dimana dari sinilah muncul kebutuhan, permintaan, harapan, keluhan dan yang sejenis yang merupakan cikal bakal kebijakan.

- c. Isi kebijakan atau kebijakan itu sendiri, yang menjadi objek studinya adalah bagaimana proses pembuatan kebijakan dan stratafikasi atau tingkatan kebijakan. Kebijakan merupakan keputusan atas sejumlah pilihan yang kurang lebih berhubungan satu sama lain yang dimaksudkan untuk mencapai sejumlah tujuan tertentu.
- d. Kelompok sasaran yaitu masyarakat, ada yang berpendapat ini merupakan orang atau sekelompok orang, atau organisasi-organisasi dalam masyarakat yang perilaku dan atau keadaannya ingin dipengaruhi oleh kebijakan bersangkutan atau mempunyai kewajiban menjalankan kebijakan.

Selanjutnya, David Easton sebagaimana dikutip oleh Abdul Wahab (2004) mengemukakan bahwa ciri-ciri kebijakan publik yang utama adalah apa yang disebut sebagai orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik, yakni para tetua adat, para ketua suku, para eksekutif, para legislator, para hakim, para administrator, para raja/ratu dan lain sebagainya. Mereka inilah yang menurut Easton merupakan orang-orang yang dalam kesehariannya terlibat dalam urusan-urusan politik dan dianggap oleh sebagian besar warga sebagai pihak yang bertanggung jawab atas urusan-urusan politik tadi dan berhak untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu. Implikasi dari pernyataan di atas adalah:

- 1) Kebijakan merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan, bukan tindakan yang acak dan kebetulan. Kebijakan publik dalam sistem politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.
- 2) Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak hanya berupa keputusan untuk membuat undang-undang, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan-paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuannya.
- 3) Kebijakan bersangkutan-paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu, misalnya dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi atau menggalakkan program perumahan rakyat dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tersebut.
- 4) Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif. Dalam bentuknya yang positif, mungkin akan mencakup beberapa bentuk

tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masalah tertentu, sementara dalam bentuknya yang negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun ketika campur tangan pemerintah sebenarnya diharapkan. Sudah barang tentu tiadanya bentuk campur tangan/keterlibatan pemerintah dapat membawa dampak tertentu bagi seluruh atau sebagian warga.

Dari beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ilmuwan tersebut, kiranya dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pada hakekatnya studi tentang *policy* (kebijakan) mencakup pertanyaan: *what, why, who, where*, dan *how*. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga-lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut: isi, cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan.

B. Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Pada intinya, implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan dalam proses kebijakan dan merupakan aspek yang tidak kalah penting dari keseluruhan proses kebijakan yang begitu kompleks dan dinamis, mulai dari tahap perumusan (*formulation*), implementasi sampai pada tahap evaluasi. Udjoji sebagaimana dikutip oleh Abdul Wahab (1997) mengatakan bahwa *"Policies will remain dreams or blue print file jacket unless they are implemented"*.

Itulah pula salah satu masalah yang tak jarang terjadi di negeri ini. Wujudnya, saat ini tidak sedikit kebijakan yang telah dibuat, termasuk kebijakan dalam bidang pendidikan, namun karena implementasinya tidak berjalan sesuai

dengan prosedur yang telah ditetapkan, maka hasilnya pun tidak mencapai target atau sasaran yang ditetapkan, termasuk dalam bidang pendidikan.

Gejala itulah yang oleh Andrew Dunsire sebagaimana dikutip oleh Abdul Wahab (1997) disebut *implementation gap*, yaitu suatu istilah yang digunakan untuk menjelaskan suatu keadaan dimana dalam suatu proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan atau direncanakan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai sebagai hasil dari sebuah pelaksanaan kebijakan publik. Di situlah pula urgensinya untuk melakukan kajian atau analisis terhadap implementasi kebijakan pendidikan.

Namun perlu digaris bawahi, bahwa melaksanakan kebijakan itu tidaklah mudah. Dalam prakteknya, implementasi merupakan sebuah proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena adanya intervensi dari berbagai kelompok kepentingan, termasuk dalam implementasi kebijakan di bidang pendidikan yang secara politik memang *marketable*. Itulah pula faktor yang sering hadir menjadi penyebab kenapa sebuah kebijakan publik tidak berhasil dijalankan secara mulus sesuai dengan yang diharapkan.

Karena begitu kompleksnya, Eugene Bardach sebagaimana dikutip oleh Agustino (2006) mengemukakan:

“Adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga bagi para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk yang memuaskan semua orang”.

Banyak pakar telah memberikan pemahaman yang jelas mengenai implementasi kebijakan publik ini. Secara singkat Dunn (1981) mengungkapkan bahwa *“policy implementation involves the execution and steering of a course of action over time”*. Pemahaman yang diberikan Van Meter dan Van Horn dikutip sebagaimana dikutip oleh (2004) merumuskan proses implementasi itu sebagai *“those action by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions”*. Intinya, semua tindakan yang dilakukan oleh publik yang ditujukan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh sebuah kebijakan, itulah yang disebut dengan implementasi kebijakan publik.

Berdasarkan pemahaman di atas juga bisa disimpulkan bahwa untuk bisa mengimplementasikan sebuah kebijakan itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Ia tidak hanya terkait dengan perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan dan menimbulkan ketaatan pada kelompok sasaran, tetapi juga menyangkut jaringan kelompok politik, kondisi ekonomi dan sosial yang langsung ataupun tidak, dapat mempengaruhi sikap dan perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap dampak dari sebuah kebijakan, baik dampak diharapkan maupun tidak diharapkan.

2. Pendekatan-pendekatan Implementasi Kebijakan

Pendekatan-pendekatan yang sering dilakukan dalam proses implementasi kebijakan menurut Abdul Wahab (2008), antara lain:

- a. Pendekatan Struktural
Pendekatan ini menganggap bahwa kepercayaan terhadap prinsip-prinsip universal dan organisasi yang tidak baik kini harus diubah, yakni perhatian pada keyakinan bahwa struktur organisasi tertentu hanya cocok pada tipe tugas dan lingkungan tertentu pula.
- b. Pendekatan Struktural dan Manajerial
Pendekatan ini menekankan pada prosedur-prosedur manajerial beserta teknik-teknik manajemen yang relevan. Dalam pendekatan ini memungkinkan untuk memperkirakan secara tepat jangka waktu penyelesaian tiap-tiap tugas, dengan jalan memonitor setiap peluang waktu yang ada bagi penyelesaian tugas dalam jaringan.
- c. Pendekatan Keperilakuan (*Behavioral Approach*)
Pendekatan keperilakuan adalah suatu pendekatan yang lebih memusatkan pada perilaku manusia beserta segala sikapnya. Pendekatan ini diawali dengan suatu kesadaran bahwa seringkali terdapat kebijakan baru yang dikeluarkan. Oleh karena itu, harus dijelaskan sejak awal tentang alasan, tujuan, sasaran, dan perlu juga mempersiapkan sarana yang mendalam supaya kebijakan tersebut mendapat dukungan. Tujuan pendekatan ini untuk menunjukkan perhatian yang besar terhadap kepentingan orang-orang atau masyarakat banyak.
- d. Pendekatan Politik (*Political Approach*)
Pendekatan ini mengasumsikan bahwa keberhasilan suatu kebijakan pada akhirnya akan bergantung juga pada kesediaan dan kemampuan kelompok-kelompok yang dominan atau berpengaruh untuk memaksakan kehendaknya, dengan kata lain bahwa pendekatan ini mengacu pada pola-pola kekuasaan dan pengaruhnya.

Sedangkan menurut Nugroho (2006), beberapa pendekatan dalam implementasi kebijakan antara lain:

- a. Pendekatan secara *top-down*
Yaitu pendekatan secara satu pihak dari atas ke bawah. Dalam proses implementasi peranan pemerintah sangat besar, pada pendekatan ini asumsi yang terjadi adalah para pembuat keputusan merupakan aktor kunci dalam keberhasilan implementasi, sedangkan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses implementasi dianggap menghambat, sehingga para pembuat keputusan meremehkan inisiatif strategi yang berasal dari level birokrasi rendah maupun subsistem-subsistem kebijaksanaan yang lain.
- b. Pendekatan secara *bottom-up*
Yaitu pendekatan yang berasal dari bawah (masyarakat). Pendekatan *bottom-up* didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau masih melibatkan pejabat pemerintahan namun hanya ditataran rendah. Asumsi yang mendasari pendekatan ini adalah bahwa implementasi berlangsung dalam lingkungan pembuat keputusan yang terdesentralisasi.

Model ini menyediakan suatu mekanisme untuk bergerak dari level birokrasi paling bawah sampai pada pembuatan keputusan tertinggi di sektor publik maupun sektor privat.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Implementasi Kebijakan

a. Faktor Pendukung

Menurut Winarno (2005), implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan: “alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”.

Hogwood dan Gunn sebagaimana dikutip oleh Abdul Wahab (1997) menyatakan bahwa, untuk dapat mengimplementasikan suatu kebijakan secara sempurna (*perfect implementation*) maka diperlukan beberapa kondisi atau persyaratan tertentu sebagai berikut:

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius;
- b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber dana yang cukup memadai;
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia;
- d. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang handal;
- e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya;
- f. Hubungan saling ketergantungan harus kecil;
- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan;
- h. Tugas-tugas dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat;
- i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna;
- j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapat kepatuhan yang sempurna.

Faktor-faktor keberhasilan atau pendukung pelaksanaan kebijakan menurut Soenarko (2000), antara lain:

- a. Persetujuan, dukungan dan kepercayaan dari rakyat.

- b. Isi dan tujuan kebijakan harus dimengerti secara jelas lebih dulu.
- c. Pelaksana haruslah mempunyai cukup informasi, terutama mengenai kondisi dan kesadaran masyarakat yang dikenai kebijakan itu.
- d. Pembagian pekerjaan yang efektif dalam pelaksanaan. Hal ini berarti diferensiasi kegiatan secara horizontal dan secara vertikal.
- e. Pembagian kekuasaan dan wewenang yang rasional dalam pelaksanaan kebijakan.
- f. Pemberian tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan dilaksanakan untuk intern pemerintah saja, akan tetapi ditujukan dan harus dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungannya.

Menurut James Anderson sebagaimana dikutip oleh Sunggono (1994), masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan publik dikarenakan:

- a. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah;
- b. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan;
- c. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan;
- d. Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadi;
- e. Adanya sanksi-sanksi tertentu yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu kebijakan.

Berdasarkan teori di atas bahwa faktor pendukung implementasi kebijakan harus didukung dan diterima oleh masyarakat, apabila anggota masyarakat mengikuti dan mentaati sebuah kebijakan maka sebuah implementasi kebijakan akan berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan tanpa ada hambatan-hambatan yang mengakibatkan sebuah kebijakan tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Faktor Penghambat

Selain itu juga terdapat faktor penghambat dalam implementasi kebijakan.

Menurut Hogwood dan Gunn sebagaimana dikutip oleh Abdul Wahab (1997), mengemukakan:

“Implementasi yang tidak berhasil terjadi manakala suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan (misalnya tiba-tiba terjadi peristiwa penggantian kekuasaan, bencana alam, dan sebagainya), kebijaksanaan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Biasanya kebijakan yang memiliki resiko untuk gagal itu disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: pelaksanaannya jelek (*bad execution*), kebijakannya sendiri jelek (*bad policy*) atau kebijakan itu memang bernasib jelek (*bad luck*)”.

Sementara itu, faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan menurut Soenarko (2000), antara lain:

- a. Teori yang menjadi dasar kebijakan itu tidak tepat.
- b. Sarana yang dipilih untuk pelaksanaan tidak efektif.
- c. Sarana itu mungkin tidak atau kurang dipergunakan sebagaimana mestinya.
- d. Isi dari kebijakan itu bersifat samar-samar.
- e. Ketidak pastian faktor intern dan atau faktor ekstern.
- f. Kebijakan yang ditetapkan itu mengandung banyak lubang.
- g. Dalam pelaksanaan kurang memperhatikan masalah teknis.
- h. Adanya kekurangan akan tersedianya sumber-sumber bantuan (waktu, uang, dan sumber daya manusia).

Menurut Sunggono (1994), implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

- a. Isi kebijakan
Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada.
Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan.
Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti.

Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

b. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Pembagian potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

Faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pasti muncul ketika kebijakan diterapkan di lapangan. Dimana bila suatu kebijakan kurang atau tidak memenuhi target saat diimplementasikan, berarti ada suatu faktor yang menghambat kebijakan tersebut. Begitu pula bila suatu kebijakan memenuhi target bahkan melebihi target yang ditargetkan saat diimplementasikan, berarti ada suatu faktor yang mendorong kebijakan tersebut.

C. Konsep Dasar Pendidikan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2006), pendidikan berasal dari kata dasar didik (mendidik), yaitu: “memelihara dan memberi latihan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran”. Sedangkan pendidikan mempunyai pengertian: “proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan, cara mendidik”.

Sedangkan Ki Hajar Dewantara sebagaimana dikutip oleh Soemanto dan Soetopo (1982) mengartikan pendidikan sebagai: “daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya”.

Notoatmodjo (1998) dalam bukunya, memberikan beberapa batasan tentang pengertian pendidikan, diantaranya:

- a. M.J. Langevelt, menyatakan bahwa: “Pendidikan adalah proses membawa anak ke arah kedewasaan”. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa kedewasaan yang dimaksud adalah apabila anak telah sanggup bertindak atas tanggung jawabnya sendiri.
- b. Menurut *Dictionary of Education*, pendidikan diartikan sebagai berikut:
 - 1) Proses dimana seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk tingkah laku lainnya dalam masyarakat dimana dia hidup.
 - 2) Proses sosial dimana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol, khususnya yang datang dari sekolah, sehingga mereka dapat memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimum.
- c. Crow, mengartikan pendidikan adalah:

“Suatu proses dimana pengalaman atau informasi diperoleh sebagai hasil dari proses belajar. Pendidikan mencakup pengalaman, pengertian dan penyesuaian diri dari pihak terdidik terhadap rangsangan yang diberikan kepadanya, menuju ke arah pertumbuhan dan perkembangan.”

Dari uraian tentang pengertian pendidikan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pendidikan adalah suatu kegiatan atau usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina pada potensi pribadinya yang berupa rohani (cipta, rasa, dan karsa) serta jasmani (panca indera dan keterampilan).
- b. Pendidikan di dalam suatu proses perubahan perilaku menuju kepada kedewasaan dan penyempurnaan kehidupan manusia.
- c. Pendidikan adalah suatu proses pengembangan kemampuan atau perilaku kearah yang diinginkan.
- d. Pendidikan merupakan hasil atau prestasi yang dicapai oleh perkembangan manusia, dan usaha lembaga-lembaga tersebut dalam mencapai tujuan. Pendidikan merupakan tingkat kemajuan masyarakat dan kebudayaan sebagai satu kesatuan.

Berdasarkan perspektif teoritik, pendidikan seringkali diartikan dan dimaknai secara beragam, bergantung pada sudut pandang masing-masing dan teori yang dipegangnya. Terjadinya perbedaan penafsiran pendidikan dalam konteks akademik merupakan sesuatu yang lumrah, bahkan dapat semakin memperkaya khazanah berfikir manusia dan bermanfaat untuk pengembangan teori itu sendiri.

Tetapi untuk kepentingan kebijakan nasional, seyogyanya pendidikan dapat dirumuskan secara jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak yang terkait dengan pendidikan, sehingga setiap orang dapat mengimplementasikan secara tepat dan benar dalam setiap praktik pendidikan.

Untuk mengetahui definisi pendidikan dalam perspektif kebijakan, kita telah memiliki rumusan formal dan operasional, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Berdasarkan definisi di atas, terdapat tiga pokok pikiran utama yang terkandung di dalamnya, yaitu:

- (1) Usaha sadar dan terencana;
- (2) Mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya; dan
- (3) Memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Sudrajat, 2010).

Fungsi dan peran pendidikan secara lebih spesifik dikemukakan oleh beberapa tokoh. Mengenai fungsi dari pendidikan, Tilaar (2002) menyebutkan paling tidak ada lima fungsi dari pendidikan, yaitu:

- a. Pendidikan merupakan investasi manusia (*human investment*) yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi.
- b. Pendidikan mempunyai dampak peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat.
- c. Pendidikan merupakan wahana untuk membangun dan meningkatkan martabat bangsa.
- d. Pendidikan akan memperlancar mobilitas vertikal.
- e. Pendidikan dapat memperkuat lembaga-lembaga sosial serta dapat memberi sumbangan yang berarti dalam proses pembentukan masyarakat madani.

Mengenai peran pendidikan, UNESCO sebagaimana dikutip oleh Tilaar (2002) menyebutkan ada enam peran pendidikan, yaitu:

- a. Ikut menggalang perdamaian dan ketertiban dunia.
- b. Mempersiapkan pribadi sebagai warga negara dan masyarakat.
- c. Pendidikan yang merata dan menyeluruh.
- d. Menanamkan dasar-dasar pembangunan yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan.
- e. Mempersiapkan tenaga kerja untuk pembangunan ekonomi, sehingga pendidikan perlu dikaitkan dengan dunia kerja.
- f. Berorientasi pada penguasaan dan pengembangan iptek.

Kebijakan yang dapat diupayakan untuk menunjang pendidikan agar lebih bermutu, diutarakan oleh Zamroni sebagaimana dikutip oleh Tilaar (2002), di antaranya:

- a. Mengembangkan masyarakat pembelajaran, yakni suatu masyarakat dimana warganya memiliki suatu kultur belajar keyakinan, nilai-nilai, prinsip-prinsip, kebiasaan-kebiasaan, semboyan-semboyan yang dipegang bersama oleh warga sekolah yang mendorong warganya untuk senantiasa bekerja keras dan rajin menuntut ilmu.
- b. Mengembangkan *Broad Based Education*. Dalam hal ini pendidikan harus dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakatnya, antara lain dalam wujud pemberian *life skill* bagi masyarakat yang mengikuti pendidikan. *Life skill* merupakan kemampuan yang dimiliki peserta didik untuk menghadapi berbagai tantangan dalam perjalanan hidupnya.
- c. Menimbulkan napas kekeluargaan di sekolah. Napas kekeluargaan memiliki peran penting dalam kehidupan sekolah, namun napas ini sudah hilang dari sekolah. Sistem sekolah terlalu memberikan penekanan pada persaingan individual atas prestasi, yang menyebabkan peserta didik sudah kehilangan rasa persaudaraan dan saling membantu.
- d. Mengembangkan kurikulum yang fleksibel. Kurikulum ini tidak sarat beban, melainkan lebih menekankan pada kerangka umum dengan jumlah mata pelajaran inti (*core course*) yang minimal.

Oleh karena itu, untuk membangun bangsa ini, mutlak diperlukan paradigma pendidikan yang baru, visi baru tentang realitas pendidikan, perubahan yang mendasar pada pemikiran, persepsi, dan nilai-nilai yang kita miliki yang berkaitan dengan pendidikan. Dan semua itu harus diwujudkan dengan suatu kebijakan yang baik.

E. Kebijakan Pendidikan Nasional

1. Pendidikan Nasional

Pendidikan nasional menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah: “Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggapan terhadap tuntutan perubahan zaman”. Dan sistem pendidikan nasional adalah “keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk

mencapai tujuan pendidikan nasional”. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dari No. 2 tahun 1989 diganti Undang-Undang No. 20 tahun 2003, dilakukan dalam rangka memperbarui visi, misi dan strategi pendidikan nasional. Pembaruan sistem pendidikan nasional mencakup penghapusan diskriminasi antara pendidikan formal dan pendidikan non-formal.

Visi pendidikan nasional adalah memberdayakan semua warga negara Indonesia, sehingga dapat berkembang menjadi manusia berkualitas yang mampu bersaing dan sekaligus bersanding dalam menjawab tantangan zaman. Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut:

- a. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.
- b. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar.
- c. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral.
- d. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan, ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global.
- e. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan visi dan misi pendidikan nasional tersebut, maka fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi-potensi peserta didik yang menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Adapun strategi pendidikan nasional disebutkan dalam Undang-Undang No.

20 Tahun 2003, yang meliputi:

1. Pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia.
2. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi.
3. Proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis.
4. Evaluasi, akreditasi dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan.
5. Peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan.
6. Penyediaan sarana belajar yang mendidik.
7. Pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan.
8. Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata.
9. Pelaksanaan wajib belajar.
10. Pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan.
11. Pemberdayaan peran masyarakat.
12. Pusat kebudayaan dan pembangunan masyarakat.
13. Pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional.

2. Desentralisasi Pendidikan

Istilah desentralisasi muncul dalam paket UU tentang otonomi daerah yang pelaksanaannya dilatar belakangi oleh keinginan segenap lapisan masyarakat untuk melakukan reformasi dalam semua bidang pemerintahan. Menurut Bray dan Fiske sebagaimana dikutip dalam Depdiknas (2001) desentralisasi pendidikan adalah “suatu proses dimana suatu lembaga yang lebih rendah kedudukannya menerima pelimpahan kewenangan untuk melaksanakan segala tugas pelaksanaan pendidikan, termasuk pemanfaatan segala fasilitas yang ada serta penyusunan kebijakan dan pembiayaan.”

Senada dengan itu, Husen & Postlethwaite (1994) mengartikan desentralisasi pendidikan sebagai “*the devolution of authority from a higher level of government, such as a departement of education or local education authority, to a lower organizational level, such as individual schools*”. Sementara itu, menurut

Gaffar (1987) desentralisasi pendidikan merupakan sistem manajemen untuk mewujudkan pembangunan pendidikan yang menekankan pada keberagaman, dan sekaligus sebagai pelimpahan wewenang dan kekuasaan dalam pembuatan keputusan untuk memecahkan berbagai problematika sebagai akibat ketidaksamaan geografis dan budaya, baik menyangkut substansi nasional, internasional atau universal sekalipun.

Bila dicermati, esensi terpenting dari berbagai pengertian di atas adalah otoritas yang diserahkan. Williams sebagaimana dikutip dalam Depdiknas (2001) membedakan adanya dua macam otoritas (kewenangan dan tanggung jawab) yang diserahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih rendah, yaitu desentralisasi politis (*political decentralization*) dan desentralisasi administrasi (*administrative decentralization*). Perbedaan antar keduanya terletak dalam hal tingkat kewenangan yang dilimpahkan.

Husen & Postlethwaite (1994) menguraikan mengenai alasan desentralisasi (*reasons for decentralization*), yaitu:

- a. *The improvement of schools;*
- b. *The belief that local participation is a logical form of governance in a democracy;* dan
- c. *In relation to fundamental values of liberty, equality, fraternity, efficiency, and economic growth.*

Sementara itu, setelah melakukan studi di berbagai negara, Fiske (1998) menyebutkan sekurang-kurangnya ada empat alasan rasional diterapkannya sistem desentralisasi, termasuk pendidikan, yaitu:

- a. Alasan politis, seperti untuk mempertahankan stabilitas dalam rangka memperoleh legitimasi pemerintah pusat dari masyarakat daerah, sebagai wujud penerapan ideologi sosialis dan *laissez-faire* dan untuk menumbuhkan kehidupan demokrasi.

- b. Alasan sosio-kultural, yakni untuk memberdayakan masyarakat lokal.
- c. Alasan teknis administratif dan paedagogis, seperti untuk memangkas manajemen lapisan tengah agar dapat membayar gaji guru tepat waktu atau untuk meningkatkan antusiasme guru dalam proses belajar mengajar.
- d. Alasan ekonomis-finansial, seperti meningkatkan sumber daya tambahan untuk pembiayaan pendidikan dan sebagai alat pembangunan ekonomi.

Sementara itu, Marijan (dalam Abdurrahmansyah, 2001) melihat penerapan desentralisasi pendidikan di Indonesia justru sebagai gejala keputusan pemerintah dalam menghadapi persoalan keuangan. Sedangkan Sanit (2000:1) memandang penerapan desentralisasi secara umum sebagai “jalan keluar” bagi problematik ketimpangan kekuasaan antara pemerintah nasional dan pemerintah lokal. Karena itu, menurutnya, konsep desentralisasi bertolak dari asumsi pemberian sebagian kekuasaan pemerintah pusat kepada pemerintah lokal atau yang lebih rendah dalam rangka mencapai tujuan nasional.

Suryadi dan Tilaar (2004) menegaskan bahwa persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pendidikan nasional di negeri ini berkaitan dengan tiga hal penting yakni:

- 1) Bahwa sebagai akibat dari krisis ekonomi, dunia pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai;
- 2) Bahwa untuk mengantisipasi era globalisasi, dunia pendidikan dituntut untuk bisa mempersiapkan SDM yang kompeten agar mampu bersaing dengan pasar global; dan
- 3) Bahwa sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah sistem pendidikan nasional dituntut untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sehingga mampu mewujudkan proses pendidikan yang demokratis dengan memperhatikan keragaman, serta mendorong partisipasi masyarakat.

Di situlah pula arti pentingnya desentralisasi pendidikan yang memungkinkan pemerintah kabupaten atau kota bisa menggali sekaligus memanfaatkan potensi

yang dimilikinya dalam pembangunan pendidikan, terutama dalam penyelenggaraan pendidikan dasar.

3. Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pendidikan nasional, penyelenggaraan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang saat ini cukup gencar banyak disuarakan ini sesungguhnya bukanlah merupakan kebijakan baru. Dengan demikian, apa yang banyak disuarakan saat ini berkait dengan percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun itu sesungguhnya merupakan pengulangan dari yang pernah disuarakan sekitar satu dekade lebih yang lalu, tahun 1994.

a. Pengertian Pendidikan Dasar

Secara terminologis pendidikan dasar dapat diartikan sebagai pendidikan yang diselenggarakan pada jenjang pendidikan terendah atau Sekolah Dasar (SD) dalam Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan dasar secara epistemologis, merupakan pembekalan peserta didik dengan sejumlah dasar-dasar ilmu pengetahuan dan menjadi pengetahuan dasar pada jenjang pendidikan berikutnya. Dalam pengertian ini pula bermakna, bahwa pendidikan menengah dan pendidikan tinggi akan berkualitas, jika pendidikan dasarnya berkualitas. Sebab pendidikan dasar memberikan fondasi epistemologis yang cukup signifikan bagi pendidikan selanjutnya (<http://en.wikipedia.org>).

Pendidikan dasar berarti proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya

pengajaran dan latihan serta proses perbuatan pada level dasar. Pendidikan dasar dibuat sebagai pondasi untuk melangkah ke pendidikan menengah dan kemudian ke pendidikan tinggi (Didin, 2010).

Pendidikan dasar adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan, menumbuhkan sikap dasar yang diperlukan di dalam masyarakat, serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. Pendidikan dasar pada prinsipnya merupakan pendidikan yang memberikan bekal dasar bagi perkembangan kehidupan, baik untuk pribadi maupun untuk masyarakat. Karena itu, bagi setiap warga negara harus disediakan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dasar.

Secara intitusional pendidikan dasar diartikan sebagai pendidikan yang diselenggarakan selama enam tahun di Sekolah Dasar (SD) dan tiga tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau satuan pendidikan yang sederajat. Sehingga, dengan demikian, lama masa pendidikan dasar menjadi sembilan tahun lamanya dan anak yang hanya tamat pada jenjang pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) belum bisa dikatakan telah menyelesaikan pendidikan dasar jika yang bersangkutan belum tamat hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pengertian ini mengacu kepada pengertian yang tertera dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 tahun 2003 yang mengenal adanya jenjang pendidikan hanya tiga pada tiga tingkatan, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Lain dengan pengertian sebelumnya, dimana pendidikan dasar diartikan sebagai pendidikan yang diselenggarakan pada Sekolah Dasar (SD) saja dengan masa belajar enam tahun (UU 1950).

b. Sejarah Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Indonesia

Dilihat menurut sejarahnya, pelaksanaan kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang selanjutnya disebut Wajar Dikdas 9 Tahun, pertama kali dicanangkan pada tanggal 2 Mei 1994 oleh Presiden Republik Indonesia di Yogyakarta, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Pada awalnya, kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun merupakan tindak lanjut dari kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 6 Tahun yang dicanangkan sepuluh tahun sebelumnya, tahun 1984 (Depdiknas, 2001).

Untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, banyak upaya dan langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah mulai dari penambahan sarana pendidikan sampai kepada penambahan program yang mendukung tercapainya kebijakan. Namun karena terkendala oleh banyak faktor, salah satunya dan yang terutama oleh adanya gelombang krisis yang terjadi pada tahun 1997, maka banyak sasaran yang menjadi sasaran Wajib Belajar Pendidikan Dasar menjadi tidak tercapai. Itulah yang pada akhirnya telah mendorong pemerintah untuk melakukan penjadwalan ulang (*reschedule*) penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dasar yang ditandai dengan lahirnya Instruksi Presiden Republik Indonesia No.5 Tahun 2006 tentang “Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara” (Bappenas, 2009).

Inilah lima monumental bersejarah yang perlu dicatat karena berkaitan secara langsung dengan sejarah panjang pelaksanaan kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) di negeri ini, meliputi:

- 1) Pencanangan Gerakan Wajib Belajar dan Orang Tua Asuh oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 Mei 1994 yang bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional di Yogyakarta.
- 2) Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1988 yang antara lain menekankan tentang arti pentingnya penekanan perluasan Pendidikan Menengah dalam rangka perintisan Wajib Belajar pada jenjang SMP.
- 3) Kesepakatan hasil rapat koordinasi Kesejahteraan Rakyat tingkat Menteri yang diselenggarakan pada tanggal 8 Mei 1990 tentang perintisan Wajib Belajar SMP di Indonesia.
- 4) Pencanangan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pesantren Salafiyah oleh Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama pada tanggal 10 Juli 2001.
- 5) Terakhir, pencanangan Gerakan Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun oleh Presiden Republik Indonesia (Hamid, 2006).

Singkatnya, betapa panjang sejarah yang harus ditempuh oleh bangsa Indonesia hanya untuk memenuhi pendidikan dasar penduduknya. Penyebabnya banyak, bisa karena kelemahan rumusan kebijakannya, bisa karena implementasinya, bisa pula karena lingkungan kebijakannya yang tidak mendukung proses implementasinya. Mungkin itu menyangkut lingkungan dari aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial maupun budaya masyarakatnya.

Singkatnya pula, betapa berat dan juga kompleksnya masalah serta tantangan yang harus dihadapi bangsa Indonesia dalam merealisasikan kewajibannya di bidang pembangunan yang sangat vital ini, yaitu pendidikan dasar 9 tahun bagi warganya.

c. Landasan dan Tujuan Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Bagaimanapun betapa berat masalah dan besar tantangan yang dihadapi, tidak ada alasan bagi negara atau pemerintah untuk tidak memenuhi atau bahkan mengabaikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar. Dikarenakan alasannya sangat kuat dan jelas, adalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 yang telah

mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan (Ayat 1), dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya (Ayat 2). Itu semua mengandung arti bahwa pendidikan itu adalah hak rakyat dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk memenuhinya. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut telah dijabarkan dan sekaligus dipertegas lagi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang menyebutkan setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu (Pasal 5 Ayat 1), bahkan setiap warga negara yang berusia 7 sampai 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar (Pasal 6 Ayat 1). Dalam kaitan itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya anggaran guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7 sampai 15 tahun (Pasal 11 Ayat 2) (Depdiknas, 2007).

Pada tataran global, misalnya Indonesia tidak begitu saja mengabaikan beberapa komitmen dunia, dan karenanya terkait untuk melaksanakannya. Adalah Deklarasi Dakar 2000 tentang Pendidikan Untuk Semua (*Education For All*), yang antara lain menargetkan tercapainya akses pendidikan dasar bagi semua pada tahun 2015. Bahkan dalam bentuk komitmen lainnya, pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar juga merupakan satu dari delapan target yang telah menjadi komitmen dunia sebagaimana tertuang dalam *Millenium Development Goals* (MDGs). Inilah delapan sasaran pokok dari target MDGs yang merupakan penjabaran umum dari resolusi Majelis Umum PBB Nomor 55/2 “*Millenium Declaration*” yang disepakati pada tanggal 8 September tahun 2000 oleh para

pemimpin dunia, termasuk oleh Presiden Abdurrahman Wahid dari Indonesia. Dalam pendidikan sendiri MDGs telah menetapkan pencapaian pendidikan dasar sebagai salah satu sasaran pokoknya yang harus dicapai pada tahun 2015 (Bappenas, 2009).

Tidak sampai di situ, adalah Pasal 26 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang dengan tegas mengungkapkan bahwa “Setiap orang berhak atas pendidikan. Pendidikan harus bebas biaya, setidaknya pada tingkat dasar dan tingkat rendah. Pendidikan dasar harus bersifat wajib. Artinya, pengabaian pemerintah sebagai representasi negara terhadap hak-hak setiap orang untuk bisa mengakses pendidikan dasar sama artinya dengan pelanggaran hak asasi manusia (Prasetyo, 2004).

Tegasnya, semua warga negara, baik yang kaya maupun yang miskin, termasuk yang cacat, memiliki hak yang sama yang mesti diperhatikan dan dipenuhi pemerintah sebagai representasi negara. Itulah pula yang harus menjadi filosofi serta landasan lain dalam pelaksanaan gerakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di negeri ini.

Mengenai tujuan pokoknya, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, dikutip dari Djohar (2003) menyebutkan:

“Bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar ini bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan anggota umat manusia serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah.”

Dengan tujuan itu, maka setiap lulusan SD diharapkan telah memiliki kemampuan untuk memahami dan menarik kesimpulan dari obyek dan persoalan

nyata, dapat melaksanakan tindakan-tindakan tertentu yang memerlukan sejumlah keterampilan dengan percaya diri, menampilkan sifat kekanak-kanakan yang wajar, terbuka, jujur dan lain-lain. Itulah alasan mendasarnya tentang kenapa pendidikan dasar itu sangat penting bisa diakses sekaligus dipenuhi oleh setiap penduduk. Selanjutnya, diungkapkan bahwa lulusan SMP sebagai terminal dari pendidikan dasar diharapkan mampu memiliki sifat dasar yang memadai.

Lebih jelas lagi, dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas 2000-2004) secara tegas diungkapkan bahwa program pembinaan pendidikan dasar, termasuk prasekolah, memiliki empat tujuan pokok, yakni:

- (1) Memperluas dan mendukung daya tampung SD dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), SMP dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan lembaga pendidikan prasekolah sehingga menjangkau anak-anak dari seluruh masyarakat,
- (2) Meningkatkan kesamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi kelompok yang kurang beruntung, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil dan perkotaan kumuh, daerah bermasalah, masyarakat miskin, dan anak yang berkelainan,
- (3) Meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan prasekolah dengan kualitas yang memadai, dan
- (4) Terselenggaranya manajemen pendidikan dasar dan prasekolah berbasis pada sekolah dan masyarakat (*school community based management*).

Berdasarkan tujuan itu, maka secara konseptual penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dasar itu tidak saja dimaksudkan dalam rangka pemerataan pendidikan yang lebih menonjolkan aspek pencapaian kuantitatif, tetapi sekaligus juga pencapaian kualitatifnya, dua tujuan yang dalam prakteknya tidak mudah untuk bisa diwujudkan, dan karenanya masih sering mengundang perdebatan. Bahkan dalam prakteknya, program percepatan pencapaian Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun selama ini, cenderung lebih banyak menekankan pada aspek pemerataan akses dengan dampak yang tak jarang mengabaikan kualitas.

Berkait dengan itu, lebih jauhnya, sumber Depdiknas (2007) mengungkap bahwa ada enam tujuan utama yang menjadi sasaran dari gerakan nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dimaksud, meliputi:

- 1) Mendorong anak usia 13-15 tahun agar bisa masuk sekolah SMP, MTs, maupun pendidikan lainnya yang sederajat.
- 2) Meningkatkan angka partisipasi anak untuk masuk jenjang sekolah SMP/MTs terutama di daerah yang jumlah maupun prosentase anak sekolahnya cukup tinggi.
- 3) Menurunkan angka putus sekolah SMP/MTs atau yang sederajat.
- 4) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mensukseskan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
- 5) Meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam mensukseskan gerakan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
- 6) Meningkatkan peran, fungsi dan kapasitas pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan dalam penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di daerahnya masing-masing.

d. Strategi dan Bentuk-bentuk Program

Berkait dengan tujuan di atas, banyak strategi serta upaya telah, sedang dan akan digulirkan pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut, baik yang dilakukan oleh pemerintah tingkat pusat maupun pemerintah daerah memiliki tekad untuk bisa membantu anak dari keluarga miskin dalam memperoleh pendidikan.

Dilihat dari aspek programnya, menurut Inpres Nomor 5 Tahun 2006 sebagaimana dikutip dalam Depdiknas (2007) ada dua strategi pokok yang harus ditempuh pemerintah, untuk menunjang penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, meliputi (1) Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun melalui jalur pendidikan formal, dan (2) Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun melalui jalur non formal.

1) Jalur Pendidikan Formal

Melalui jalur ini, pemerintah tidak hanya berupaya memperluas sekaligus meningkatkan daya tampung satuan layanan pendidikan SMP/MTs regular, tetapi juga melalui pengembangan layanan satuan pendidikan yang sederajat. Lahirnya satuan pendidikan seperti yang dikenal dengan sebutan SMP terbuka, SD-SMP satu atap serta SD/MI dan atau SMP Kecil, adalah beberapa saja dari bentuk komitmen pemerintah dalam rangka mempercepat program penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun ini.

Model satuan pendidikan yang diberi nama SMP terbuka dibangun dalam rangka memberikan kesempatan kepada anak lulusan SD/MI atau yang sederajat yang karena faktor sosial, ekonomi atau faktor geografis tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP untuk mengikuti pendidikan dengan menggunakan prinsip belajar mandiri.

Sementara model SD-SMP Satu Atap dibangun untuk daerah-daerah pedesaan terpencil yang tidak memiliki SMP/MTs dalam rangka menyediakan layanan pendidikan formal jenjang SD/MI dan jenjang SMP secara berkelanjutan dalam satu paket. Tujuannya, seorang siswa tidak berhenti pada kelas enam, tetapi berlanjut sampai kelas sembilan sehingga hasilnya bisa menunjang gerakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

Penyelenggaraan yang disebut dengan model “*Double Shift*” serta membuka “Sistem Kelas Jauh”, adalah strategi lain yang dilaksanakan masih dalam rangka memperluas cakupan layanan pendidikan dasar selama ini. Model *double shift* diselenggarakan untuk menampung banyaknya siswa yang melanjutkan sekolah

karena tidak tertampung dalam bangunan atau ruang kelas yang tersedia dengan suatu syarat bahwa di sekolah yang bersangkutan tersedia jumlah guru memadai dengan beban mengajar yang belum melebihi ketentuan.

Sementara “Sistem Kelas Jauh” dimungkinkan untuk dilaksanakan dalam rangka memberikan layanan pendidikan kepada anak yang karena faktor geografis tidak tertampung pada sekolah terdekat yang tersedia dengan cara menginduk kepada SMP yang ada. Sistem “Kelas Jauh” ini dikembangkan sebagai rintisan menuju pendirian SMP baru sehingga pendiriannya harus diupayakan bisa dilakukan di daerah yang nantinya bisa didirikan sekolah baru, baik dilihat dari potensi jumlah siswa maupun ketersediaan lahan untuk bangunan sekolah.

Masih berkait dengan jalur pendidikan formal, melalui kebijakannya pemerintah juga menyediakan layanan pendidikan dalam bentuk satuan pendidikan yang disebut dengan “SD/MI dan atau SMP kecil”. Tujuannya sama, yaitu memperluas akses pendidikan dasar bagi anak dari keluarga yang kurang beruntung.

Disebut kecil, disamping karena rombongan belajarnya memang kecil, juga guru yang melayaninya tidak banyak. Itu sebabnya, model ini cocok untuk wilayah yang jumlah usia sekolahnya sedikit, sarana dan prasarana, termasuk jumlah gurunya yang terbatas dan berlokasi di daerah terpencil.

2) Jalur Pendidikan Non Formal

Melalui jalur pendidikan non formal, pemerintah berupaya memposisikan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) sebagai akselerator sekaligus sebagai alternatif yang diharapkan bisa memberikan sumbangan yang tidak sedikit dalam gerakan

penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun ini melalui pendidikan kesetaraan. Esensi dari strategi ini adalah terbukanya peluang bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi, sosial dan kultural untuk memperoleh pemerataan layanan pendidikan dasar yang hasilnya setara dengan lulusan SD/MI atau SMP/MTs.

Karena sasaran dari bentuk pelaksanaan program ini lebih banyak ditujukan bagi anak dari keluarga yang secara ekonomi kurang beruntung, dan dengan tujuan untuk memberdayakan kehidupan mereka, maka aspek kecakapan hidup (*life skill*), di samping kemampuan akademik, menjadi salah satu muatan pokok dari model pendidikan kesetaraan ini.

Pengembnagan program yang dikenal dengan sebutan “Kelompok Belajar” mulai dari program yang dikenal dengan sebutan Paket A (setara dengan SD) dan Paket B (setara dengan SMP), adalah dua strategi yang dilakukan pemerintah dalam rangka menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun melalui jalur pendidikan non formal selama ini.

Termasuk dalam jalur pendidikan non formal ini adalah penyelenggaraan kelompok belajar paket A atau B di Pondok Pesantren Salafiyah. Bukan hanya itu, melalui jalur ini pula dikembangkan program Keaksaraan Fungsional (KF) untuk memberantas masalah buta huruf yang angkanya secara nasional masih mencatat sekitar 10 persen dari total jumlah penduduk dewasa.

Dalam rangka membantu meringankan biaya pendidikan yang selama ini banyak dikeluarkan pihak sekolah dan masyarakat, pemerintah pun antar lain telah menggulirkan program yang dikenal dengan sebutan pemberian “Bantuan

Operasional Sekolah atau BOS”, yakni dana dari pemerintah pusat yang didistribusikan melalui pemerintah daerah ke SD/MI dan SMP/MTs atau yang sederajat untuk membantu kegiatan operasional sekolah, termasuk untuk membantu biaya transportasi bagi siswa yang tidak mampu dalam rangka mempercepat penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

D. Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan didefinisikan secara berbeda oleh berbagai pihak. Badan Pusat Statistik (2007) mendefinisikan kemiskinan sebagai “ketidak mampuan memenuhi kebutuhan dasar untuk kehidupan yang layak (kebutuhan dasar makanan maupun kebutuhan dasar bukan makanan)”. Sementara itu, World Bank (2007) mendefinisikan kemiskinan dengan dimensi yang lebih luas. “Kemiskinan adalah kondisi terjadinya kekurangan pada taraf hidup manusia secara fisik (kebutuhan dasar materi dan biologis termasuk kekurangan nutrisi, kesehatan, pendidikan, dan perumahan) serta sosial (resiko kehidupan, kondisi ketergantungan, ketidak berdayaan, dan kepercayaan diri yang kurang)”.

Sementara itu banyak pakar telah membuat rumusan mengenai definisi kemiskinan ini, mulai dari pengertian yang parsial (hanya melihat kemiskinan dari aspek ekonomi atau materi) sampai pada pengertian yang komprehensif karena melibatkan banyak aspek, termasuk aspek politik. Para pakar yang termasuk kutub konservatisme mencoba melihat kemiskinan sabagai yang melulu masalahnya individu orang miskin. Para pakar konservatif ini berkeyakinan bahwa kemiskinan

itu tidak dapat dianggap berasal dari struktur sosial atau struktur politik, namun dari sifat khas orang miskin itu sendiri. Sejalan dengan pendapat itu, sekelompok ahli ilmu sosial melihat munculnya kemiskinan dalam sebuah masyarakat berkait dengan budaya yang hidup dalam masyarakat. Artinya, kemiskinan seringkali dikaitkan dengan rendahnya etos kerja anggota masyarakat, yaitu berkaitan dengan rajin atau tidaknya seseorang dalam bekerja atau mengolah sumber daya alam yang tersedia (Soetrisno, 1997).

Kutub berikutnya, adalah kelompok pakar yang cenderung melihat kemiskinan sebagai akibat dari struktur sosial yang tidak adil, sebutlah kaum strukturalis. Jika kelompok pertama cenderung menuduh bahwa orang miskinlah yang menjadi penyebab kemiskinan, maka kaum ini cenderung melihat kemiskinan sebagai akibat dari lingkungan yang membentuknya. Menurut kelompok ini, salah satunya, kepemilikan tanah yang tidak merata dalam suatu masyarakat akan menimbulkan masalah kemiskinan dalam masyarakat itu (Soetrisno, 1997). Pandangan ini sesuai dengan pemahaman kaum liberal yang melihat kemiskinan hanya sebagai realistis dan situasional pada lingkungan yang penuh diskriminasi dan peluang yang sempit (Rakhmat dalam Swasono, 1999:25).

Pemahaman tersebut lebih menarik lagi, dan dalam banyak aspeknya mungkin relevan dengan yang terjadi di republik ini. Para pendukung perspektif ini, mempunyai pemikiran bahwa model pembangunan yang hanya berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi suatu negara akan menimbulkan kepincangan antara sektor ekonomi modern dengan sektor ekonomi tradisional. Kesenjangan itulah yang kemudian berdampak menimbulkan kemiskinan. Landasan

pemikirannya, sektor ekonomi modern akan memperoleh fasilitas dan dukungan politik dari pemerintah karena diyakini akan menunjang target pertumbuhan, sementara sektor ekonomi tradisional cenderung diabaikan karena tidak akan banyak menyumbangkan terhadap pencapaian target pertumbuhan. Mereka miskin karena memang kebijakan pemerintah yang memarginalkannya, sebuah pandangan yang nyaris sama dengan pemahaman kelompok radikal yang selalu melihat kemiskinan sebagai akibat dari kebijakan umum dominan (secara ekonomi dan politik) atau *the ruling elits* (Soetrisno, 1997).

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas bisa ditegaskan bahwa mendefinisikan kemiskinan memang tidak mudah, karena banyaknya latar belakang pakar yang mendefinisikan, bahkan juga dipengaruhi oleh kepentingan orang yang mendefinisikan. Namun melalui pemikiran-pemikirannya itu, setidaknya kita bisa menyimpulkan bahwa fenomena sosial bernama kemiskinan itu memang begitu kompleks dan multi dimensi. Saking kompleksnya, hampir tidak ada definisi yang secara utuh dan lengkap bisa menggambarkan fenomena sosial bernama kemiskinan.

Paparan itu semua menunjukkan ukuran-ukuran obyektif kemiskinan itu sangat bervariasi sehingga harus hati-hati dan kritis dalam mencermatinya. Namun demikian, Chambers sebagaimana dikutip oleh Soetrisno (1997), mencoba menawarkan apa yang dikenal dengan konsep kemiskinan terpadu (*integrated poverty*). Menurutny, kemiskinan yang dialami oleh negara berkembang, khususnya masyarakat pedesaan, pada umumnya melibatkan beberapa faktor

kemalangan atau ketidak beruntungan (*disadvantage*) yang satu sama lain saling terkait melingkari kehidupan orang miskin.

Konsep ini juga menjadi relevan untuk dijadikan salah satu rujukan dalam mengkaji masalah ketidak beruntungan, masyarakat miskin dalam mengakses pendidikan, antara lain:

Pertama, adalah ketidak beruntungan yang berkait dengan situasi dan kondisi nyata orang miskin yang antara lain ditandai kondisi rumahnya yang tidak layak karena dibuat dari bahan bangunan yang bermutu rendah dengan fasilitas yang serba tidak memadai, dan karenanya, cenderung menghabiskan apa yang mereka peroleh pada hari itu juga.

Kedua, adalah ketidak beruntungan karena menyangkut kelemahan fisik (*physical weakness*). Akibatnya, ketergantungan antara satu keluarga miskin dengan anggota yang lainnya, sebutlah ketergantungan antara keluarga yang sehat (*survivor*) dengan yang lemah.

Ketiga, adalah ketidak beruntungan karena kerentanannya (*vulnerability*). Dalam hal ini, biasanya orang miskin tidak memiliki cadangan, baik berupa uang ataupun makanan untuk menghidupi keadaan darurat, dalam keadaan sakit misalnya. Tidak mengherankan kalau dalam keadaan yang seperti itu mereka menjual banrang apa saja yang dimilikinya yang pada gilirannya berdampak memperkuat kemiskinan mereka.

Keempat, adalah ketidak beruntungan karena keterasingan. Karena kemiskinannya, mereka sering secara terpaksa tinggal di daerah-daerah yang secara geografis terisolasi, termasuk terisolasi dari akses terhadap berbagai sumber informasi.

Kelima, adalah ketidak beruntungan karena ketidakberdayaan (*powerlessness*). Esensinya, orang miskin sering tidak beruntung karena ketidak berdayaan berhadapan dengan orang atau pihak lain yang tak jarang mengeksploitasinya.

Ciri-ciri itu ditegaskan Chamber, adalah merupakan karakteristik yang umumnya melekat kepada orang miskin, kendati tidak setiap orang miskin memiliki semua ciri-ciri ketidak beruntungan itu. Artinya, seseorang bisa disebut miskin, kendatipun misalnya memiliki kondisi fisik yang kuat.

Menurut Todaro (1997) menyatakan bahwa variasi kemiskinan di negara berkembang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- 1) Perbedaan geografis, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan,
- 2) Perbedaan sejarah, sebagian dijajah oleh negara yang berlainan,
- 3) Perbedaan kekayaan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusianya,
- 4) Perbedaan peranan sektor swasta dan negara,
- 5) Perbedaan struktur industri,
- 6) Perbedaan derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik negara lain, dan
- 7) Perbedaan pembagian kekuasaan, struktur politik dan kelembagaan dalam negeri.

Sedangkan menurut Jhingan (2000), mengemukakan tiga ciri utama negara berkembang yang menjadi penyebab dan sekaligus akibat yang saling terkait pada kemiskinan, antara lain:

- 1) Prasarana dan sarana pendidikan yang tidak memadai sehingga menyebabkan tingginya jumlah penduduk buta huruf dan tidak memiliki keterampilan ataupun keahlian.
- 2) Sarana kesehatan dan pola konsumsi buruk sehingga hanya sebahagian kecil penduduk yang bisa menjadi tenaga kerja produktif, dan
- 3) Penduduk terkonsentrasi di sektor pertanian dan pertambangan dengan metode produksi yang telah usang dan ketinggalan zaman.

Berdasarkan catatan Tjokrowinoto (1995), paling tidak terdapat tujuh profil kemiskinan yang perlu dipahami oleh siapa saja yang ingin memahami kemiskinan, terlebih bagi para pembuat kebijakan:

- (1) Kemiskinan itu bukanlah masalah kesejahteraan belaka. Dengan kata lain, kemiskinan tidak bisa dilihat semata dari dimensi ekonomi.
- (2) Masalah kemiskinan adalah masalah ketidakberdayaan (*powerlessness*), yaitu perasaan impotensi emosional dan sosial ketika berhadapan dengan para elit atau kalangan mampu, termasuk ketika berhadapan dengan para birokrat yang menentukan keputusan yang menyangkut dirinya, termasuk ketidakberdayaan ketika harus menghadapi penyakit atau kematian.
- (3) Kemiskinan juga berarti tertutupnya akses terhadap berbagai peluang kerja, termasuk pendidikan, karena hubungan produksi dalam masyarakat tidak memberi peluang bagi mereka untuk tidak berpartisipasi secara penuh.
- (4) Kemiskinan juga berarti menghabiskan semua atau bagian terbesar dari penghasilannya untuk konsumsi pangan dalam kuantitas dan kualitas yang terbatas kemudian berdampak pada rendahnya produktivitas.
- (5) Kemiskinan juga ditandai dengan tingginya *dependency ratio* (jumlah anggota yang tidak produktif lebih besar daripada jumlah anggota

keluarga yang produktif/rasio ketergantungan) karena besarnya keluarga, dan sebagian besar diantaranya adalah anggota keluarga di bawah lima tahun.

- (6) Kemiskinan juga sering terwujud dalam rendahnya kemampuan mengakses kepada pasar karena rendahnya aksesibilitas dan kondisi alam yang miskin.
- (7) Kemiskinan juga terefleksikan dalam budaya kemiskinan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain.

Dengan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fenomena sosial bernama kemiskinan merupakan sesuatu yang kompleks, berdimensi banyak dan memiliki variasi yang besar dan luas yang tidak akan terungkap dengan angka-angka statistik semata. Itu sebabnya, kegagalan dalam memahami kemiskinan akan menghasilkan kebijakan dan strategi yang keliru dalam upaya untuk menanggulangnya.

2. Pengertian Keluarga Miskin

Keluarga miskin adalah keluarga yang mempunyai sedikit uang atau tidak mempunyai uang sama sekali, tidak memiliki barang-barang atau kebutuhan lainnya atau dapat dikatakan suatu keluarga yang kesejahteraannya lemah, sebagaimana dikutip dalam American Dictionary (2010) bahwa: *"poor family is a family which having little or no money, goods, or other means or support: a poor family living on welfare."*

Sementara itu, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) (dalam BPS, 2008) memberikan definisi kemiskinan lebih operasional lagi dengan mempertimbangkan banyak variabel berkait dengan tingkat kesejahteraan sebuah keluarga dilihat dari banyaknya aspek yang cukup luas, termasuk dari aspek pendidikan. Munculnya istilah yang dikenal dengan sebutan keluarga

“Prasejahtera” (Pra KS) dan keluarga “Sejahtera I (KS I) adalah istilah lain dari yang dimaksud kemiskinan dalam versi BKKBN.

Jelasnya, sebuah keluarga akan dikategorikan Prasejahtera alias miskin apabila yang bersangkutan tidak mampu memenuhi satu atau seluruh indikator berikut ini:

- (1) Tidak mampu makan dua kali sehari;
- (2) Tidak memiliki pakaian ganti untuk beberapa kegiatan;
- (3) Tidak mampu berobat ketenaga atau sarana pelayanan kesehatan; dan
- (4) Tidak memiliki tempat tinggal atau rumah yang sebagian lantainya terdiri dari tanah atau rumah gubuk.

Sementara itu keluarga miskin yang termasuk dalam kategori Sejahtera I. Indikatornya, kendatipun mereka sudah mampu makan dua kali sehari, tetapi dalam satu minggu tidak pernah memakan lauk pauk yang bergizi. Indikator lainnya, meskipun rumah mereka tidak lagi berlantai tanah, namun luasnya sangat sempit karena kurang dari 8 m² per jiwanya.

Yang menarik, BKKBN yang perumusan definisinya melibatkan para sosiolog yang tergabung dalam Ikatan Sarjana Sosologi Indonesia (ISSI) itu juga memasukkan variabel pendidikan sebagai salah satu indikatornya. Jelasnya, sebuah keluarga juga akan termasuk kategori “Sejahtera I” jika yang bersangkutan memiliki setidaknya satu anggota keluarga yang berusia 7-15 tahun tidak bersekolah. Dengan demikian, semakin banyak penduduk usia 7-15 tidak bersekolah, maka akan semakin tinggi jumlah keluarga kategori “Sejahtera I”.

3. Problem Pendidikan bagi Anak dari Keluarga Miskin

Apabila dikaitkan dengan kompleksnya definisi kemiskinan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka banyak faktor yang bisa digali untuk mengetahui penyebab anak dari keluarga miskin tidak mampu melanjutkan sekolah. Toenlie (1994), mengemukakan paling sedikit ada dua hal penyebab rendahnya jumlah lulusan SD yang melanjutkan ke SMP, yakni rendahnya kemampuan ekonomi orang tua kalau bukan berkait dengan masalah kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan tingkat SMP bagi anaknya.

Hasil penelitian yang pernah dilakukan Yayasan Kakak, sebagaimana dikutip oleh Prasetyo (2004), mengungkap fakta yang sangat memprihatinkan. Jelasnya penelitian ini mengungkap bahwa salah satu bidang yang selama ini menjadi penyebab munculnya banyak kasus pelacuran anak, adalah karena ketidakmampuan orang tua untuk melanjutkan sekolah mereka.

Itulah pula makna tentang investasi anak bagi kebanyakan masyarakat miskin pada umumnya sebagaimana juga sering jadi objek telaahan para ahli sosial kependudukan. Itulah faktor yang selama ini sering menjadi penyebab kenapa banyak anak dari keluarga miskin yang terpaksa meninggalkan bangku sekolah semata hanya untuk bekerja sekedar membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Pilihan lainnya, banyak anak dari keluarga miskin yang terpaksa menjalankan fungsi ganda, yakni sekolah sambil bekerja, tentu dengan segala resikonya yang tidak menguntungkan bagi kelangsungan pendidikan mereka.

Singkatnya, bagi mereka anak adalah mesin produksi juga tiang penyangga kehidupan sekaligus kelangsungan eksistensi keluarga. Itulah pula faktor yang

kini hadir menjadi penyebab kenapa upaya pemerintah dalam membebaskan biaya sekolah tidak sepenuhnya akan menjamin dalam meningkatkan partisipasi sekolah bagi anak dari keluarga miskin.

Menurut hasil kajian yang dilakukan Irwanto dkk (1995), anak-anak dalam usia didik sebenarnya lebih senang sekolah daripada bekerja. Tetapi, akibat dari faktor-faktor yang sifatnya struktural dan karena di kalangan orang tua masih belum tumbuh dengan baik kesadaran akan pentingnya pendidikan, di wilayah pedesaan pada khususnya masih sering terjadi anak-anak yang terpaksa harus berhenti sekolah di tengah jalan atau *drop out*. Di sini, masalah tidak kemampuan ekonomi yang diperparah oleh rendahnya kesadaran orang tua menjadi faktor yang semakin berdampak terhadap ketertinggalan pendidikan bagi anak dari keluarga miskin. Temuan itu semua mengisyaratkan bahwa berbicara mengenai arti pentingnya keberpihakan pemerintah dalam membantu meringankan beban pembiayaan pendidikan bagi anak dari keluarga miskin tidak cukup ditafsirkan secara dangkal sebatas pembebasan seluruh pembiayaan pendidikan, apalagi semata pembebasan Sumbangan Pembangunan Pendidikan (SPP).

Membicarakan upaya untuk meringankan beban biaya pendidikan bagi anak dari keluarga miskin seharusnya juga berbicara mengenai banyak item pembiayaan atau *cost* yang harus dikeluarkan anak berkait dengan proses penyelenggaraan pendidikan secara utuh dan menyeluruh. Pemahaman itu sangat penting bukan saja ketika pemerintah akan merumuskan kebijakan pendidikan, tetapi juga untuk bisa memahami dengan tepat mengenai beratnya beban

pembiayaan pendidikan yang harus dipikul anak dari keluarga miskin (Supriadi, 2003).

Dilihat menurut kategorinya, misalnya pemerintah mesti mempertimbangkan besaran biaya pendidikan yang oleh Thomas (1971) dikategorikan kepada biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*). Berapa besarnya yang mesti dikeluarkan orang tua atau anak, mungkin itu dalam bentuk iuran, pembelian buku, baju seragam, transportasi adalah contoh yang dimaksud dengan biaya langsung yang mesti dipertimbangkan, terlebih ketika membicarakan biaya pendidikan bagi anak dari keluarga tidak mampu. Sementara berapa pendapatan yang hilang karena anak harus mengikuti proses pendidikan (*opportunity foregone*) adalah contoh dari biaya pendidikan tidak langsung.

Bahkan bagi mereka yang miskin, besarnya pendapatan yang hilang atau *opportunity cost* itu menjadi sangat urgen jika dikaitkan dengan persepsi mereka yang sering menempatkan anak sebagai sumber pendapatan. Intinya, berapa biaya total yang harus dikeluarkan orang tua untuk membiayai pendidikan anaknya, atau yang disebut dengan *total private cost* dalam Jones (1985), adalah komponen penting yang mesti diperhatikan dalam menghitung beban pembiayaan pendidikan, lebih-lebih bagi anak dari keluarga miskin.

Itulah beberapa kategori dan bentuk-bentuk pembiayaan yang mesti dipertimbangkan oleh pemerintah ketika mau menghitung besarnya *private cost* yang sekaligus merupakan beban biaya pendidikan yang harus ditanggung orang tua, terlebih jika dikaitkan dengan niat atau tekad pemerintah untuk membuat kebijakan yang mampu meringankan beban hidup rakyat miskin. Bahkan

kekeliruan para pengambil keputusan dalam memahami semua itu bisa berdampak fatal karena justru bisa melahirkan kebijakan yang tidak pro rakyat miskin. Di situlah pula relevansinya bagi pemerintah untuk senantiasa mengintegrasikan kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun bagi anak dari keluarga miskin itu dalam keterpaduan dengan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga mereka. Jelasnya, dalam konteks itu pemerintah mesti sadar bahwa rendahnya partisipasi pendidikan bagi anak dari keluarga miskin tidak selamanya diakibatkan oleh ketidak mampuan orang tua mereka dalam memenuhi keperluan biaya sekolah anak-anaknya, melainkan lebih karena sikap orang tua yang takut kehilangan sumber penghasilan yang mestinya disumbangkan anaknya.

Masalah pendidikan bagi anak dari keluarga miskin tidak sampai di situ. Sebagai akibat dari kemampuan ekonomi masyarakat yang rendah, maka bagi sebagian masyarakat biaya pendidikan dirasakan mahal. Bahkan karena ketidak mampuannya, didukung pula oleh karena kurang sadaran akan arti pentingnya pendidikan, mereka menganggap bahwa sekolah hanyalah pemborosan semata (Manap, 1993).

Jika digali lebih dalam lagi, mungkin masih banyak fakta lain bisa diangkat untuk mengungkap masalah dan kendala pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun bagi anak dari keluarga miskin alias kurang beruntung ini. Namun dari banyak faktor yang bisa dikaji, hampir bisa dipastikan bahwa masalah kemiskinan dengan berbagai karakteristiknya yang begitu kompleks merupakan salah satu yang menjadi penyebab utamanya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah bagian yang sangat penting dalam suatu kegiatan penelitian agar penelitiannya dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana. Maka harus menggunakan metode penelitian yang tepat. Menurut Nazir (2005) metode penelitian adalah alat-alat untuk memandu peneliti tentang bagaimana penelitian dilakukan untuk membantu peneliti agar dapat memperoleh data yang dikehendaki sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Dengan demikian metode penelitian dapat dikatakan sebagai cara yang dilakukan untuk melakukan kegiatan ilmiah yang berupa penyelidikan yang dilakukan secara berhati-hati melalui pengumpulan data yang sesuai untuk memecahkan suatu permasalahan.

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk lebih mengkaji permasalahan sekaligus memperoleh makna yang lebih dalam tentang fenomena sosial terkait dengan Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dalam rangka membantu anak dari keluarga miskin di Kabupaten Kediri. Oleh karena itu peneliti menggunakan metode kajian kualitatif yang bersifat deskriptif.

Penelitian deskriptif artinya bahwa peneliti ingin mengungkapkan tema yang diangkat secara mendalam. Menurut Faisal (1980), penelitian deskriptif adalah: “Suatu penelitian yang berupaya untuk mengungkapkan suatu masalah dan

keadaan sebagaimana adanya sehingga hanya akan mengungkapkan fakta-fakta serta tidak menggunakan dan tidak melakukan pengujian hipotesa.”

Tujuan penelitian kualitatif ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu tetapi diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian kemudian dapat ditarik kesimpulan berupa sebuah pemahaman umum tentang kenyataan tersebut (Ruslan, 2003).

B. Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi objek kajian agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data di lapangan, dan untuk menghindari dari data yang tidak relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Spradley sebagaimana dikutip oleh Sugiyono (2008) menyatakan bahwa fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial.

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

3. Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun bagi anak dari keluarga miskin di Kabupaten Kediri.
 - a. Bentuk-bentuk program Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, dalam kaitannya dengan upaya untuk meringankan beban anak dari keluarga miskin.

- b. Pelaksanaan program Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, dalam kaitannya dengan upaya untuk meringankan beban anak dari keluarga miskin.
 - c. Hasil Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
4. Faktor pendukung dan faktor penghambat Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun bagi anak dari keluarga miskin di Kabupaten Kediri.
- a. Faktor Pendukung
 - a) Dukungan Sarana dan Prasarana
 - b) Ketersediaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
 - b. Faktor Penghambat
Kurangnya Kesadaran Masyarakat akan Arti Penting Pendidikan

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian. Berdasarkan lokasi penelitian ini nantinya diharapkan peneliti akan memperoleh data dan informasi sesuai dengan tema, masalah, dan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Adapun lokasi penelitian yang dipilih adalah Kabupaten Kediri. Alasan dipilihnya Kabupaten Kediri karena sejak berlakunya UU no.22 Tahun 1999, dan telah disempurnakan mejadi UU no.32 Tahun 2004, yang mana pendidikan termasuk bidang yang didesentralisasikan, memberikan ruang gerak dan inisiatif bagi pemerintah kabupaten, termasuk Kabupaten Kediri

untuk meningkatkan layanan pendidikan, khususnya dalam hal ini adalah layanan pendidikan dasar bagi anak dari keluarga miskin.

Sedangkan yang dimaksud dengan situs penelitian adalah tempat untuk memperoleh data dan informasi yang digunakan untuk menjawab permasalahan sesuai dengan fokus penelitian yang ingin diteliti. Oleh karena itu yang menjadi situs dalam penelitian ini adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kediri. Dengan demikian penelitian terhadap situs ini didasarkan pertimbangan bahwa lokasi atau tempat tersebut memungkinkan untuk diperoleh data atau informasi yang akurat dan relevan dengan permasalahan penelitian.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penulis mengklasifikasikan data yang diperoleh dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti karena berkaitan langsung dengan obyek penelitian. Pada umumnya sumber data primer berupa *person*. Menurut Arikunto (1998), "Person adalah sumber data yang dapat memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket".

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder yang digunakan

dalam penelitian ini berupa *paper* (dokumen). Menurut Arikunto (1998), “Paper adalah sumber data berupa dokumen yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau simbol lain”.

Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh melalui dokumen atau arsip, komunikasi data serta beberapa laporan penelitian dan catatan yang relevan dengan obyek penelitian yang dapat memberikan informasi dalam bentuk catatan resmi.

2. Sumber Data

Sumber data berasal dari subjek atau objek yang memenuhi persyaratan tertentu yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Menurut Arikunto (1998), “yang dimaksud dengan sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh”.

Data tersebut diperoleh dengan langsung terjun ke situs penelitian mengamati fenomena yang terjadi dan mewawancarai informan dalam situs penelitian. Informasi awal dipilih secara purposif (*purposive sampling*) yang didasarkan atas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan data, karenanya, sumber data penelitian dalam penelitian ini dapat dibedakan sebagai berikut :

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data adalah:

1) Informan:

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

- (1) Narasumber yang terkait dengan penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, dalam hal ini adalah para pejabat dari

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kediri.

1. Drs. Hidayat Wasis, selaku Kepala Bidang Perencanaan.
2. Drs. Sunaryo, selaku Kepala Bidang TK/SD.
3. Drs. Sholeh, selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana TK/SD.
4. Drs. Wardoyo, selaku Kepala Seksi Kurikulum TK/SD.
5. Dra. Eko Lindartin, selaku Kepala Seksi Kesiswaan TK/SD.
6. Drs. Faizin, selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SMP.
7. Drs. Sujud Winarko, selaku Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah.
8. Drs. Hendi Septo, selaku Staf Perencanaan.

(2) Narasumber yang bisa diharapkan jadi representasi dari objek yang menjadi sasaran kebijakan, yakni anak usia SMP/MTs dari keluarga miskin dan orang tua dari anak yang bersangkutan.

2) Tempat dan peristiwa: tempat dan peristiwa yang dimaksud dalam hal ini meliputi lokasi penelitian, fasilitas yang tersedia, keadaan alam, keadaan sosial budaya, maupun perilaku dan peristiwa-peristiwa yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, yang direkam melalui observasi.

3) Dokumen-dokumen yang berkenaan dengan fokus penelitian yang diperoleh, antara lain:

(1) Dokumen-dokumen dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kediri.

(2) Arsip-arsip dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kediri.

(3) Beberapa jurnal dari internet.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data (Arikunto, 1998). Oleh karena itu, untuk memperoleh data yang valid dan relevan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut sebagai berikut:

1. Wawancara (*interview*)

Merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti berhadapan langsung dengan narasumber untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan data yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

2. Observasi

Merupakan cara memperoleh data dengan cara dengan melakukan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian dengan menggunakan seluruh alat indera. Pengamatan dilakukan untuk memperoleh data berdasarkan kenyataan-kenyataan di lapangan dengan melakukan pencatatan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang dianggap relevan pada lokasi dan situs penelitian sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

F. Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2010), terdapat dua hal yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian, dan kualitas pengumpulan data. Sedangkan menurut Muhammad dan Djaali (2005) instrumen penelitian diartikan sebagai alat untuk mengumpulkan data mengenai variabel-variabel penelitian untuk kebutuhan penelitian. Dengan kata lain, instrumen penelitian adalah alat untuk membantu peneliti dalam menggali data dan informasi pada saat penelitian.

Adapun yang menjadi instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Peneliti itu sendiri, dimana peneliti menjadi subjek peneliti dan sekaligus menjadi instrumen penelitian. Seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2010), bahwa dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri. Dengan berperan sebagai instrumen utama, diharapkan peneliti dapat menangkap fenomena-fenomena yang sedang terjadi mengenai apa yang diteliti di saat itu. Peneliti menggunakan alat panca inderanya untuk melakukan pengamatan langsung fenomena-fenomena yang sedang terjadi di lapangan.
2. Pedoman wawancara, sebagai garis besar atau panduan yang akan ditanyakan kepada pihak informan terkait dengan penggalian data penelitian. Selain itu juga sebagai pengarah dalam proses wawancara agar berjalan secara efektif dan efisien.
3. Peralatan tulis-menulis yang membantu untuk melakukan pencatatan hal-hal penting ketika sedang melakukan penelitian di lapangan.

G. Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Dengan menggunakan analisis kualitatif ini, peneliti berusaha mendeskripsikan secara umum tentang aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian yaitu implementasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, beserta faktor pendukung dan penghambatnya.

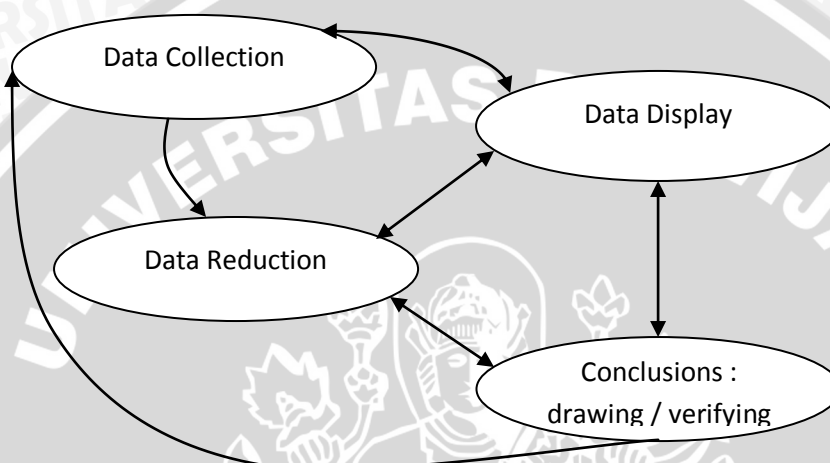
Data yang telah diperoleh kemudian akan diolah dengan menggunakan metode analisa yang sesuai dengan tujuan untuk menyederhanakan data agar dapat diinterpretasikan, sehingga masalah dapat dipecahkan. Adapun proses analisa dalam metode kualitatif ini dilakukan sejak awal dan sepanjang proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini digunakan analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Milles dan Hubberman (1992), yang terdiri dari tiga komponen analisis, yaitu:

1. Reduksi data (*Data Reduction*), merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan informasi data “mentah” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan reduksi. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, meringkas, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan final dapat ditarik dan diverifikasi.
2. Penyajian data (*Data Display*), penyajian adalah sehubungan informasi yang tersusun yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, melalui penyajian nyata, peneliti menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam bentuk yang lebih sederhana atau konfigurasi yang mudah dipahami.
3. Menarik kesimpulan atau menverifikasi (*Conclusion Drawing atau Verifying*), kegiatan ini memberi makna yaitu mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan-penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab atau akibat proposisi. Verifikasi berarti meninjau ulang catatan-catatan lapangan, bertukar pikiran dengan teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif. Makna yang muncul dari atau untuk harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya. Inilah yang disebut validitas.

Uraian analisa diatas dapat digambarkan kedalam bagan yang akan terlihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 1.

Model Analisa Interaktif (Milles dan Hubberman)



Sumber : Miles dan Huberman (1992)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

D. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Kediri

a. Keadaan Geografis

Kabupaten Kediri merupakan salah satu Kabupaten yang berada di propinsi Jawa Timur, secara geografis diapit dua gunung besar yaitu Gunung Kelud disebelah timur dan Gunung Wilis disebelah barat. Adapun kondisi geografis pada bagian tengah wilayah Kabupaten Kediri adalah Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas, yang membelah wilayah Kabupaten Kediri menjadi dua bagian dengan hamparan persawahan di tepian Sungai Brantas yang sangat subur. Posisi geografi Kabupaten Kediri terletak antara $111^{\circ} 47' 05''$ sampai dengan $112^{\circ} 18' 20''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 36' 12''$ sampai dengan $8^{\circ} 0' 32''$ Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Kediri diapit oleh 5 Kabupaten, antara lain:

Sebelah Utara : Jombang dan Nganjuk

Sebelah Timur : Jombang dan Malang

Sebelah Selatan : Tulungagung dan Blitar

Sebelah Barat : Tulungagung dan Nganjuk

Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Kediri sekitar 138.605 hektar, terdiri dari lahan sawah 47.306 hektar dan lahan non sawah 91.299 hektar. Luas lahan sawah dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Tahun 2010 turun 5

ha dari tahun 2009. Kondisi tersebut perlu diantisipasi sejak dini agar ketahanan pangan Kabupaten Kediri tetap terjaga.



b. Pemerintahan

Tahun 2010, pemerintah Kabupaten Kediri memiliki 419 institusi, terdiri dari 17 Dinas, 6 Badan, 4 Kantor, 8 Bagian (Sekretariat), 4 BUMD, 1 KPUD, 1 staf ahli bupati, 1 RSUD, 1 Satpol PP, 1 Sekwan, 1 Inspektorat, 26 Kecamatan, 343 Desa, dan 1 Kelurahan. Jumlah organisasi RW dan RT masing-masing ada sebanyak 2.848 RW dan 9.244 RT. Tahun 2009 jumlah kecamatan bertambah dua, yang sebelumnya kecamatan Pare pecah menjadi kecamatan Pare dan Badas, kemudian Kecamatan Gampengrejo pecah menjadi kecamatan Gampengrejo dan Ngasem.

c. Penduduk dan Tenaga Kerja

a) Penduduk

Berdasar hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 (SP2010) yang diselenggarakan pada tanggal 1-31 Mei 2010, jumlah penduduk Kabupaten Kediri berjumlah 1.499.768 jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 752.852 jiwa dan perempuan 746.916 jiwa, sehingga *sex ratio*-nya 100,8.

Selama kurun waktu 10 tahun mengalami kenaikan 91.415 jiwa (jumlah penduduk hasil Sensus Penduduk Tahun 2000 sebanyak 1.408.353 jiwa). Bila dibandingkan dengan hasil Sensus Penduduk Tahun 2000 ini, *sex ratio* hampir tidak mengalami perubahan, artinya selama 10 tahun tidak ada perubahan signifikan dalam hal komposisi jenis kelamin (sex ratio hasil Sensus Penduduk 2000 adalah 100,4).

b) Tenaga Kerja

Menurut catatan Dinakertrans Kabupaten Kediri, tahun 2010 tercatat ada sekitar 6.442 lowongan kerja baru, turun signifikan dari tahun sebelumnya yang mencapai 8.880 lowongan kerja baru (27,45 %). Senada dengan lowongan kerja baru, jumlah pencari kerja baru juga mengalami penurunan cukup signifikan. Bila tahun 2009 tercatat ada sebanyak 11.607 orang, tahun 2010 menjadi 8.364 orang atau turun 27,94 %.

Bila kita perhatikan, penurunan lowongan kerja baru hampir sama dengan penurunan pencari kerja baru. Kondisi tersebut tidak terlalu mengkhawatirkan, bila dua data tersebut disandingkan, akan tetapi menjadi lain, bila dilihat satu per satu. Penurunan lowongan kerja baru mengindikasikan pertumbuhan ekonomi

yang tercipta tidak mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi. Padahal pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kediri tahun 2010 cukup fantastis, yakni 6,04 persen. Kondisi tersebut biasa disebut dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas. Bila hal ini terus terjadi, maka arah pembangunan ekonomi Kabupaten Kediri perlu di evaluasi.

Penurunan pencari kerja baru, memperlihatkan komposisi umur produktif yang berkurang atau dengan kata lain Angkatan Kerja baru tahun 2010 lebih rendah dari tahun 2009. Bila kondisi tersebut terus terjadi, maka 10 atau 20 tahun kedepan Kabupaten Kediri akan kekurangan penduduk produktif, sehingga angka *dependency ratio* (rasio ketergantungan usia non produktif kepada usia produktif) semakin besar.

d. Sosial

a) Pendidikan

Pada tahun ajaran 2010/2011, ada sebanyak 2.674 institusi pendidikan di Kabupaten Kediri, mulai jenjang Diniyah, Taman Kanak-kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT).

Jumlah institusi pendidikan tersebut bertambah 31 institusi dibandingkan tahun 2009. Pada jenjang TK bertambah sebanyak 31 instutisi dan SD bertambah 8 institusi. Jenjang SLTP berkurang 10 institusi dan jenjang SMU/SMK bertambah 2 institusi. Sedangkan jenjang pendidikan Diniyah dan SLB tetap.

Pada tahun ajaran 2010/2011 terjadi penambahan jumlah guru hampir di semua jenjang pendidikan, hanya jenjang SLTP yang mengalami penurunan. Jumlah guru TK bertambah menjadi 2.795 dari 2.747. Jumlah guru SD bertambah

dari 9.596 menjadi 9.994 pengajar. Guru SLTP berkurang dari 4.910 menjadi 4.831, pengajar. Guru SLTA bertambah dari 2.561 menjadi 2.665 pengajar. Penambahan jumlah guru dari jenjang SD hingga SLTA ini merupakan bagian dari program Wajib Belajar (Wajar) 9 tahun yang dicanangkan pemerintah.

Di level kabupaten, secara umum penambahan jumlah guru ternyata tidak menambah Rasio Murid terhadap Guru (RMG). Di semua jenjang terjadi penurunan Rasio Murid terhadap Guru. Angka RMG ini sangat berguna untuk mengetahui tingkat efektifitas Kegiatan Belajar Mengajar yang ditinjau dari beban guru, sekaligus sebagai bahan kajian dalam pendistribusian tenaga pengajar agar terjadi keseimbangan di setiap jenjang pendidikan dan wilayah/sekolah.

b) Kesehatan Dan Keluarga Berencana

Pada periode tahun 2006-2010, data dari Dinas Kesehatan menunjukkan bahwa telah terjadi fluktuasi jumlah tenaga kesehatan dan jumlah kunjungan pasien yang sangat signifikan. Jumlah tenaga kesehatan meningkat 28 orang dari 836 orang pada tahun 2009 menjadi 864 orang pada tahun 2010. Kenaikan terjadi pada jumlah Perawat (dari 165 menjadi 224 orang), Dokter Umum (dari 60 menjadi 65 orang), Dokter Gigi (dari 31 menjadi 38 orang), dan Paramedis Lain (dari 64 menjadi 98 orang), Nutisionis (naik dari 31 menjadi 37 orang), Sanitarian (dari 35 menjadi 48 orang). Penurunan justru terjadi pada tenaga kesehatan Bidan (dari 424 menjadi 354 orang). Sebagai catatan, data-data tersebut belum termasuk yang berada di bawah koordinasi RSUD pare.

Sementara itu jumlah kunjungan pasien ke Puskesmas juga mengalami kenaikan, yakni dari 924.285 orang pada tahun 2009 naik menjadi 1.181.944

orang pada tahun 2010. Untuk kunjungan ke Rumah Sakit meningkat dari 126.198 orang di tahun 2009 menjadi 130.412 orang di tahun 2010. Kunjungan pasien ke dua fasilitas kesehatan, yaitu Puskesmas dan Rumah Sakit mengalami kenaikan dari 1.050.483 orang pada tahun 2009 menjadi 1.312.356 orang pada tahun 2010.

Tahun 2010, jumlah kunjungan ibu hamil mengalami penurunan, namun kunjungan bayi mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kunjungan ibu hamil turun 7,1 % menjadi 27.427. Kunjungan bayi meningkat 3,23 % menjadi 25.465. Kedua angka tersebut mengatakan bahwa jumlah ibu hamil terjadi penurunan tetapi kesadaran untuk menjaga kesehatan bayi semakin baik. Berkurangnya jumlah ibu hamil ditandai dengan meningkatnya jumlah akseptor KB lestari pada tahun 2010. Tahun 2009, persentase akseptor KB lestari mencapai 73,69 % dari PUS, sedangkan tahun 2010 meningkat menjadi 74,87 %. Dalam kurun waktu 2006-2010, persentase akseptor KB lestari tertinggi terjadi pada tahun 2006, yakni 78,51 %. Bila dilihat dari metode ber-KB, tahun 2010 terbanyak menggunakan KB suntik yang mencapai 51,58 % dari total akseptor KB lestari, sedangkan yang paling jarang digunakan adalah metode kondom, hanya ada 0,65 % pengguna.

c) Sosial Lainnya

Permasalahan sosial yang cukup menghambat kemajuan adalah permasalahan yang terkait dengan kesejahteraan akan tetapi di tahun 2010 mengalami fluktuasi yang signifikan. Permasalahan kesejahteraan sosial yang menonjol adalah permasalahan kemiskinan. Jumlah Keluarga Miskin (Gakin) yang dicatat Dinas Kesos pada tahun 2010 ada 44.895 KK. Jumlah tersebut meningkat cukup

signifikan dibanding tahun 2007-2009 yang berturut-turut 28.672, 28.313 dan 39.671 KK. Akhir-akhir ini, kemiskinan menjadi isu hangat untuk didiskusikan dan dicarikan solusinya. Apalagi jumlah penduduk miskin menjadi indikator keseriusan suatu daerah dalam pembangunan daerah. Jumlah penduduk miskin yang terus meningkat menjadi preseden buruk bagi kemajuan suatu daerah sekaligus raport merah bagi para penyelenggara pemerintahan daerah.

e. Keuangan Daerah

Pada tahun 2010, Pemkab Kediri berhasil membukukan realisasi pendapatan menembus angka 1 triliun rupiah, tepatnya sebesar 1.155,66 milyar rupiah, atau naik 16,88 % dari tahun sebelumnya. Namun demikian, peningkatan ini perlu mendapat perhatian karena ternyata kontribusi PAD tahun 2010 menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2009 kontribusi PAD mencapai 7,87 %, sedangkan tahun 2010 menjadi 6,23%. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Pendapatan Daerah terdiri dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain. PAD mencerminkan efektifitas daerah dalam menghasilkan pendapatan dari setiap kebijakan dan kreatifitas kegiatan ekonominya. Daerah yang mengandalkan Dana Perimbangan sebagai sumber pendapatan, maka dapat dipastikan akan menjadi daerah yang lamban dalam pembangunan.

Peningkatan pendapatan juga diikuti oleh peningkatan belanja daerah (pengeluaran). Bahkan persentase peningkatan belanja jauh diatas peningkatan pendapatan, sehingga dalam kurun waktu tiga tahun (2007-2009), Pemkab Kediri terus mengalami defisit. Ketika tiga tahun (2007-2009) berturut-turut mengalami defisit, tahun 2010 Pemkab Kediri membukukan prestasi dengan surplus hampir

56,5 milyar rupiah. Sama seperti tahun 2009, nilai belanja tahun 2010 menembus angka 1 triliun rupiah atau tepatnya 1,099 triliun rupiah. Namun sayang, belanja atau pengeluaran yang dilakukan masih didominasi oleh belanja tidak langsung khususnya belanja pegawai yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2009 belanja pegawai mencapai 53 % lebih, sedangkan tahun 2010 meningkat menjadi 61,67 %. Proporsi Belanja Modal dalam kurun waktu 2007-2010 mengalami fluktuatif, dengan kisaran antara 13-23 persen. Dan tahun 2010 menjadi yang terendah dengan Belanja Modal sebesar 13,45 %.

f. Konsumsi Penduduk Perkapita

Ketika beberapa tahun yang lalu negara kita tidak lagi swasembada pangan, maka semenjak itu pemerintah terus mencanangkan peningkatan ketahanan pangan menuju swasembada pangan. Ketahanan pangan menjadi kunci kesuksesan pembangunan, karena kerawanan pangan dapat berimplikasi pada segala lini kehidupan. Data ini mencerminkan ketersediaan bahan makanan untuk konsumsi penduduk (per kapita) selama setahun.

Dalam kurun waktu 2005-2010, ketersediaan pangan Kabupaten Kediri menunjukkan trend penurunan. Kondisi tersebut bila tidak segera diambil langkah antisipatif oleh para stakeholder, tidak mustahil 10 hingga 20 tahun kedepan, Kabupaten Kediri menjadi daerah rawan pangan. Suatu kondisi yang sangat tidak kita harapkan.

g. Neraca Regional

a) Pertumbuhan Ekonomi

Setiap daerah dalam melaksanakan pembangunan ekonomi senantiasa bertujuan demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Terlebih di era reformasi saat ini, dimana setiap daerah berlomba memamerkan buah karya pembangunannya dengan harapan semakin dilirik oleh Pemerintah Pusat dan dunia swasta, yang pada akhirnya akan memperbesar pundi-pundi kas daerah. Selama semuanya berjalan normal dan sesuai legal formal yang berlaku di negeri ini, maka segala kompetisi akan berujung pada kebaikan.

Salah satu indikator keberlangsungan pembangunan ekonomi suatu daerah adalah laju Pertumbuhan Ekonomi. Statistik Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu derivatif dari statistik Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Bila kita melakukan data plotting terhadap angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kediri, maka akan kita dapati trend yang terus meningkat. Walau terus menunjukkan angka peningkatan, namun laju percepatan pembangunan tiap tahun selalu fluktuatif dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kediri tidak pernah melampaui pertumbuhan ekonomi provinsi apalagi nasional. Ini disebabkan karena *share* sektor primer yang cukup dominan. Tapi tidak dengan tahun 2010, pertumbuhan tahun tersebut mencapai 6,04%, sangat berakselerasi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

b) Peranan Sektoral

Dengan melihat PDRB menurut lapangan usaha atau sektoral, kita dapat mendapatkan informasi struktur ekonomi suatu daerah. Secara umum, struktur

ekonomi Kabupaten Kediri masih di dominasi sektor primer (pertanian) lalu sektor sekunder (PHR dan Industri). Peranan sektor Pertanian dari tahun ke tahun memperlihatkan trend mengecil, namun tetap berkisar 35-40 %. Sektor PHR memberikan kontribusi berkisar 20-25 % dan sektor industri berkisar 15-17 %.

Tiga sektor yang memiliki kontribusi dibawah tiga persen adalah sektor LGA, Konstruksi, dan Penggalian. Sektor Konstruksi yang memiliki laju pertumbuhan tertinggi, namun hanya mampu memberikan kontribusi sebesar 1,05 %. Sedangkan sektor PHR dengan laju pertumbuhan tertinggi kedua, memberikan share 25,24 %.

2. Visi dan Misi Kabupaten Kediri

a. Visi

Ini adalah harapan masa depan yang ingin diwujudkan oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kediri sebagaimana secara eksplisit tercantum dalam visinya sebagai berikut:

“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Kediri yang Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Cerdas, Sehat, Mandiri, Tenteram dan Sejahtera, Yang Berbasis Pada Lima Sektor Utama Pembangunan, yaitu Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Industri Perdagangan dan Pariwisata, yang didukung oleh penyelenggaraan pemerintahan yang profesional”.

Terkandung makna penting dalam visi untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Kediri yang cerdas adalah kesadaran sekaligus komitmen kuat pemerintah akan arti pentingnya pendidikan sebagai pilar dasar bagi pembangunan pelaksanaan pembangunan sektor yang lainnya. Bukan hanya itu, melalui visinya itu Kabupaten Kediri memiliki komitmen yang tinggi akan arti

pentingnya pendidikan sebagai modal manusia (*human capital*) yang akan menentukan masa depan masyarakat Kabupaten Kediri dimasa yang akan datang.

Melalui visinya itu pula, pemerintah Kabupaten Kediri sadar bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas itu tidak akan memiliki banyak arti jika tidak dibarengi dengan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatannya dan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Karenanya, rumusan visi itu menjadi sangat pas dengan upaya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sekaligus juga merupakan tekad yang ingin diwujudkan oleh pemerintah provinsi Jawa Timur.

Tidak sampai di situ, melalui visinya itu pula pemerintah kabupaten Kediri sadar bahwa apalah artinya masyarakat yang cerdas, sehat, mandiri, tenteram juga sejahtera secara materi jika tidak dibarengi dengan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu sebabnya, cita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang religius adalah harapan yang menjadi greget lain yang secara eksplisit tercantum dalam visi kabupaten Kediri.

b. Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Kediri tahun 2011 – 2015 sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebagai wujud peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang maha Esa.

- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan serta terwujudnya keluarga sehat.
- 3) Menumbuh-kembangkan aktivitas pendidikan formal, non-formal dan informal untuk meningkatkan sumber daya generasi muda sebagai upaya mencapai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 4) Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pola hidup sehat sebagai langkah nyata menuju keluarga sejahtera.
- 5) Membangun kehidupan masyarakat yang tertata, taat hukum dan peraturan perundangan, saling menghargai satu sama lain sebagai dasar pemahaman atas hak asasi manusia, gotong-royong, dan toleran, dalam rangka menciptakan suasana aman, tertib dan damai di masyarakat.
- 6) Mengembangkan industri dan perdagangan berbasis pertanian yang berorientasi pada mekanisme pasar bersama Koperasi dan UKM.
- 7) Menggalakkan promosi di sektor pariwisata, produk-produk *home-industry*, pertanian, perkebunan, perikanan di tingkat regional, nasional dan global.
- 8) Menciptakan suasana kondusif sehingga membuat kehidupan masyarakat menjadi tenteram.
- 9) Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, berwibawa, bebas KKN, transparan, akuntabel, responsif terhadap permasalahan masyarakat sebagai upaya meningkatkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Itulah sembilan misi yang menjadi arah sekaligus acuan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kediri saat ini dan ke depan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pemabngunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang secara formal telah disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006. Berdasarkan visi dan misi itulah pula pelaksanaan pembangunan seluruh sektor, termasuk sektor pendidikan di Kabupaten Kediri dilakukan.

3. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kediri

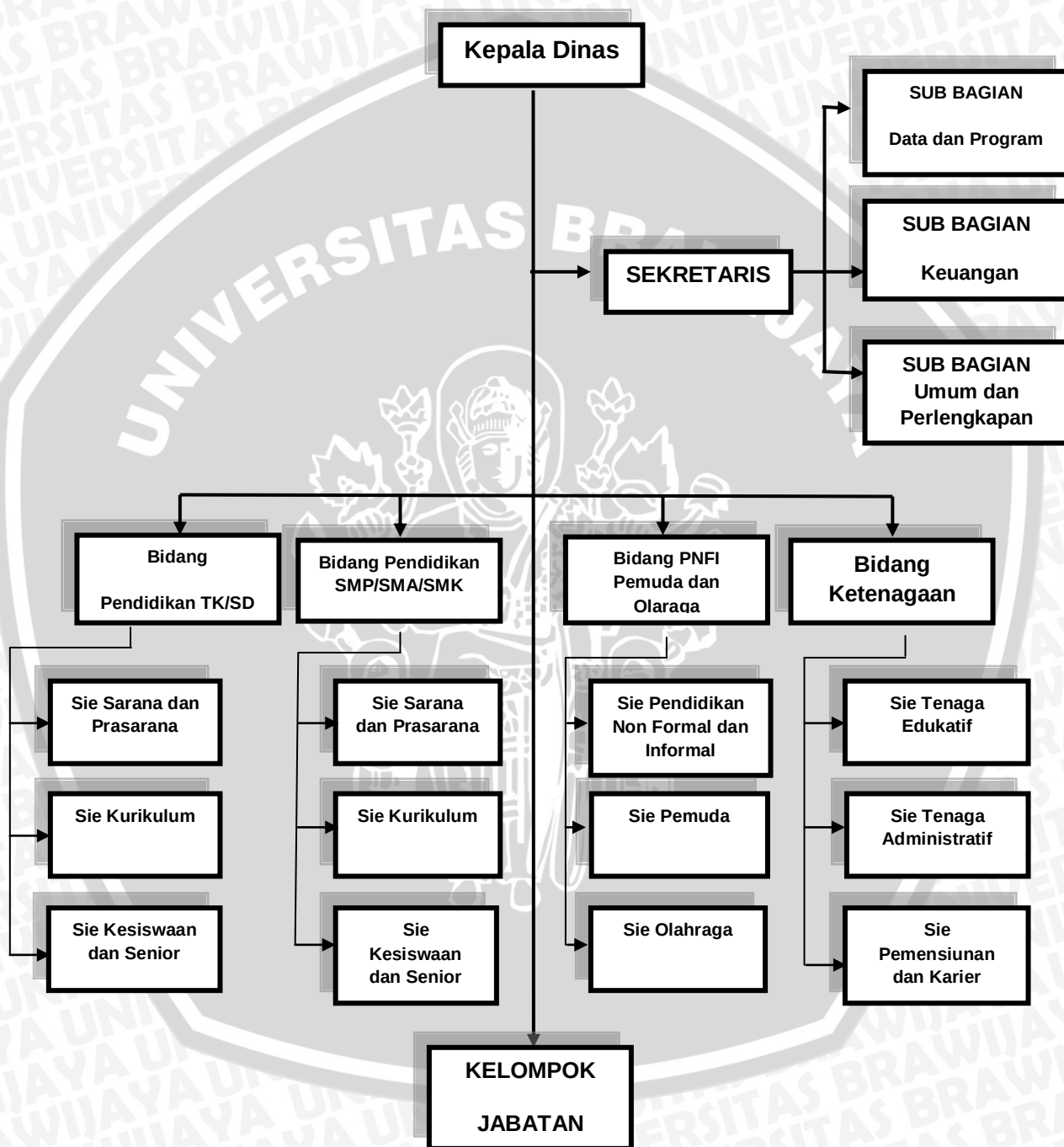
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 38 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kediri melaksanakan otonomi daerah di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga.

a. Struktur Organisasi

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kediri dipimpin oleh seorang kepala dinas dengan dibantu oleh seorang Sekretaris, empat kepala bidang, tiga kepala sub bagian, dua belas kepala seksi dan kelompok pejabat fungsional seperti dapat dilihat pada Bagan1.

Struktur organisasi tersebut telah sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kediri sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Bagan 1. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kediri



Sumber: Arsip Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kediri.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 38 Tahun 2008, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kediri mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kediri menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Gambaran Umum Pendidikan di Kabupaten Kediri

a. Perkembangan Penduduk Usia Sekolah, Siswa, dan Fasilitas Pendidikan

Melalui berbagai upaya intensif dalam perencanaan dan pelaksanaan serta pengendalian program-program pembangunan pendidikan yang didukung dengan semakin harmonisnya koordinasi antar sektor serta *stakeholders*, maka telah dapat diwujudkan peningkatan keberhasilan pembangunan pendidikan, khususnya

dalam aspek perluasan pemerataan kesempatan belajar pada jenjang pra sekolah, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang ditandai dengan peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada setiap jenis dan jenjang pendidikan.

Keberhasilan tersebut dapat dipergunakan sebagai pijakan untuk menyusun perencanaan program dan proyeksi pembangunan pendidikan pada masa yang akan datang. Namun demikian, keberhasilan berdasarkan peningkatan APK harus terus dikaji dan dievaluasi sebelum ditetapkan sebagai dasar penyusunan proyeksi karena pada dasarnya tinggi rendahnya APK ditentukan juga oleh perkembangan jumlah penduduk.

Pada tahun 2006-2009, di Kabupaten Kediri ada kecenderungan penurunan penduduk usia sekolah, maka dalam penyusunan *renstra* perlu ditemukan dan dikembangkan alternatif program yang efisien dalam rangka menghindari atau mencegah adanya fasilitas pendidikan yang dibangun sekarang atau lima tahun yang akan datang kemudian menjadi fasilitas yang “idle” meskipun Angka Partisipasi Murni (APM) dan APK-nya meningkat.

a) Perkembangan Penduduk Usia 5-6 Tahun dan Perkembangan TK dan SLB

Sebagaimana disajikan pada Tabel 1, selama empat tahun terakhir jumlah peserta didik Taman Kanak-kanak sebanyak 32.309 siswa pada tahun 2006/2007 meningkat menjadi 35.625 siswa pada tahun 2009/2010. Sementara jumlah penduduk usia 5-6 tahun relatif tetap dan ada kecenderungan menurun, yaitu 37.629 orang pada 2006 menjadi 34.093 orang pada tahun 2009. Hal ini berpengaruh pada peningkatan jumlah APK-nya yang cukup pesat, yaitu mencapai rata-rata

peningkatan sebesar 5,26% per tahun. Sementara jumlah lembaga, ruang kelas, dan guru TK/RA relatif tetap dan ada kecenderungan fluktuatif. Namun rasio guru dan siswa, rasio ruang kelas dan siswa, rasio lembaga dan siswa akibat kecenderungan ini masih dalam batas toleransi.

Pendidikan luar biasa sebagai salah satu bentuk pelayanan pendidikan berkebutuhan khusus, perkembangannya di samping dipengaruhi oleh animo dan kesadaran siswa maupun orang tua, namun lebih khusus dipengaruhi oleh kondisi khusus pula, seperti tidak semua desa dalam satu kecamatan ditemukan anak yang mengalami atau menderita kecacatan baik fisik maupun mental. Animo masyarakat terhadap kebutuhan akan pendidikan berkebutuhan khusus, terutama pendidikan luar biasa dapat dikatakan masih sangat rendah, bahkan cenderung menolak. Artinya bahwa mereka tidak bisa menerima (tidak ikhlas) bila anaknya masuk dalam pendidikan luar biasa, mereka lebih memilih mendidik anak-anak mereka pada pendidikan formal reguler, meskipun dengan resiko mengalami keterlambatan yang cukup berarti dalam menyelesaikan studinya. Dalam kasus tertentu masih diketemukan beberapa sekolah (SD) peserta didiknya mengalami keterlambatan mental, yang semestinya dengan latar belakang seperti ini merupakan peserta didik pada lembaga pendidikan berkebutuhan khusus, yaitu pendidikan luar biasa.

Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, seperti nampak pada tabel 1, terjadi fluktuasi peserta didik yang cukup tajam, kecuali pada tahun 2006 dan 2007. Sementara itu jumlah lembaga dan jumlah guru relatif tidak mengalami perubahan, sedang jumlah kelas mengalami penurunan yang cukup tajam di tahun

2009, bila dibanding tahun sebelumnya. Gambaran ini menunjukkan betapa dinamisnya perkembangan pendidikan luar biasa, yang tentunya sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut di atas.

Tabel 1.
Perkembangan Penduduk, Siswa, Guru, Sekolah, Rombongan Belajar,
Angka Partisipasi Kasar Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Luar Biasa
Tahun 2006/2007 s.d. 2009/2010

No	Komponen	Satuan	06/07	07/08	08/09	09/10
1	TK					
	1. Pduduk 5-6Th	Orang	37.629	37.225	37.225	34.093
	2. Siswa	Orang	32.946	35.018	35.625	36.472
	3. Guru	Orang	1.485	1.528	1.562	1.924
	4. Sekolah	Lbg	641	675	677	677
	5. Rombongan Belajar	Rombel	1.855	1.564	1.571	1.795
	6. APK TK	%	88,50	94,07	95,70	95,70
2	PLB					
	1. Penduduk 5-6 Th		37.629	37.225	37.225	34.093
	2. Pduduk 7-18 Th	Orang	299.587	304.204	301.165	297.369
	3. Siswa	Orang	388	294	330	430
	4. Guru	Orang	88	88	89	88
	5. Sekolah	Lemb	17	18	18	20
	6. Kelas	Ruang	120	116	109	55
	7. APK	%				

Sumber: Data Pokok Pendidikan Kab. Kediri 2006/2007-2009/2010

b) Perkembangan Penduduk Usia 7-12 Tahun dan Perkembangan SD/MI

Perkembangan jumlah penduduk usia SD/MI, yaitu usia 7-12 tahun, cenderung mengalami kenaikan selama kurun waktu tahun 2006-2009, dengan trend pertumbuhan yang semakin mengecil, dan terakhir mengalami penurunan pada tahun 2009. Kondisi seperti ini memberikan gambaran laju pertumbuhan penduduk yang relatif stabil pada tahun-tahun selanjutnya. Bila jumlah penduduk usia SD/MI dikaitkan dengan daya serap pendidikan SD/MI maka diperoleh angka

indikator pendidikan berupa Angka Partisipasi Kasar (APK) yang menurun dalam kurun waktu 2007-2009. Namun demikian kondisi ini diikuti dengan kenaikan prosentase APM pada tahun-tahun yang sama, dan terakhir 99,26% di tahun 2009/2010. Hal ini memberikan gambaran bahwa kinerja perluasan akses pendidikan jenjang SD/MI bagi penduduk usia 7-12 tahun mengalami pergeseran dari kuantitas daya serap pendidikan SD/MI (yang ditunjukkan dengan menurunnya indikator APK SD/MI) menuju pada kualitas daya serap pendidikan SD/MI (yang ditunjukkan dengan naiknya indikator APM SD/MI).

Begitu pula dengan jumlah lembaga, ruang kelas, dan guru SD/MI mengalami kenaikan, meskipun tidak terlalu besar, bahkan ada penurunan jumlah guru pada tahun 2009/2010. Hal yang menarik terkait dengan perkembangan lembaga baru, nampaknya peran lembaga pendidikan swasta memberikan kontribusi yang cukup signifikan.

Jika dibandingkan antara kondisi SD dengan MI, maka terdapat perbedaan yaitu jumlah siswa SD dibanding MI berkisar 5 berbanding 1, sedangkan jumlah guru berkisar 3-4 berbanding 1, perbandingan jumlah lembaga berkisar 3 berbanding 1, sedangkan jumlah ruang kelasnya berkisar 3-4 berbanding 1. Hal ini memberikan gambaran bahwa nampaknya animo masyarakat terhadap pendidikan SD masih lebih tinggi bila dibanding terhadap pendidikan MI.

Perkembangan jumlah siswa pada jenjang pendidikan SD/MI, perubahan APM dan APK SD/MI, perkembangan tenaga guru dan lain-lain, juga perubahan jumlah penduduk usia sekolah 7-12 tahun dalam kurun waktu tahun 2006/2007-2009/2010 nampak sebagaimana data pada Tabel 2.

Tabel 2.
Perkembangan Penduduk, Siswa, Guru, Sekolah, Ruang Kelas
Dan Angka Partisipasi Kasar SD dan MI
Tahun 2006/2007 s.d. 2009/2010

No	Komponen	Satuan	06/07	07/08	08/09	09/10
1	Penduduk 7-12 tahun	Orang	145.901	146.801	146.921	133.555
2	Siswa Baru Tingkat I	Orang	23.742	23.742	25.552	22.607
	a. SD	Orang	19.681	19.681	21.421	18.329
	b. MI	Orang	4.061	4.061	4.131	4.278
3	Siswa	Orang	153.055	151.393	150.968	147.403
	a. SD	Orang	126.928	125.985	125.573	124.101
	b. MI	Orang	26.127	25.408	25.393	23.302
4	Siswa Usia 7-12 Thn	Orang				
	a. Tingkat SD/MI	Orang	134.855	138.672	141.788	132.572
	b. SLTP/MTs	Orang	-	-	-	-
	c. Tingkat SLB	Orang	-	-	-	-
5	Lulusan	Orang	21.936	21.936	23.778	22.912
	a. SD	Orang	18.305	18.305	20.127	19.437
	b. MI	Orang	3.631	3.631	3.651	3.475
6	Guru	Orang	8.399	8.399	9.322	8.317
	a. SD	Orang	6.506	6.506	7.341	7.051
	b. MI	Orang	1.893	1.893	1.981	1.266
7	Sekolah	Lemb	869	869	873	874
	a. SD	Lemb	649	649	654	654
	b. MI	Lemb	220	220	219	220
8	Ruang Kelas	R. Kelas	5.993	5.986	6.199	5.756
	a. SD	R. Kelas	4.687	4.708	4.933	4.555
	b. MI	R. Kelas	1.306	1.278	1.266	1.201
9	APK SD/MI	%	104,93	103,16	102,78	110,37
10	APM SD/MI	%	92,43	94,46	96,51	99,26
11	APS 7-12 th	%	0,16	0,07	0,07	0,44

Sumber: Profil Pendidikan tahun 2006/2007-2009/2010

c) Perkembangan Penduduk Usia 13-15 Tahun dan Perkembangan SMP/MTs

Pada jenjang pendidikan SMP/MTs, sebagaimana disajikan pada Tabel 3, selama kurun waktu tahun 2006/2007 s.d 2009/2010 nampak sebagai berikut, jumlah penduduk usia 13-15 tahun pada tahun 2006 hingga 2009 mengalami fluktuasi, sementara jumlah siswa SMP/MTs cenderung mengalami kenaikan.

Meskipun terjadi kondisi yang berfluktuasi pada sebagian besar aspek, tetapi ternyata baik APK maupun APM-nya konstan meningkat terus dalam kurun waktu tersebut, yang berarti bahwa penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun tidak terhambat. Aspek yang juga konstan meningkat dalam kurun waktu tersebut adalah jumlah guru.

Jumlah Lembaga SMP/MTs secara keseluruhan mengalami kenaikan pada tahun 2007, selanjutnya tetap. Keadaan tersebut, paralel jika dibandingkan dengan jumlah siswanya secara keseluruhan yang terus mengalami kenaikan, dan menurun pada tahun 2008.

Tabel 3.
Perkembangan Penduduk Usia 13-15 Tahun , Siswa, Guru, Sekolah,
Ruang Kelas dan Angka Partisipasi Kasar SLTP/MTs
Tahun 2006/2007 -2009/2010

No	Komponen	Satuan	06/07	07/08	08/09	09/10
1	Penduduk 13-15Th	Orang	76.270	78.723	75.084	71.088
2	Lulusan SD/MI	Orang	23.694	21.936	21.936	22.912
	a. SD	Orang	20.063	18.305	18.305	19.437
	b. MI	Orang	3.631	3.631	3.631	3.475
3	Siswa Baru	Orang	20.684	20.630	20.680	22.173
	a. SMP	Orang	14.750	14.445	14.445	15.654
	b. MTs	Orang	5.934	6.185	6.235	6.519
4	Siswa	Orang	59.470	61.779	61.246	64.997
	a. SMP	Orang	42.383	42.835	43.323	45.856
	b. MTs	Orang	17.087	18.944	17.923	19.141
5	Siswa 13-15 Th	Orang				
	a. Tk. SMP/MTs	Orang	46.278	47.568	47.123	52.881
	b. Tk. SD/MI	Orang	-	-	-	-
	c. SM/SMK/MA	Orang	-	-	-	-
	d. SLB	Orang	-	-	-	-
6	Lulusan	Orang	18.731	17.680	17.680	16.249
	a. SMP	Orang	13.514	12.515	12.515	11.532
	b.MTs	Orang	5.217	5.165	5.165	4.717
7	Guru	Orang	4.557	4.649	4.649	4.755
	a. SMP	Orang	2.794	2.924	2.924	2.934
	b. MTs	Orang	1.763	1.725	1.725	1.821
8	Sekolah	Orang	192	192	192	191

	a. SMP	Orang	99	99	99	97
	b. MTs	Orang	93	93	93	94
9	Ruang Kelas	Orang	1.523	1.607	1.528	1.781
	a. SMP	Kelas	1.028	1.072	1.038	1.221
	b. MTs	Kelas	495	535	490	560
10	APK SMP/MTs	%	77,97	81,84	83,67	90,40
11	APM SMP/MTs	%	61,51	62,58	65,14	75,58
12	APS 13-15Th	%	1,21	1,07	1,07	1,07

Sumber: Data Profil Pendidikan tahun 2006/2007-2009/2010

a) Perkembangan Penduduk Usia 16-18 Tahun dan Perkembangan SMA/MA/SMK

Pada kurun waktu tahun 2006 s.d 2009, jumlah penduduk usia 16-18 tahun cenderung mengalami penurunan terus. Sedangkan jumlah siswa SMA, MA dan SMK usia 16-18 tahun mengalami fluktuasi. Begitu pula dengan jumlah lembaganya. Kondisi ini menggambarkan labilnya animo masyarakat terhadap pendidikan menengah, terutama MA dan SMK.

Tabel 4.
Perkembangan Penduduk Usia 16-18 Tahun, Siswa, Guru, Sekolah, Ruang Kelas, dan Angka Partisipasi Kasar SMA, SMK, dan MA Tahun 2006/2007-2009/2010

No	Komponen	Satuan	06/07	07/08	08/09	09/10
1	Penduduk 16-18 tahun	Orang	90.704	87.064	79.580	76.655
2	Lulusan Tk. SLTP	Orang	19.180	18.731	17.680	16.249
	a. SMP	Orang	13.818	13.514	12.515	11.532
	b. MTs	Orang	5.362	5.217	5.165	4.717
3	Siswa Baru Tingkat I	Orang	8.186	8.455	8.843	9.618
	a. SMA	Orang	3.526	3.988	4.286	4.007
	b. SMK	Orang	2.838	2.688	2.728	3.746
	c. MA	Orang	1.822	1.779	1.829	1.865
4	Siswa	Orang	23.918	23.665	23.480	26.627
	a. SMA	Orang	10.414	10.753	11.241	11.461
	b. SMK	Orang	8.383	7.987	7.135	9.283
	c. MA	Orang	5.121	4.925	5.104	5.883
5	Siswa Usia 16-18 tahun	Orang	18.018	18.213	16.845	19.849
6	Lulusan	Orang	7.405	7.447	6.899	7.148

	a. SMA	Orang	3.091	3.140	3.267	3.415
	b. SMK	Orang	2.857	2.815	2.379	2.139
	c. MA	Orang	1.457	1.492	1.253	1.594
7	Guru	Orang	1.912	2.244	1.968	2.569
	a. SMA	Orang	781	892	864	972
	b. SMK	Orang	600	747	568	737
	c. MA	Orang	531	605	536	860
8	Sekolahan	Lembaga	89	90	87	93
	a. SMA	Lembaga	27	27	27	28
	b. SMK	Lembaga	31	31	29	30
	c. MA	Lembaga	31	32	31	35
9	Ruang Kelas	R.Kelas	611	669	643	805
	a. SMA	R.Kelas	259	270	289	315
	b. SMK	R.Kelas	193	231	194	216
	c. MA	R.Kelas	159	168	160	274
10	APK SM	%	26,37	27,18	30,23	36,72
11	APM SM	%	20,93	20,92	21,72	25,92
12	APS 16-18 Th.	%	2,26	1,41	1,40	
13	Angka Melanjutkan ke SMA	%	42,68	44,81	50,02	56,54

Namun demikian terjadi peningkatan yang konstan pada APK sekolah menengah sementara APM sempat mengalami penurunan, dan kemudian mengalami kenaikan lagi hingga terakhir 2009/2010.

b. Pemerataan Pendidikan

Berdasarkan APK yang dicapai sebagaimana disajikan pada Tabel 5, ternyata APK tertinggi terdapat di tingkat SD dan MI yaitu 110,37% dan yang terendah di tingkat SM yaitu 36,72%.

Tabel 5.
Indikator Pemerataan Pendidikan Dasar dan Menengah
Tahun 2009/2010

No	Indikator	SD+MI	SMP+MTs	SM+MA	Lainnya
1.	APK	110,37	90,40	36,72	
2.	APM	99,26	75,58	25,92	
3.	Rasio				
	- Siswa/sekolah	173	328	276	
	- Siswa/Kelas	24	38	36	

	- Siswa/Guru	16	12	10	
	- Kelas/R.Kelas	1,01	0,97	0,97	
	- Kelas/Guru	0,71	1,00	0,34	
4.	Angka Melanjutkan		93,42	56,54	
5.	Kepadatan penduduk	105	56	57	

Sumber: Rekap Kuesioner Pendidikan Tahun 2009/2010

APM tertinggi terdapat di tingkat SD/MI. Berdasarkan APM dapat diketahui pula bahwa pada tingkat SD dan MI anak usia sekolah SD yang bersekolah lebih banyak dibandingkan dengan tingkat lainnya. Hal itu juga menunjukkan kinerja yang paling baik terdapat di tingkat SD dan MI.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada jenjang SD tingkat keberhasilannya dalam pelaksanaan program pemerataan dan perluasan akses lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian pada jenjang SMP/MTs maupun jenjang SMA/MA/SMK.

Indikator lainnya rasio siswa per sekolah, siswa per kelas, siswa per guru, kelas per ruang kelas dan kelas per guru. Rasio siswa per sekolah terpadat ada di tingkat SMP yaitu 328 siswa/sekolah dan terjarang terdapat di tingkat SD dengan angka 173 siswa/sekolah.

Siswa per kelas yang pada saat pembangunan sekolah seharusnya diisi dengan 40 anak, meskipun idealnya adalah 32 siswa/kelas, ternyata pada kenyataanya juga sangat bervariasi. Rasio siswa per kelas terpadat terdapat di tingkat SMP + MTs yaitu 38 dan terjarang terdapat di tingkat SD + MI yaitu 24.

Rasio siswa per guru juga bervariasi dengan rasio terbesar terdapat pada tingkat SD + MI yaitu 16 dan terendah terdapat pada SMA,MA dan SMK yaitu 10. Besarnya rasio siswa per guru ini menunjukkan kurangnya guru di tingkat

tersebut. Sebaliknya, rasio terkecil menunjukkan cukupnya guru di tingkat tersebut.

Ruang kelas yang paling sering digunakan adalah pada tingkat SMA/MA yaitu sebesar 0,97. Hal itu berarti bahwa pada tingkat tersebut masih memerlukan ruang kelas tambahan jika diharapkan jumlah kelas/rombel sama dengan jumlah ruang kelas sehingga tidak ada ruang kelas yang digunakan lebih dari sekali.

Angka melanjutkan dari lulus SD ke tingkat SMP cukup tinggi yaitu 93,42. Hal ini memberikan gambaran bahwa animo masyarakat (lulus SD) untuk melanjutkan ke tingkat SMP cukup tinggi. Diharapkan apabila jumlah SMP ditingkatkan maka angka melanjutkan juga akan meningkat. Sebaliknya, angka melanjutkan ke tingkat sekolah menengah (SM) lebih kecil yaitu 56,54.

Salah satu faktor yang diyakini sebagai penyebab rendahnya angka melanjutkan ke SM (SMA/MA/SMK) adalah karena jumlah SM yang jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah SMP/MTs (daya tampungnya lebih rendah dari pada lulusan SMP/MTs). Faktor lain yang juga diyakini sangat dominan mempengaruhi angka melanjutkan lulusan SMP/MTs ke SMA/MA/SMK adalah karena pada umumnya SMA/SMK berada di perkotaan sehingga menjadi kendala bagi lulusan SMP yang tinggal di daerah pedesaan, juga karena biayanya yang relatif lebih tinggi, sebagai akibat dari relatif lebih tingginya biaya investasi maupun biaya operasional pembelajaran, utamanya untuk praktek mata pelajaran produktif. Perbedaan pencapaian di tingkat SD, SMP dan SM juga karena akibat perbedaan kepadatan penduduk usia sekolah, kepadatan terbesar terdapat di tingkat SD + MI dan terkecil terdapat di tingkat SMP + MTs.

Berdasarkan pencapaian indikator pada Tabel 5 dan serta berdasarkan pencapaian setiap indikator untuk setiap jenjang pendidikan, maka dapat dikatakan bahwa tingkat SD/MI mempunyai kinerja yang lebih unggul dibandingkan dengan tingkat SMP/MTs maupun tingkat SM. Kinerja yang lebih unggul ini diambil dari banyaknya nilai yang lebih tinggi pada masing-masing tingkat.

c. Peningkatan Mutu Pendidikan

Indikator mutu dapat dibedakan menjadi lima indikator yaitu: (1) mutu masukan, (2) mutu proses, (3) mutu SDM, (4) mutu fasilitas dan (5) biaya. Berdasarkan mutu masukan dapat diketahui bahwa pada 74% siswa baru tingkat I jenjang SD/MI adalah berasal dari tamatan TK atau sejenis pada tahun 2009/2010.

Berdasarkan indikator mutu proses yaitu angka mengulang, angka putus sekolah, dan angka lulusan, ternyata angka mengulang terbesar terdapat pada tingkat SD/MI yaitu sebesar 0,66% dan terendah terdapat pada tingkat SMP/MTs yaitu sebesar 0,15%. Selanjutnya angka putus sekolah terbesar terdapat pada tingkat SMA/MA/SMK yaitu sebesar 1,58% dan terendah terdapat pada tingkat SD/MI yaitu sebesar 0,44%.

Ditinjau dari angka lulusan ternyata angka tertinggi terdapat pada tingkat SD/MI yaitu sebesar 99,07% diikuti SMP/MTs yaitu sebesar 98,30% dan terendah terdapat pada tingkat SMA/MA/SMK yaitu sebesar 93,82%. Dengan melihat ketiga indikator mutu proses ini dapat dikatakan bahwa kinerja terbaik adalah pada tingkat SD/MI. Hal itu ditunjukkan dengan adanya angka mengulang relatif rendah dan putus sekolah cukup rendah serta angka lulusan yang cukup tinggi.

Bila dilihat dari mutu SDM (guru), maka prosentase guru yang layak mengajar terbesar adalah pada tingkat SMP/MTs yaitu 93,12% dan guru yang layak mengajar terendah adalah pada tingkat SD/MI yaitu 84,21%. Bila mutu guru dilihat pada kesesuaian ijazah guru dengan bidang studi yang diajarkan, dapat dikatakan bahwa semua guru memiliki kesesuaian mengajar bidang studi dengan ijazah yang dimiliki pada jenjang SMP/MTs dan SMA/MA/SMK.

Indikator berikutnya adalah tentang mutu prasarana dan sarana pendidikan. Ruang kelas dengan kondisi baik pada tingkat SMA/MA/SMK yaitu sebanyak 653 ruang atau sebesar 81,11%, jenjang SMP dan MTs sebanyak 1.383 ruang yang baik atau sebesar 77,65%. Sedangkan kondisi ruang kelas SD ada sebanyak 2.207 yang rusak berat/ringan dan sebanyak 534 ruang yang rusak berat/ringan pada MI. Banyaknya ruang kelas yang rusak berat/ringan ini menunjukkan mutu prasarana yang buruk dan berakibat secara tidak langsung pada mutu sekolah.

Tabel 6.
Indikator Mutu Pendidikan - Tahun 2009/2010

No	Indikator	SD + MI	SMP + Mts	SM + MA
1	Rata-rata NEM			
2	Angka Mengulang	0,66	0,15	0,25
3	Angka Putus Sekolah	0,44	1,07	1,58
4	Angka Lulusan	99,07	98,30	93,82
5	Angka Kelayakan Mengajar			
	a. Layak	84,21	93,12	93,00
	b. Tidak Layak	15,79	6,88	7,00
6	% Kesesuaian Guru Mengajar			
	a. PPKn		100	100
	b. Pend. Agama		100	100
	c. Bhs. Indonesia		100	100
	d. Bhs. Inggris		100	100
	e. Sejarah & Sejarah Budaya		100	100
	f. Pend. Jasmani		100	100
	g. Matematika		100	100
	h. IPA			100

	h.1. Fisika			100
	h.2. BioLogi			100
	h.3. Kimia			100
	i. IPS		100	100
	i.1 Ekonomi			100
	i.2 SosioLogi			100
	1.3 Geografi		100	100
	j. Seni & Kerajinan		100	100
	k. Muatan Lokal			100
	l. Tata Negara			100
	m. Antropolgi			100
	n. Pendidikan Seni			100
	o. Bahasa Asing			100
	p. B dan P			100
	q. Lain – Lain			
7.	%tase Kondisi Ruang Kelas			
	a. Baik	51,16	77,65	81,11
	b. Rusak Ringan	29,86	15,04	9,69
	c. Rusak Berat	18,98	7,31	9,20
8.	% tase Fasilitas Sekolah			
	a. Perpustakaan	79,72	93,34	31,03
	b. Lapangan OR	43,99	32,37	35,63
	c. UKS	79,95	37,39	26,44
	d. Laboratorium		29,62	25,29
	e. Ketrampilan			27,59
	f. Bimbingan Penyuluhan			43,68
	g. Serbaguna			14,94
	h. Bengkel/RuangPraktik			

Sumber: Rekapitulasi Koesioner Pendidikan Tahun 2009/2010

Indikator mutu prasarana lainnya adalah ketersediaan fasilitas sekolah yang ada. Jumlah sekolah yang memiliki perpustakaan terbesar ada pada tingkat SD/MI yaitu sebesar 79,72% dan terendah ada pada tingkat SMA/MA/SMK sebesar 31,03%. Demikian juga jumlah sekolah yang memiliki lapangan olahraga terbanyak terdapat pada tingkat SD/MI yaitu mencapai 43,99 % dan terendah ada pada tingkat SMP/MTs sebesar 32,37%. Fasilitas sekolah lainnya yaitu ruang UKS terbanyak terdapat pada tingkat SD/MI yaitu sebesar 79,95%. Dengan

demikian, bila setiap sekolah diharuskan memiliki ketiga fasilitas tersebut, maka tingkat SD/MI memiliki angka terbesar.

Berdasarkan indikator mutu yang terdapat pada Tabel 5 dan dengan melihat pencapaian setiap indikator untuk setiap jenjang pendidikan, maka dapat dikatakan bahwa tingkat SD/MI mempunyai kinerja yang lebih unggul. Hal ini diambil dari layaknya nilai yang lebih tinggi dalam hal mutu pada tingkat pendidikan tersebut.

d. Pendidikan Luar Biasa

Bentuk Satuan Pendidikan Luar Biasa terdiri atas Taman Kanak-kanak Luar biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB).

Program prioritas Pendidikan Luar biasa meliputi:

- 1) Penyelenggaraan Pendidikan Olahraga Adaptif bagi siswa PLB.
- 2) Penanganan anak Autis secara intensif.
- 3) Pengembangan uji coba Pendidikan terpadu/Inklusi dengan berbagai model.
- 4) Uji coba Program Percepatan Belajar (Akselerasi).
- 5) Pengembangan program rehabilitasi pada semua Jenis kelainan.

Jenis Sekolah Luar Biasa yang jumlah muridnya paling sedikit adalah Sekolah Tuna Ganda (G) sebanyak 3 orang, yang terbanyak adalah jenis Sekolah Tuna Grahita sedang (C1) sebanyak 174 orang dan yang tidak ada muridnya adalah tuna laras (E). Sedang mengenai jumlah gurunya sebanyak 82 orang dengan tugas yang tidak terstruktur artinya bahwa bisa jadi mereka mengajar pada

TKLB merangkap SDLB, SMPLB, SMALB, atau kombinasi antar jenjang pendidikan tersebut. Sehingga secara umum rasio guru per siswa cukup memadai, yaitu 1 berbanding 6, artinya bahwa setiap guru hanya mengajar antara 5 sampai 6 siswa saja.

Tabel 7.
Siswa, Sekolah, dan Guru Pendidikan Luar Biasa

Jenjang Pendidikan	Jml. Lem b	Jml. Guru	Murid / Jenis Ketunaan								Autisme	Juml. Murid
			A	B	C	C1	D	D1	E	G		
TKLB	5		1	14		15				1	3	34
SDLB	11		9	86	79	113	16	11		1	2	317
SMPLB	9		5	18	29	36	3	1		1	3	96
SMLB	8			23	6	10		1				40
Jumlah	33	82	15	141	114	174	19	13	0	3	8	487

Sumber Data : Rekap Kuesioner Pendidikan Tahun 2009/2010

Keterangan: A = Tuna Netra D = Tuna Daksa
 B = Tuna Rungu D1 = Tuna Daksa Sedang
 C = Tuna Grahita E = Tuna Laras
 C1 = Tuna Grahita Sedang G = Tuna Ganda

e. Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah

Selain melalui jalur pendidikan sekolah, pelayanan pendidikan diselenggarakan pula melalui jalur pendidikan luar sekolah. Penyelenggaraan pendidikan luar sekolah diarahkan pada peningkatan pengetahuan dasar dan keterampilan berwiraswasta/kewirausahaan sebagai bekal dalam bekerja dan berusaha. Program pendidikan Luar sekolah meliputi: (1) Pemberantasan Buta Aksara/Keaksaraan Fungsional; (2) Paket A setara SD; (3) Paket B setara SMP; (4) Paket C setara SMA; (5) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan (6) Pendidikan berkelanjutan dan pendidikan keluarga.

Kelompok Belajar merupakan satuan pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah, meliputi Kelompok Belajar (Kejar) Keaksaraan Fungsional (untuk buta aksara Latin, Angka Arab, buta Bahasa Indonesia, buta pendidikan dasar), Kejar Paket A setara SD (untuk putus sekolah SD), dan Kejar Paket B setara SMP (untuk putus sekolah SMP dan lulusan SD/MI yang tidak melanjutkan), sedangkan untuk jenis pendidikan kejuruannya, oleh pemerintah diselenggarakan dalam bentuk Kelompok Belajar Usaha (KBU) yang terdiri berbagai rumpun ketrampilan.

Satuan pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat/swasta adalah Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak (TPA), dan Lembaga Kursus. Dalam pada itu, khusus bagi anak yang berusia dibawah 5 tahun (Balita) diselenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang pelaksanaannya diintegrasikan dengan satuan-satuan pendidikan sekolah maupun luar sekolah serta program lintas sektoral yang relevan.

Program Pemberantasan Buta Aksara/Keaksaraan Fungsional adalah untuk menuntaskan tiga buta (buta aksara Latin dan Angka, Buta Bahasa Indonesia, dan buta pendidikan dasar). Tabel 8 Menunjukkan banyaknya penduduk buta huruf kelompok usia 15 tahun ke atas dan jenis kelamin. Dilihat dari jenis kelamin, maka nampak penduduk buta huruf penduduk laki-laki 2.655 orang lebih rendah dibanding buta huruf penduduk perempuan. Secara prosentase angka buta huruf laki-laki sebesar 13,60%, sementara angka buta huruf perempuan sebesar 86,40% dari total penyandang buta aksara usia 45-60 tahun.

Tabel 8.
Jumlah Penduduk Buta Huruf Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur
Kabupaten Kediri - Tahun 2009

Jumlah Buta Huruf	Pria	Wanita	Total
Usia 16-29 Tahun	0	0	0
Usia 30-44 Tahun	0	0	0
Usia 45-60 Tahun	496	3.151	3.647
Total Pria/Wanita	496	3.151	3.647

Sumber: Pendidikan Non Formal tahun 2009

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksudkan untuk mengoptimalkan perkembangan kapabilitas kecerdasan anak, tidak hanya sekedar untuk memberikan pengalaman belajar, program pendidikan berkelanjutan, juga dimaksudkan menyiapkan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sejak usia dini.

Tabel 9.
Sasaran Program PAUD di Kab. Kediri

No.	Kelompok Usia	Jumlah	Jumlah Siswa
1.	0-1 tahun	24.365	0
2.	1-2 tahun	24.442	15
3.	2-3 tahun	23.877	220
4.	3-4 tahun	24.332	511
5.	4-5 tahun	24.487	1.318
6.	5-6 tahun	24.762	2.008
Jumlah Total		146.265	4.072

Sumber: Pendidikan Non Formal tahun 2009

Sasaran program PAUD di Kab. Kediri adalah sebanyak 146.265 anak (usia antara 0-6 tahun). Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah sasaran PAUD relatif sama antar kelompok usia. Sementara jumlah siswa terbesar pada kelompok usia 5-6 tahun, yaitu sebanyak 2.008 anak dan semakin mengecil pada usia yang semakin muda. Hal ini berarti bahwa kesadaran masyarakat akan PAUD belum dapat dikatakan bagus.

Satuan pendidikan luar sekolah yang lain adalah Kelompok Belajar (Kejar). Peserta didik pada jalur ini disebut warga belajar, sedangkan tenaga kependidikannya dikenal dengan sebutan sumber belajar/tutor belajar.

Pada Tabel 10 tampak bahwa jumlah warga belajar paket B lebih banyak dibanding warga belajar yang lain yaitu sebanyak 2.025 warga belajar paket B dan sebanyak 403 orang dan 1.466 orang untuk warga belajar paket A dan paket C. Ini berarti masyarakat yang putus sekolah tingkat SMP lebih banyak yang berkehendak melanjutkan pendidikannya melalui pendidikan luar sekolah dibandingkan dengan jenjang yang lainnya. Sementara bila dilihat dari perbandingan jumlah kelompok belajar dengan warga belajar akan nampak 1:20,15 untuk paket A, 1:19,85 untuk paket B, dan 1:20,08 untuk paket. Dari kondisi ini nampak ketiga kelompok belajar pada kondisi yang ideal. Artinya bahwa tiap-tiap kelompok berkisar pada 19-21 orang warga belajar. Bila dilihat dari tenaga tutor, maka pada Paket A berjumlah 20 Orang untuk 20 pokjar, Paket B 612 orang untuk 102 pokjar, dan paket C 438 orang untuk 73 pokjar.

Tabel 10.
Jumlah Warga Belajar, Kelompok Belajar, dan Tutor Tahun 2009

Uraian	Warga Belajar	Kelompok Belajar	Tutor
Paket A	403	20	20
Paket B	2.025	102	612
Paket C	1.466	73	438

Sumber: Pendidikan Non Formal tahun 2009

f. Keragaman antar Kecamatan di Kabupaten Kediri

a) Akses terhadap pendidikan SD/MI

Dalam menggambarkan kondisi akses terhadap pendidikan dasar di Kabupaten Kediri digunakan data tahun 2008/2009 dan 2009/2010. Pada tahun

2008/2009, APM SD/MI mencapai 96,51%, sedangkan tahun 2009/2010 sebesar 99,26%. Sementara akses terhadap pendidikan SD/MI pada tingkat kecamatan menunjukkan adanya keragaman (tabel 11). Keragaman tersebut dari tertinggi 99,59% sampai terendah 75,72%. 3 kecamatan yang memiliki angka partisipasi tertinggi adalah kecamatan Banyakan, Gampengrejo, dan Plosoklaten. Sebaliknya 3 kecamatan yang proporsi anak usia 7-12 tahun yang terlayani pendidikan SD/MI paling rendah adalah Kecamatan Ngancar, Kras, dan Grogol.

Pada tahun selanjutnya, keragaman tiap kecamatan dari yang tertinggi sebesar 101,74% hingga terendah, yaitu 88,08%. Keduanya secara berurutan adalah Kecamatan Ngadiluwih dan Kecamatan Tarokan. Untuk 3 kecamatan dengan APM tertinggi masing-masing adalah Kecamatan Ngadiluwih, Banyakan, dan Gampengrejo. Sedangkan 3 terendah terdapat di Kecamatan Tarokan, Ngancar, dan Grogol.

Data tersebut menunjukkan bahwa di setiap kecamatan ada anak usia 7-12 tahun yang belum terlayani pendidikannya dan ini mengindikasikan perlunya upaya penuntasan wajib belajar pendidikan dasar yang lebih terutama terhadap kecamatan yang APM nya masih di bawah rerata kabupaten.

Tabel 11. Keragaman APK dan APM SD/MI Kecamatan Per 2008/2009 dan 2009/2010

No	Kecamatan	2008/2009		2009/2010	
		APK	APM	APK	APM
1	Banyakan	105,40	99,59	104,17	99,59
2	Gampengrejo	101,81	99,45	101,37	99,45
3	Grogol	104,99	80,36	105,83	88,14
4	Gurah	103,10	98,80	106,39	98,80
5	Kandangan	100,29	89,33	94,25	89,33
6	Kandat	107,76	96,25	105,34	96,25
7	Kepung	107,81	94,50	106,87	94,75

8	Kras	109,56	79,33	102,12	90,09
9	Kunjang	107,98	86,99	103,98	94,73
10	Mojo	103,90	88,65	98,74	91,45
11	Ngadiluwih	108,73	98,32	108,39	101,74
12	Ngancar	106,96	75,72	104,88	88,06
13	Pagu	101,28	96,69	101,59	96,69
14	Papar	106,99	94,41	106,97	94,41
15	Pare	102,43	94,57	100,77	95,86
16	Plemahan	100,87	97,86	102,60	97,86
17	Plosoklaten	101,46	99,11	101,86	99,11
18	Puncu	106,45	90,00	107,51	90,00
19	Purwoasri	105,87	91,02	105,60	91,02
20	Ringinrejo	108,45	93,50	109,46	93,50
21	Semen	105,88	92,42	104,47	92,42
22	Tarokan	104,41	89,80	90,94	88,08
23	Wates	104,11	97,53	104,40	97,53
24	Kayen Kidul	101,28	96,69	101,59	96,69
25					
	Kab. Kediri	102,78	96,51	110,37	99,26

Sumber : Rekap Kuesioner Pendidikan Tahun 2008/2009 – 2009/2010

b) Akses SMP/MTs

Dalam menggambarkan kondisi akses pendidikan dasar Kabupaten Kediri digunakan data tahun 2008/2009 dan 2009/2010. Pada tahun 2008/2009, tercatat APK SMP/MTs mencapai 88,11% dan APM mencapai 69,80%, sedang tahun 2009/2010 sebesar 90,40% untuk APK dan 75,58% untuk APM SMP/MTs.

Dibandingkan dengan rerata APK kabupaten tersebut, tingkat kecamatan menunjukkan adanya keragaman (tabel 12). Keragaman tersebut dari tertinggi 99,72% (Kecamatan Kepung) sampai terendah 31,41%, adalah Kecamatan Banyakan. Rendahnya APK pada kecamatan Banyakan disinyalir lebih banyak sebagai akibat dari letak geografis kecamatan tersebut yang berhimpitan dengan kota dan kecamatan lain yang lebih “mapan”, sementara kecamatan banyakan merupakan kecamatan “baru” yang belum memiliki infrastruktur lengkap.

Dari data yang diperoleh terlihat bahwa di setiap kecamatan ada anak usia 13-15 tahun yang belum terlayani pendidikannya dan ini mengindikasikan perlunya upaya penuntasan wajib belajar pendidikan dasar yang lebih terutama terhadap kecamatan yang APK nya masih di bawah rerata kabupaten.

**Tabel 12. Keragaman APK dan APM SMP/MTs Kecamatan
Per 2008/2009 dan 2009/2010**

No.	Kecamatan	2008/2009		2009/2010	
		APK	APM	APK	APM
1	Banyakan	25,99	21,25	31,41	23,16
2	Gampengrejo	71,88	62,04	86,27	74,56
3	Grogol	97,36	63,28	92,10	61,14
4	Gurah	96,24	66,37	87,12	65,31
5	Kandangan	93,03	66,46	78,88	59,32
6	Kandat	96,29	72,96	91,23	74,91
7	Kepung	98,10	78,73	99,72	97,04
8	Kras	65,86	48,88	93,32	69,41
9	Kunjang	98,88	65,26	84,12	66,81
10	Mojo	97,01	72,67	95,66	69,16
11	Ngadiluwih	87,75	79,42	78,71	68,84
12	Ngancar	45,41	36,64	69,69	50,13
13	Pagu	72,02	55,71	81,87	71,39
14	Papar	97,72	72,38	91,95	63,52
15	Pare	96,95	77,34	94,33	73,73
16	Plemahan	67,51	53,11	66,39	53,91
17	Plosoklaten	94,15	72,90	95,16	73,98
18	Puncu	70,19	55,68	69,92	52,28
19	Purwoasri	89,80	73,12	75,69	58,83
20	Ringinrejo	37,75	22,16	57,38	29,90
21	Semen	66,17	53,14	84,50	66,94
22	Tarokan	53,89	41,12	77,85	51,20
23	Wates	83,09	61,66	95,63	70,36
24	Kayen Kidul	72,02	55,71	81,87	71,39
25					
	Kab. Kediri	88,11	69,80	90,40	75,58

Sumber : Rekap Kuesioner Pendidikan Tahun 2008/2009 – 2009/2010

c) Keragaman Antar Jenis Kelamin

Untuk melihat ketidaksetaraan gender akses terhadap pendidikan dengan menggunakan indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) berdasarkan jenis kelamin, tabel 13 menunjukkan bahwa disparitas gender tertinggi terdapat pada kelompok usia SD, yaitu sebesar -8,77% dan terus menurun pada jenjang-jenjang selanjutnya, hingga -1,07% pada jenjang pendidikan menengah.

**Tabel 13. Perbandingan Disparitas Gender
Dalam Angka Partisipasi Kasar Antar Jenjang Tahun 2009/2010**

Jenjang	APK Laki-laki	APK Perempuan	APK	Disparitas
SD	108,19	99,42	103,14	-8,77
SLTP	83,51	81,66	83,67	-1,85
SLTA	30,85	29,78	31,47	-1,07

Sumber: Rekap Kuesioner Pendidikan Tahun 2009/2010

5. Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan

a) Visi

Untuk memberikan gambaran harapan masa depan yang ingin dicapai Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kediri dan agar dapat berperan aktif, antisipatif, inovatif dan produktif sesuai dengan eksistensinya dalam kerangka pembangunan Kabupaten Kediri, maka telah ditetapkan visi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kediri yaitu, *“Terwujudnya individu dan masyarakat Kabupaten Kediri yang cerdas, dan berdaya saing”*.

Cerdas (*smart*), artinya bahwa insan Kabupaten Kediri diharapkan memiliki daya kualitas tinggi dalam merealisasikan kecerdasan, yang meliputi kecerdasan

spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan kinestetis.

Kecerdasan spiritual, tercermin melalui kemampuan beraktualisasi diri dalam hal olah hati/qolbu untuk menumbuhkembangkan dan memperkuat keimanan, ketakwaan, ahlak mulia, budi pekerti luhur, dan kepribadian unggul pada diri insan Kabupaten Kediri.

Kecerdasan emosional, tercermin melalui kemampuan beraktualisasi diri di dalam hal olah rasa untuk meningkatkan kualitas, sensitivitas, dan apresiasi terhadap kehalusan dan keindahan seni budaya dan memiliki kompetensi dalam mengekspresikannya.

Kecerdasan sosial, tercermin melalui kemampuan mengaktualisasikan diri di dalam hal interaksi sosial secara nyata.

Kecerdasan intelektual, tercermin melalui kemampuan beraktualisasi diri di dalam hal olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan sikap kritis, kreatif, dan imajinatif.

Kecerdasan kinestetis, tercermin melalui kemampuan beraktualisasi diri di dalam bidang olahraga untuk mewujudkan insan adiraga yang sehat, bugar, berdaya tahan, sigap, terampil dan trengginas.

Berdaya saing, artinya bahwa insan Kabupaten Kediri diharapkan memiliki kemampuan mengaktualisasikan jatidirinya dalam tataran regional, nasional, maupun internasional didasari semangat kompetitif, sportif dan profesionalisme, yang ditandai dengan dimilikinya kapabilitas tinggi dalam mengekspresikan kinerja (proses) dan produk kerja (hasil), memahami dan melaksanakan Standar

Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, dan mampu berkomunikasi secara efektif yang relevan dengan pengembangan bidang garapan dan tanggung jawabnya.

b) Misi

Hal penting yang bisa dipetik dari rumusan visi dan misi, termasuk strategi pembangunan sebagaimana telah diangkat sebelumnya adalah, bahwa adalah urusan pembangunan di sektor pendidikan, terutama pendidikan dasar 9 tahun ternyata memiliki posisi sekaligus landasan yang kuat dalam rumusan kebijakan pembangunan di Kabupaten Kediri. Itulah pula yang dijadikan arah dan acuan pembangunan pendidikan sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Kediri.

Visi agar lebih fokus dan terarah, harus diterjemahkan ke dalam misi. Misi merupakan hal yang penting untuk mengarahkan operasional organisasi sehingga dapat terus eksis dan mengikuti perubahan zaman. Perumusan misi dilakukan dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) organisasi; *customers* dan pihak-pihak yang berkepentingan; dan permasalahan yang harus ditangani.

Berkait dengan itu, ada empat misi yang telah dirumuskan sekaligus ditetapkan oleh Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kediri, yaitu:

- 1) Mewujudkan pemerataan pendidikan melalui perluasan akses dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan, termasuk terjaminnya biaya pendidikan yang terjangkau;

- 2) Mewujudkan peningkatan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan, pemuda dan olahraga melalui pendampingan, pembinaan, pelatihan, dan peningkatan sarana prasarana pendidikan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan, serta pendampingan, pembinaan, pelatihan, dan peningkatan sarana prasarana kepemudaan, dan olahraga;
- 3) Mewujudkan peningkatan tata kelola dan pencitraan publik di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga, optimalisasi peran serta masyarakat pemangku (*stake holders*) terhadap pendidikan melalui manajemen mutu berbasis sekolah, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- 4) Mewujudkan peningkatan kualitas pemuda, pemberdayaan dan peran partisipasi pemuda melalui revitalisasi kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler dan revitalisasi organisasi kepemudaan.

c) Tujuan

1. Terwujudnya kelangsungan pemberian bantuan pendidikan;
2. Meningkatkan perluasan kesempatan dan akses pelayanan Pendidikan Formal pada semua jenjang bagi masyarakat guna tercapainya penuntasan target Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang ditandai dengan dicapainya APK SMP/MTs sebesar 95,45%, dan rintisan wajib belajar 12 tahun;
3. Meningkatnya perluasan kesempatan dan akses pelayanan Pendidikan Luar Sekolah (PLS)/Pendidikan Non Formal bagi kelompok masyarakat;

4. Meningkatnya perluasan kesempatan dan akses pelayanan pendidikan berkategori khusus (PLB, Autis, Hiperaktif dll) melalui sekolah inklusif bagi kelompok masyarakat dan pendidikan anak usia dini (PAUD);
5. Terselenggaranya pendidikan jarak jauh/terbuka dengan mendaya-gunakan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan;
6. Terwujudnya fungsi pendidikan untuk mempercepat proses dalam pengentasan kemiskinan, pengangguran dan pembangunan daerah;
7. Terpenuhinya kebutuhan sarana pra sarana, termasuk buku, modul dan alat peraga untuk menunjang kegiatan belajar mengajar;
8. Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan melalui pendampingan, pembinaan dan pelatihan bagi siswa;
9. Terpenuhinya kebutuhan guru, maupun ketidakmerataan guru untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan, serta terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya pendidikan, profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan;
10. Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan melalui pendampingan dan pembinaan kelembagaan, dan menjadikan lembaga pendidikan sebagai *change of agent*;
11. Terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan kejuruan berbasis kompetensi untuk meningkatkan kualitas lulusan dalam rangka memasuki dunia kerja.
12. Terwujudnya sistem kelembagaan yang efektif dan efisien;
13. Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan komite sekolah, dewan pendidikan, orang tua siswa dan masyarakat sebagai *stake holder* pendidikan

dalam mewujudkan manajemen pendidikan berbasis sekolah, yang memungkinkan terciptanya sekolah mandiri dan memiliki akuntabilitas;

14. Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan organisasi kepemudaan baik di lingkup lembaga pendidikan, maupun di lingkup masyarakat dan pemangku kepentingan (*stake holders*) yang lain;
15. Meningkatkan kualitas pemuda yang ditandai meningkatnya nilai patriotisme dan idealisme serta meningkatnya partisipasi angkatan kerja pemuda.

d) Sasaran

1. Menjamin keberlanjutan pemberian BOS dan BKSM
2. Memperbanyak pemberian beasiswa serta subsidi bagi siswa dari keluarga kurang mampu
3. Pembangunan USB, RKB dan revitalisasi ruang kelas khususnya SD/MI dan SMP/MTs
4. Meningkatnya kuantitas kelembagaan dan ruang belajar pendidikan menengah (SMA/SMK)
5. Efisiensi dan optimalisasi pemanfaatan fasilitas pendidikan yang telah ada (sekolah satu atap, dll)
6. Implementasi sekolah mendatangi siswa (sekolah kecil/kelas jauh) atau bentuk lain yang bersifat mobil
7. Penuntasan pemberantasan buta aksara dan perluasan perpustakaan/taman bacaan masyarakat
8. Mengefektifkan lembaga PLS dalam pelayanan pendidikan bagi siswa DO dan siswa tidak melanjutkan pendidikan formal

9. Meningkatkan jumlah sekolah/kelas inklusif dan PLB bagi masyarakat berkebutuhan khusus dan pendidikan anak dini usia (PADU)
10. Terpenuhinya kebutuhan sarpras pendidikan pada pendidikan berkebutuhan khusus dan pendidikan anak usia dini (PAUD)
11. Terselenggaranya pendidikan jarak jauh melalui TV pendidikan, Broadcasting-radio, dan pendidikan berbasis website
12. Meningkatnya layanan pendidikan ketrampilan bagi anak luar biasa dan berkebutuhan khusus
13. Terselenggaranya pendidikan yang berorientasi kecakapan hidup (PBKH)
14. Terwujudnya suatu sistem pendidikan yang terpadu
15. Terpenuhinya kebutuhan sarpras pendidikan guna peningkatan kualitas pendidikan sesuai standar sarpras (Permendiknas RI No. 24/2007)
16. Terpenuhinya standar isi (Permendiknas RI No. 22/2006)
17. Meningkatnya kualitas dan daya saing siswa pada event-event tingkat kabupaten, prov, nasional, dan internasional
18. Terbangunnya sistem penjaminan mutu kemampuan akademik siswa
19. Teralokasikannya dan terakomodasikannya kebutuhan guru
20. Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidik (guru) pada event-event tingkat kabupaten, prov, nasional, dan internasional
21. Meningkatnya kualifikasi, kompetensi dan profesionalitas tenaga pendidik (guru) dan tutor
22. Terbangunnya sistem penghargaan, perlindungan, dan kesejahteraan tenaga pendidik/jabatan fungsional pendidikan

23. Termanfaatkannya dan memantapkan hasil akreditasi lembaga pendidikan
24. Meningkatnya lembaga pendidikan yang berstandar nasional (SSN) dan bertaraf internasional (SBI)
25. Terlaksananya akselerasi pendidikan
26. Berfungsinya lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kepribadian
27. Berfungsinya lembaga pendidikan sebagai pusat pembibitan calon atlet dan calon seniman profesional
28. Meningkatnya pendidikan kejuruan dan vokasi berbasis produksi dan potensi daerah
29. Meningkatnya SMK yang menyelenggarakan Community College dan diakui oleh DUDI/ perguruan tinggi
30. Terwujudnya sistem administrasi yang efektif-efisien dan evaluasi capaian kinerja yang transparan dan akuntabel
31. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan
32. Optimalnya pemanfaatan ICT dalam pendataan, perencanaan, dan evaluasi
33. Terwujudnya dan mantabnya penerapan MBS di satuan pendidikan
34. Optimalnya peran dewan pendidikan dan komite sekolah
35. Optimalnya potensi elemen masyarakat dalam pengembangan penyelenggaraan pendidikan;
36. Optimalnya peran organisasi kepemudaan baik di lingkup lembaga pendidikan, seperti Pramuka, Palang Merah Remaja dll, maupun di lingkup

masyarakat seperti Karang Taruna, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dll.

37. Tersosialisasikannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, tentang Kepemudaan;
38. Terwujudnya nilai-nilai patriotism dan idealism di kalangan pemuda;
39. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja pemuda atau menurunnya tingkat pengangguran terbuka di kalangan pemuda;
40. Menurunnya masalah-masalah sosial seperti kriminalitas, premanisme, penggunaan obat-obat terlarang dll di kalangan pemuda.

Untuk menjabarkan keempat misi tersebut, tujuan serta sasaran yang sekaligus merupakan arah dan kebijakan penyelenggaraan pembangunan pendidikan di Kabupaten Kediri, sebagaimana bisa dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 14. Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kediri Tahun 2011-2015

Misi		Tujuan		Sasaran	
1	Mewujudkan pemerataan pendidikan melalui perluasan akses dan kesempatan pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan dan terjaminnya biaya pendidikan yang terjangkau.	1	Terwujudnya kelangsungan pemberian bantuan pendidikan.	1.	Menjamin keberlanjutan pemberian BOS dan BKSM.
				2.	Memperbanyak pemberian beasiswa serta subsidi bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
		2	Meningkatkan perluasan akses dan kesempatan memperoleh pendidikan dalam penuntasan wajar 9 th dan rintisan wajar 12 th.	1	Pembangunan USB, RKB dan revitalisasi ruang kelas khususnya SD/MI dan SMP/MTs.
				2	Meningkatnya kuantitas kelembagaan dan ruang belajar pendidikan menengah (SMA/SMK).
				3	Efisiensi dan optimalisasi pemanfaatan fasilitas pendidikan yang telah ada (sekolah satu atap, dll).
				4	Implementasi sekolah mendatangi siswa (sekolah kecil/kelas jauh) atau bentuk lain

					yang bersifat <i>mobile</i> .
		3	Meningkatkan perluasan akses dan kesempatan pelayanan pendidikan luar sekolah.	1	Penuntasan pemberantasan buta aksara dan perluasan perpustakaan/taman bacaan masyarakat.
				2	Mengefektifkan lembaga PLS dalam pelayanan pendidikan bagi siswa DO dan siswa tidak melanjutkan pendidikan formal.
		4	Meningkatkan perluasan akses dan kesempatan pelayanan pendidikan berkategori khusus serta pendidikan anak usia dini (PAUD).	1	Meningkatkan jumlah sekolah/kelas inklusif dan PLB bagi masyarakat berkebutuhan khusus dan pendidikan anak dini usia (PADU).
				2	Terpenuhinya kebutuhan sarpras pendidikan pada pendidikan berkebutuhan khusus dan pendidikan anak usia dini (PAUD).
		5	Terselenggaranya pendidikan jarak jauh/terbuka.	1	Terselenggaranya pendidikan jarak jauh melalui TV pendidikan, <i>Broadcasting-radio</i> , dan pendidikan berbasis <i>website</i> .
2	Mewujudkan peningkatan kualitas, relevansi, dan daya saing melalui pendampingan, pembinaan, pelatihan, dan peningkatan sarana prasarana pendidikan, pemuda, dan olahraga.	1	Terwujudnya fungsi pendidikan dalam pengentasan kemiskinan, pengangguran dan pembangunan daerah.	1	Meningkatnya layanan pendidikan ketrampilan bagi anak luar biasa dan berkebutuhan khusus.
				2	Terselenggaranya pendidikan yang berorientasi kecakapan hidup (PBKH).
				3	Terwujudnya suatu sistem pendidikan yang terpadu.
		2	Terpenuhinya sarana prasarana pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan (PP 19/2005).	1	Terpenuhinya kebutuhan sarpras pendidikan guna peningkatan kualitas pendidikan sesuai standar sarpras (Permendiknas RI No. 24/2007).
				2	Terpenuhinya standar isi (Permendiknas RI No. 22/2006).
		3	Peningkatan kualitas melalui pendampingan, pembinaan, dan pelatihan bagi siswa.	1	Meningkatnya kualitas dan daya saing siswa pada event-event tingkat kabupaten, prov, nasional, dan internasional.
				2	Terbangunnya sistem penjaminan mutu kemampuan akademik siswa.
		4	Terpenuhinya kebutuhan guru serta terwujudnya kualitas, profesionalisme	1	Teralokasikannya dan terakomodasikannya kebutuhan guru.
				2	Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidik (guru) pada event-event tingkat kabupaten, prov, nasional, dan internasional.

			tenaga pendidik dan kependidikan.	3	Meningkatnya kualifikasi, kompetensi dan profesionalitas tenaga pendidik (guru/tutor) dan tenaga kependidikan.
				4	Terbangunnya sistem penghargaan, perlindungan, dan kesejahteraan tenaga pendidik/jabatan fungsional pendidikan.
		5	Peningkatan kualitas melalui pendampingan dan pembinaan kelembagaan serta menjadikan lembaga pendidikan sebagai <i>change of agent</i> .	1	Termanfaatkannya dan memantapkan hasil akreditasi lembaga pendidikan baik formal maupun non formal.
				2	Meningkatnya lembaga pendidikan yang berstandar nasional (SSN) dan bertaraf internasional (SBI).
				3	Terlaksananya akselerasi pendidikan.
				4	Berfungsinya lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kepribadian.
				5	Berfungsinya lembaga pendidikan sebagai pusat pembibitan calon atlet dan calon seniman profesional.
		6	Peningkatan kualitas pendidikan kejuruan berbasis kompetensi.	1	Meningkatnya pendidikan kejuruan dan vokasi berbasis produksi dan potensi daerah.
				2	Meningkatnya SMK yang menyelenggarakan Community College dan diakui oleh DUDI/ perguruan tinggi.
3	Mewujudkan peningkatan tata kelola dan pencitraan publik bidang di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga mengoptimalkan peran stake holder dan pemanfaatan ICT.	1	Terwujudnya sistem kelembagaan yang efektif dan efisien.	1	Terwujudnya sistem administrasi yang efektif-efisien dan evaluasi capaian kinerja yang transparan dan akuntabel.
				2	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga.
				3	Optimalnya pemanfaatan ICT dalam pendataan, perencanaan, dan evaluasi di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga.
		2	Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan <i>stake holder</i> pendidikan dalam mewujudkan MBS.	1	Terwujudnya dan mantabnya penerapan MBS di satuan pendidikan.
				3	Optimalnya potensi elemen masyarakat dalam pengembangan penyelenggaraan pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan.
4	Mewujudkan peningkatan kualitas pemuda,	1	Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan <i>stake holder</i>	1	Optimalnya peran organisasi kepemudaan baik di lingkup lembaga pendidikan, seperti Pramuka, Palang Merah Ramaja, dll maupun di lingkup masyarakat, seperti Karang

pemberdayaan dan peran partisipasi pemuda.		kepemudaan.		Taruna, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dll.
			2	Tersosialisasikannya Undang-Undang No. 40 Tahun 2009, tentang Kepemudaan.
	2	Meningkatkan kualitas pemuda yang ditandai dengan meningkatnya nilai patriotisme dan idealisme serta meningkatnya partisipasi angkatan kerja pemuda.	1	Terwujudnya nilai-nilai patriotisme dan idealisme di kalangan pemuda.
			2	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja pemuda atau menurunnya tingkat pengangguran terbuka di kalangan pemuda.
			3	Menurunnya masalah-masalah sosial seperti kriminalitas, premanisme, penggunaan obat-obat terlarang dll di kalangan pemuda.

Sumber: Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kediri

Dari tabel di atas merupakan bukti bahwa pemerintah Kabupaten Kediri memiliki komitmen yang cukup tinggi dalam mengupayakan pencapaian Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun sebagaimana telah digariskan oleh kebijakan pemerintah pusat dan provinsi Jawa Timur.

Melalui kebijakan yang ditujukan kepada upaya pemerataan, pelaksanaan kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun diharapkan bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali lapisan masyarakat kurang beruntung alias miskin yang selama ini masih banyak meninggalkan sasaran. Dan melalui kebijakan peningkatan mutu, pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun diharapkan bisa dilakukan tidak hanya dalam rangka mengejar kuantitas melainkan lebih jauh lagi mampu memberikan pengetahuan dan ketrampilan dasar bagi setiap warga masyarakat sebagai modal utama untuk bisa mengakses hak-hak hidupnya dalam banyak aspek kehidupan yang mengglobal dan sarat dengan kompetisi ini.

6. Target Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang Ingin Dicapai

Sejalan dengan pesatnya perkembangan ekonomi global dengan tingkat persaingan ekonomi yang sangat ketat, dampak dan kemajuan teknologi dan informasi yang pada akhirnya eksistensi bangsa ditentukan oleh kemampuannya dalam persaingan global, dalam hal ini terutama dipengaruhi oleh daya saing sumber daya manusianya. Dengan demikian Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun harus dipercepat penuntasannya.

Berdasarkan kondisi yang dicapai pada lima tahun terakhir serta perkembangan pada masa kini, maka Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dapat dituntaskan pada tahun 2013 dengan tahapan pencapaian target sebagaimana Tabel 15 berikut:

**Tabel 15. Target Penuntasan Wajardikdas 9 Tahun
Di Kabupaten Kediri**

No	Lembaga	APK Tahun Pelajaran					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD / MI	110,36	108,09	106,74	104,44	102,4	101,25
2	SMP / MTs	90,40	92,70	95,10	97,50	98,80	99,80

a) SD-MI

Sejalan dengan target penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan telah tuntasnya Wajar Dikdas pada tingkat SD/MI, serta memperhatikan perkembangan penduduk usia 7-12 tahun dalam kurun waktu tahun 2007-2009, yang menunjukkan perkembangan yang tidak terlalu besar, target pencapaian APK-nya diupayakan menurun, sebaliknya pencapaian target APM-nya meningkat. Hal ini mengingat bahwa orientasi pembangunan pendidikan SD/MI saat ini kita arahkan ke pengembangan mutu, karena memang pada tingkat SD/MI

wajar dikdas telah mencapai ketuntasan. Tahapan pencapaian target sebagaimana

Tabel 16 berikut:

**Tabel 16. Proyeksi Capaian APK/APM SD dan MI
Di Kabupaten Kediri**

No	APK/APM	Tahun Pelajaran					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	APK	110,37	108,09	106,74	104,44	102,4	101,25
2	APM	99,26	99,50	99,70	99,85	99,90	99,95

b) SMP/MTs

Pada jenjang SMP/MTs konsekuensi dari penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun adalah perlunya peningkatan pencapaian target APK SMP/MTs sebesar 99,80 %. Untuk mencapai target tersebut maka peningkatan target APK SMP/MTs setiap tahunnya adalah sebagaimana digambarkan pada Tabel 16. Dasar penentuan target APK SMP/MTs tersebut utamanya adalah perkembangan siswa SMP/MTs selama kurun waktu 2006-2009 yang diproyeksikan kedalam penyebaran pada lima tahun yang akan datang (sampai dengan tahun 2015).

7. Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun bagi

Anak dari Keluarga Miskin

Berdasarkan prinsip pembangunan pendidikan serta serangkaian isu strategis, disusun program pembangunan pendidikan pemuda dan olahraga di Kabupaten Kediri yang dilandasi empat pilar yakni (1) Pemerataan dan perluasan akses pendidikan, (2) Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, (3) *Good governance*, akuntabilitas dan pencitraan publik dan (4) peningkatan kualitas

pemuda, pemberdayaan dan peran partisipasi pemuda. Namun yang akan dibahas di sini hanya mengenai pemerataan dan perluasan akses pendidikan, dimana hal tersebut sesuai dengan fokus penelitian yang terkait dengan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang memperhatikan pelayanan yang adil dan merata bagi penduduk yang menghadapi hambatan ekonomi, geografis dan sosial budaya, maupun hambatan/kelainan fisik, emosi, mental serta intelektual peserta didik.

Pemerataan dan perluasan akses pendidikan diarahkan pada upaya peningkatan akses dan perluasan daya tampung satuan pendidikan sesuai dengan prioritas nasional, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dengan pemberian berbagai bentuk bantuan. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas penduduk indonesia untuk dapat belajar sepanjang hayat dalam rangka peningkatan daya saing bangsa di era global. Untuk itu, diperlukan strategi yang lebih efektif antara lain dengan membantu dan mempermudah mereka yang belum bersekolah, putus sekolah, serta lulusan SD/MI yang tidak melanjutkan, untuk memperoleh layanan pendidikan.

a. Bentuk-bentuk Program Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Dalam kaitannya dengan pemerataan dan perluasan akses pendidikan di Kabupaten Kediri disusun program-program pengembangan pendidikan sebagai berikut:

a) Program Peningkatan Akses Pendidikan

Berikut ini adalah deskripsi mengenai program-program yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin yang diwujudkan dalam berbagai bentuk pendidikan alternatif yang secara lebih khusus lebih banyak diperuntukkan dalam rangka menyediakan layanan pendidikan bagi anak dari keluarga miskin. Program-program ini sekaligus merupakan penjabaran dari arah Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar yang telah ditetapkan.

1) Peningkatan akses melalui SD/SMP Seatap

Program ini pada intinya dalam rangka memfasilitasi anak usia 13-15 tahun, sebutlah lulusan SD/MI yang belum tertampung di sekolah tingkat SLTP yang ada, baik karena alasan geografis berupa jauhnya jarak domisili anak dengan sekolah, maupun karena alasan ekonomi terkait dengan besarnya beban transportasi yang sering jadi kendala bagi anak dari keluarga miskin. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kasi Sarana dan Prasarana TK/SD, Drs. Sholeh, bahwa:

“Pada dasarnya program SD/SMP Seatap ini bertujuan memfasilitasi lulusan SD/MI yang belum tertampung di sekolah tingkat SLTP yang ada, baik karena alasan geografis berupa jauhnya jarak domisili anak dengan sekolah, maupun karena alasan ekonomi yang berhubungan dengan besarnya beban transportasi.” (wawancara: Senin, 4 Juni 2012)

Dijelaskan pula oleh Kasi Sarana dan Prasarana SMP, Drs. Faizin, menampung mereka yang selama ini tidak mampu mengakses SLTP yang ada itulah tujuan dari program ini. Program SD/SMP Seatap ini dilakukan dalam rangka memberikan peluang yang lebih luas lagi bagi anak dari keluarga miskin dalam mengakses pendidikan dasar 9 tahun. Pengembangan program ini

diharapkan mampu membantu mempercepat pencapaian Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Hal ini sesuai dengan yang beliau ungkapkan, bahwa:

“Tujuan dari program SD/SMP Seatap ini adalah menampung mereka yang selama ini tidak mampu mengakses SLTP yang ada. Diharapkan pengembangan program ini mampu membantu mempercepat pencapaian Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.” (wawancara: Selasa, 5 Juni 2012)

2) Peningkatan akses melalui Pembangunan SD/SMP Kecil

Tujuan dibangunnya SD/SMP Kecil ini sama, yaitu memperluas akses pendidikan dasar bagi anak dari keluarga yang kurang beruntung. SD/SMP Kecil ini disebut kecil, disamping karena rombongan belajarnya memang kecil, juga guru yang melayaninya tidak banyak. Itu sebabnya, model ini cocok untuk wilayah yang jumlah usia sekolahnya sedikit, sarana dan prasarana, termasuk jumlah gurunya yang terbatas dan berlokasi di daerah terpencil. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kasi Sarana dan Prasarana SMP, Drs. Faizin, bahwa:

“SD/SMP Kecil ini dibangun dengan tujuan yaitu memperluas akses pendidikan dasar bagi anak dari keluarga yang kurang beruntung. Kenapa disebut kecil, disamping karena SD/SMP Kecil yang rombongan belajarnya memang kecil, juga guru yang melayaninya tidak banyak.” (wawancara: Selasa, 5 Juni 2012)

3) Peningkatan akses melalui SMP Terbuka

Masih dalam rangka meningkatkan pemerataan kesempatan belajar, khususnya bagi tamatan SD/MI yang karena beberapa alasan tidak berkesempatan mengikuti pendidikan pada jenjang SLTP, serta mengacu pula kepada kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah pusat, maka pengembangan SMP Terbuka yang memiliki karakteristik tersendiri itu juga menjadi pilihan yang

dikembangkan di Kabupaten Kediri dalam rangka memperluas akses pendidikan dasar bagi anak dari keluarga miskin.

SMP Terbuka ini tidak lain merupakan salah satu satuan penyelenggara pendidikan tiga tahun yang menggunakan kurikulum seperti SLTP reguler, namun dengan kegiatan belajar mengajarnya yang berbeda, yakni yang menekankan pada prinsip belajar mandiri, atau cara belajar yang dilakukan sendiri oleh siswa. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kasi Sarana dan Prasarana SMP, Drs. Faizin, bahwa:

“SMP Terbuka adalah salah satu satuan penyelenggara pendidikan tiga tahun yang menggunakan kurikulum seperti SLTP reguler, namun dengan kegiatan belajar mengajarnya yang berbeda, yakni yang menekankan pada prinsip belajar mandiri.” (wawancara: Selasa, 5 Juni 2012)

Ditambahkan pula oleh Drs. Faizin, media belajar yang digunakannya adalah bahan belajar mandiri adalah berupa modul yang ditunjang oleh media lain yang relevan. Adapun waktu dan tempat belajar secara kelompoknya ditentukan bersama oleh siswa dan guru pembimbingnya. Sementara waktu dan tempat belajar mandirinya ditentukan sendiri oleh siswanya.

4) Peningkatan akses melalui Kelas Jauh

Hampir sama pengertian antara Kelas Jauh dengan SMP Terbuka, yaitu jika SMP Terbuka merupakan model penyelenggaraan pendidikan mandiri yang dilaksanakan untuk menampung akses anak yang tinggal di daerah terpencil, maka Kelas Jauh diselenggarakan di daerah atau lokasi yang memiliki banyak calon anak namun karena beberapa alasan, sebutlah karena keterbatasan anggaran, belum memungkinkan dibangun Unit Sekolah Baru (USB). Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kasi Sarana dan Prasarana SMP, Drs. Faizin, bahwa:

“Pengertian antara Kelas Jauh dengan SMP Terbuka sebenarnya hampir sama, yaitu jika SMP Terbuka merupakan model penyelenggaraan pendidikan mandiri yang dilaksanakan untuk menampung akses anak yang tinggal di daerah terpencil, maka Kelas Jauh diselenggarakan di daerah atau lokasi yang memiliki banyak calon anak namun karena beberapa alasan, misalnya karena keterbatasan anggaran, belum memungkinkan untuk dibangun Unit Sekolah Baru (USB).” (wawancara: Selasa, 5 Juni 2012)

Dijelaskan pula oleh Kasi Sarana dan Prasarana TK/SD, Drs. Sholeh, bahwa:

“Penyelenggaraan Kelas Jauh ini dilaksanakan di lokasi yang memungkinkan bisa dibangun USB, sehingga kelak setelah dukungan yang dibutuhkannya yaitu dukungan anggaran dan ketersediaan tanah sudah memungkinkan, bisa diresmikan sebagai USB.” (wawancara: Senin, 4 Juni 2012)

5) Peningkatan akses melalui Jalur SLB (SDLB dan SMPLB)

Walaupun jumlahnya tidak banyak, kehadiran jalur pendidikan luar biasa, baik untuk tingkat SD (LB) maupun SMP (LB) dalam memberikan akses pendidikan dasar bagi Anak Berkebutuhan Khusus-ABK (*Children with Special Needs*), merupakan program tersendiri yang layak diperhitungkan dalam meningkatkan kinerja Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Kediri. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kasi Kurikulum SD, Drs. Wardoyo, bahwa:

“Kehadiran jalur pendidikan luar biasa, baik untuk tingkat SD (LB) maupun SMP (LB) dalam memberikan akses pendidikan dasar bagi Anak Berkebutuhan Khusus yang walaupun jumlahnya tidak banyak, dan merupakan program tersendiri yang layak diperhitungkan dalam meningkatkan kinerja Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Kediri.” (wawancara: Rabu, 6 Juni 2012)

Ditambahkan pula Drs. Wardoyo, alasan kehadiran jalur pendidikan luar biasa, baik untuk tingkat SD (LB) maupun SMP (LB), merupakan program tersendiri yang layak diperhitungkan dalam meningkatkan kinerja Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Kediri, adalah meskipun anak berkebutuhan khusus ini tidak semuanya anak dari keluarga miskin, namun dalam

banyak aspeknya, kehadiran mereka dengan kelainan yang dimilikinya (kelainan fisik maupun kelainan mental-intelektual, termasuk kelainan sosial dan emosionalnya), layak diperhitungkan sebagai salah satu faktor yang apabila tidak ditangani akan menjadi salah satu faktor penghambat dalam mendukung akselerasi penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

6) Peningkatan akses melalui Jalur Pendidikan Non Formal

Sekian banyak anak usia sekolah di Kabupaten Kediri yang karena banyak faktor, umumnya faktor ekonomi dan faktor geografis, atau keduanya, bahkan faktor psikologis dan faktor lainnya, terpaksa tidak bisa mengikuti pendidikan pada jalur formal sebagaimana yang ditempuh oleh anak-anak lainnya. Sebagiannya terdaftar mengikuti proses pembelajaran melalui Kelompok Belajar (Kejar) Paket A (Setara SD) atau B (Setara SMP) di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kabid Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Drs. Sujud Winarko, bahwa:

“Anak-anak yang terpaksa tidak bisa mengikuti pendidikan pada jalur formal sebagaimana yang ditempuh oleh anak-anak lainnya. Sebagiannya terdaftar mengikuti proses pembelajaran melalui Kejar Paket A atau Kejar B di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).” (*wawancara: Kamis, 7 Juni 2012*)

b) Program Peningkatan Daya Tampung

Jika program yang dibahas sebelumnya lebih terfokus pada implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar dilihat dari dimensi peningkatan akses melalui berbagai programnya, maka uraian berikut ini lebih terfokus pada uraian peningkatan daya tampung satuan pendidikan dasar dalam bentuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), Ruang Kelas Baru (RKB), maupun dalam bentuk

rehabilitasi sekolah terhadap sekolah maupun ruang kelas yang kondisinya rusak, mulai dari rusak ringan sampai ruak berat.

1) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)

Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) ditujukan dalam rangka memperluas akses pelayanan pendidikan dasar di daerah-daerah terpencil. Diharapkan dengan dibangunnya USB anak yang tidak bisa mengakses pelayanan pendidikan dasar karena terkendala faktor geografis bisa tertampung di USB yang dibangun di dekat domisili tempat tinggal anak tersebut. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kasi Sarana dan Prasarana TK/SD, Drs. Sholeh, bahwa:

“Pada dasarnya pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) ditujukan dalam rangka memperluas akses pelayanan pendidikan dasar di daerah-daerah terpencil. Diharapkan dengan dibangunnya USB, anak yang terkendala faktor geografis bisa mengakses pelayanan pendidikan dasar.” (wawancara: *Senin, 4 Juni 2012*)

2) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)

Jika pembangunan USB lebih banyak ditujukan dalam rangka memperluas akses pelayanan pendidikan dasar di daerah-daerah terpencil, maka program penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) lebih banyak diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan daya tampung siswa bagi sekolah-sekolah yang mengalami kelebihan kapasitas. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kabid TK/SD, Drs. Sunaryo, bahwa:

“Program penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) lebih banyak diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan daya tampung siswa bagi sekolah-sekolah yang mengalami kelebihan kapasitas.” (wawancara: *Senin, 4 Juni 2012*)

Dijelaskan pula oleh Drs. Sunaryo, ada tiga faktor utama yang selama ini sering menjadi penyebab sekolah mengalami *over capacity* dan karenanya

senantiasa menjadi prioritas dalam penentuan lokasi penambahan RKB ini. Yang pertama, adalah sekolah yang berlokasi di daerah dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Sementara dua penyebab lainnya berkait dengan letak strategis lokasi sekolah atau kalau bukan karena keberhasilan sekolah dalam membangun *public image* yang memungkinkan masyarakat lebih banyak meminatinya. Ditambahkan pula oleh beliau, bahwa:

“Dibangunnya RKB ini tidak saja bertujuan untuk meningkatkan daya tampung, juga bertujuan untuk meningkatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan, dimana menurut SPM pelayanan pendidikan semua siswa sekolah diharuskan untuk masuk pagi.” (wawancara: Senin, 4 Juni 2012)

3) Rehabilitasi Ruang Kelas

Dengan bermaksud untuk memelihara proses belajar mengajar sesuai dengan yang diharapkan, terutama dengan kondisi bangunan SD maupun SMP, termasuk bangunan MI dan MTs yang dalam keadaan rusak sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka upaya untuk merehabilitasi banyaknya bangunan sekolah rusak, baik rusak ringan maupun berat, merupakan langkah strategis tersendiri dalam upaya penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Seperti diungkapkan Kabid TK/SD, Drs. Sunaryo, bahwa:

“Meskipun program rehabilitasi kelas ini tidak memiliki dampak dalam meningkatkan daya tampung, tetapi membiarkannya, terutama membiarkan bangunan sekolah yang dalam kondisi rusak berat, justru bisa berdampak mengurangi daya tampung sekolah yang ada.” (wawancara: Senin, 4 Juni 2012)

c) Program Bantuan Pembiayaan Bagi Anak dari Keluarga Miskin

Sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap rakyatnya yang tidak mampu, banyak program pemerintah telah dilakukan dalam rangka membantu meringankan beban pembiayaan pendidikan bagi anak dari keluarga miskin.

1) Pemberian Bantuan Melalui Program BOS

Esensi dari program bernama Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari bantuan pemerintah pusat ini adalah untuk memberikan bantuan kepada sekolah dalam rangka membebaskan iuran siswa yang selama ini sering menjadi masalah bagi anak dari keluarga miskin, dengan catatan sekolah penerima bantuan tetap dapat mempertahankan mutu pelayanan pendidikan kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kabid Perencanaan, Drs. Hidayat Wasis, bahwa:

“Tujuan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah untuk memberikan bantuan kepada sekolah dalam rangka membebaskan iuran siswa, akan tetapi dengan catatan sekolah penerima bantuan tetap dapat mempertahankan mutu pelayanan pendidikan kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditentukan.” (*wawancara: Jum’at, 8 Juni 2012*)

Ditambahkan pula oleh Drs. Hidayat Wasis, adapun sasaran program BOS sebagaimana telah ditetapkan Petunjuk Teknis yang dirumuskan tingkat pusat adalah semua sekolah pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) baik negeri atau swasta.

2) Pemberian Bantuan Melalui Program Lainnya

Di luar BOS yang telah menjadi kebijakan pemerintah pusat dalam rangka mempercepat target penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun pada umumnya, dan membantu meringankan beban bagi anak dari keluarga miskin pada khususnya, untuk maksud dan sasaran yang sama, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar sejak tahun 2005 telah melaksanakan program Bantuan Siswa Miskin (BSM), yang penyalurannya ditangani langsung oleh pusat dan daerah.

Selanjutnya untuk lebih mempermudah dan mempercepat akses penyaluran dana BSM, maka pada tahun anggaran 2012 sebagian besar pengalokasian dana BSM disalurkan dengan dekonsentrasi, sisanya dilakukan oleh pusat, yang pelaksanaannya berpedoman empat asas, yaitu: efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.

Pengertian dari BSM itu sendiri adalah bantuan/subsidi dari pemerintah berupa sejumlah uang tunai yang diberikan secara langsung kepada siswa sekolah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu siswa yang duduk di SD dan SMP baik negeri maupun swasta, yang pada tahun ajaran 2012/2013 yang dibuktikan dengan raport. Dimana, siswa miskin yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan anaknya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Sekolah dimana anak tersebut bersekolah. Dan lembaga yang menyalurkan dana BSM di daerah adalah PT. Pos Indonesia (Persero). Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kasi Kesiswaan TK/SD, Dra. Eko Lindartin, bahwa:

“BSM adalah bantuan/subsidi dari pemerintah berupa sejumlah uang tunai yang diberikan secara langsung kepada siswa sekolah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.” (wawancara: *Senin, 4 Juni 2012*)

d) Sosialisasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Kegiatan sosialisasi ini ditujukan dalam rangka meyakinkan akan arti pentingnya pelaksanaan kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun agar bisa dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Disadari bahwa selama ini memang tidak sedikit masyarakat yang kurang paham atau tidak mengerti sama sekali akan arti pentingnya pelaksanaan kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

Oleh karena itu perlu diadakan kegiatan sosialisasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang diharapkan mampu menambah wawasan masyarakat terhadap arti pentingnya pelaksanaan kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh salah satu Staf Perencanaan, Drs. Hendi Septo, bahwa:

“Agar seluruh masyarakat paham akan arti pentingnya pelaksanaan kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, maka perlu diadakan kegiatan sosialisasi.” (*wawancara: Jum’at, 8 Juni 2012*)

Ditambahkan pula oleh beliau, bahwa:

“Singkatnya, melalui kegiatan sosialisasi semua informasi mengenai kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun bisa tersampaikan. Dampak lebih jauhnya, melalui kegiatan sosialisasi dukungan masyarakat terhadap implementasi kebijakan bisa diwujudkan.” (*wawancara: Jum’at, 8 Juni 2012*)

b. Pelaksanaan Program Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

a) Program Peningkatan Akses Pendidikan

1) Peningkatan Akses Melalui SD/SMP Seatap

Program SD/SMP Seatap ini bisa dikembangkan hanya dengan menggunakan bangunan SD yang ada sehingga tidak memerlukan biaya pembangunan fisik. Bahkan karena diselenggarakan di daerah terpencil, kehadiran SD/SMP Seatap ini mampu mendekatkan pelayanan pendidikan dasar kepada masyarakat atau anak yang berada pada kantong-kantong *drop out* tingkat SLTP. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kasi Sarana dan Prasarana SMP, Drs. Faizin, bahwa:

“Program SD/SMP Seatap ini bisa dikembangkan hanya dengan menggunakan bangunan SD yang ada sehingga tidak memerlukan biaya pembangunan fisik, dan jauh lebih efisien.” (*wawancara: Selasa, 5 Juni 2012*)

Menurut pandangan peneliti, kegiatan SD/SMP Seatap ini mengandung inovasi yang penting bagi dunia pendidikan, khususnya pendidikan dasar bagi anak dari keluarga miskin. Secara nyata, kegiatan ini telah mampu mendekatkan akses pendidikan dasar kepada masyarakat sehingga memudahkan siswa menjangkau lokasi belajar yang selama ini dirasakan cukup jauh. Hal ini pun membuat masyarakat lebih ringan dalam hal beban biaya transportasi dari rumah ke sekolah, jalan kaki tidak terlalu jauh, naik angkutan umum pun tidak terlalu mahal.

Selanjutnya, selain inovatif, kegiatan SD/SMP Seatap ini juga bisa dikatakan efektif dan efisien. Kegiatan ini cukup memanfaatkan sarana prasarana milik SD setempat, tenaga pengajarnya pun diambil dari sekitar sekolah SD/SMP Seatap tersebut. Siswa yang menjadi muridnya pun tidak harus pakaian seragam sekolah yang selama ini sering menjadi beban bagi anak dari keluarga miskin, meskipun sekolahnya formal. Itulah pula kultur sekolah yang dalam aspeknya menjadi kondusif dalam mendekatkan akses pelayanan pendidikan dasar bagi anak dari keluarga miskin.

Akan tetapi menurut sumber dari Kasi Sarana dan Prasarana SMP, Drs. Faizin, sampai saat ini belum terdapat SD/SMP Seatap yang telah diselenggarakan di Kabupaten Kediri, hal ini dikarenakan pihaknya masih memprioritaskan siswa yang tidak tertampung di sekolah tingkat SLTP untuk dimasukkan di SMP Terbuka, SMP Kecil maupun Kelas Jauh.

2) Peningkatan Akses Melalui Pembangunan SD/SMP Kecil

Menurut sumber dari Kasi Sarana dan Prasarana SMP, Drs. Faizin, ditambahkan pula oleh Kasi Sarana dan Prasarana SD, Drs. Sholeh, sampai tahun 2012 saat ini sampai tahun 2012 saat ini sudah terdapat 4 SD Kecil dan 3 SMP Kecil yang telah berhasil dikembangkan, dengan satu rombongan belajar yang rata-rata kurang dari 10 siswa. Diharapkan keberadaan SD/SMP Kecil tersebut, bisa membantu anak-anak yang berdomisili di wilayah terpencil dapat tersentuh pelayanan pendidikan, khususnya pendidikan dasar.

3) Peningkatan Akses Melalui SMP Terbuka

Kehadiran jenis satuan pendidikan yang merupakan salah satu kebijakan yang berasal dari pemerintah pusat ini sengaja dikembangkan di Kabupaten Kediri dengan maksud untuk memenuhi tuntutan layanan pendidikan dasar yang tidak tertampung pada SLTP reguler yang umumnya merupakan anak dari keluarga yang tidak mampu, disamping untuk menampung anak lainnya yang kebetulan bertempat tinggal jauh dari lokasi SLTP yang tersedia. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kasi Sarana dan Prasarana SMP, Drs. Faizin, bahwa:

“SMP Terbuka sengaja dikembangkan dengan maksud untuk memenuhi tuntutan layanan pendidikan dasar yang tidak tertampung pada SLTP reguler yang umumnya merupakan anak dari keluarga yang tidak mampu, disamping untuk menampung anak lainnya yang kebetulan bertempat tinggal jauh dari lokasi SLTP yang tersedia.” (*wawancara: Selasa, 5 Juni 2012*)

Lebih jauh diungkapkan, oleh Drs. Faizin, kehadiran SMP Terbuka juga sengaja dikembangkan untuk memenuhi tuntutan pelayanan pendidikan dasar bagi anak yang karena kemiskinannya, sebut saja karena harus banyak membantu beban ekonomi keluarganya, terpaksa tidak memiliki banyak kesempatan untuk

mengikuti pendidikan dasar pada sekoah reguler. Adanya fleksibilitas dalam cara belajar siswa, cara belajar mandiri yang memungkinkan siswa tetap bisa memnbantu pekerjaan orang tuanya, adalah hal lain yang dinilai sangat efektif dalam rangka memperluas akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin.

Namun diakui juga bahwa besarnya kontribusi secara kuantitatif yang disumbangkan SMP Terbuka ini, tidak berarti bahwa kehadiran satuan pendidikan ini tidak memiliki masalah dan kendala. Masalah mutu yang ditandai dengan rendahnya mutu lulusan, merupakan salah satu masalahnya. Bahkan dari pross belajar mengajar dengan keterbatasan tenaga dan sarananya, termasuk kondisi sosial ekonomi para muridnya, yakni anak dari keluarga miskin dengan karakteristiknya yang begitu kompleks, merupakan masalah lain yang dihadapi dalam pengembangan SMP Terbuka.

Sumber yang didapat peneliti dari Kasi Sarana dan Prasarana SMP, sampai pada tahun 2012 ini ada 7 SMP Terbuka yang telah berhasil dikembangkan dibeberapa wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Kediri. Dimana jumlah tersebut berkurang 5 lembaga dari jumlah sekolah yang terdapat pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu yang awalnya berjumlah 12 lembaga. Berkurangnya jumlah lembaga tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Kasi Sarana dan Prasarana SMP, Drs. Faizin, hal tersebut dikarenakan karena sedikitnya atau hampir tidak ada yang berminat bersekolah di SMP Terbuka tersebut. Pada tahun 2012 ini, jumlah keseluruhan siswa yang mengikuti pendidikan di jalur SMP Terbuka terdapat 613 anak. Jumlah yang tidak banyak memang, akan tetapi dengan adanya jalur pendidikan SMP Terbuka ini setidaknya telah memberikan kontribusi terhadap

akses pelayanan pendidikan bagi anak dari keluarga miskin yang tidak dapat mengikuti jalur pendidikan di SMP reguler.

4) Peningkatan Akses Melalui Kelas Jauh

Sumber dari Kasi Sarana dan Prasarana SMP, sampai pada tahun 2012 ini terdapat 3 SMP Kelas Jauh yang sudah berhasil dikembangkan, yaitu terdapat di Kecamatan Semen, Kecamatan Mojo dan Kecamatan Tarokan. Tetapi dijelaskan oleh Kasi Sarana dan Prasarana TK/SD, Drs. Sholeh, bahwa untuk program Kelas Jauh ini lebih diprioritaskan untuk SMP. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh beliau, bahwa:

“Untuk program Kelas Jauh ini lebih diprioritaskan untuk SMP, hal ini dikarenakan hampir semua desa yang ada di tiap-tiap kecamatan sudah memiliki SD, lain halnya dengan SMP yang tidak seluruh desa ada.”
(wawancara: Senin, 5 Juni 2012)

Dengan adanya program SMP Kelas Jauh ini, anak usia SLTP yang selama ini tidak bisa mengakses pendidikan karena terkendala oleh jauhnya sekolah dengan domisili rumahnya, maka dengan adanya SMP Kelas Jauh ini diharapkan dapat mempermudah anak-anak tersebut untuk mendapatkan akses pelayanan pendidikan, sehingga dapat meningkatkan animo anak-anak untuk bersekolah.

5) Peningkatan Akses Melalui Jalur SLB (SDLB dan SMPLB)

Sumber dari Kasi Sarana dan Prasarana TK/SD, sampai pada tahun 2012 ini, sudah terdapat 10 lembaga SDLB yang sudah berhasil dikembangkan, yaitu terdiri dari 1 SDLB negeri dan 9 SDLB yang dikelola oleh swasta. Dengan jumlah total siswa sebanyak 344 anak, diantaranya 63 siswa yang bersekolah di SDLB negeri, dan sisanya sebanyak 281 anak yang mengikuti pendidikan di SDLB swasta. Selanjutnya, sumber dari Kasi Sarana dan Prasarana SMP, sampai pada tahun

2012 ini, terdapat 7 lembaga SMPLB yang sudah berhasil dikembangkan, yaitu SMPLB yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Kediri, dimana seluruh SMPLB tersebut kesemuanya berstatus negeri. Adapun jumlah keseluruhan siswa yang mengikuti pendidikan di SMPLB, adalah sebanyak 103 anak. Meskipun bukan jumlah yang banyak, akan tetapi dengan adanya jalur pendidikan SLB (SDLB dan SMPLB) setidaknya turut memberikan kontribusi terhadap pelayanan pendidikan dasar, khususnya bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus.

6) Peningkatan Akses Melalui Jalur Pendidikan Non Formal

Seperti diungkapkan oleh Kabid Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Drs. Sujud Winarko, sejak tahun 1994 yang lalu, persisnya sejak Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pertama kali mulai banyak diangkat dan digalakkan, banyak upaya yang telah dan sedang dilakukan Bidang PLS dalam mendukung upaya penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun selama ini.

Wujud konkritnya, jumlah kelompok maupun warga belajar yang aktif berpartisipasi mengikuti program pendidikan kesetaraan, baik untuk jenjang SD (Kejar Paket A) maupun SMP (Kejar Paket B) yang diharapkan bisa membantu mempercepat sukses Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, dari tahun ke tahunnya terus mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut terjadi tidak saja karena didukung oleh adanya kebijakan pusat yang memang banyak mendukung, termasuk dukungan anggarannya, tetapi juga oleh adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Kediri sendiri, termasuk komitmen sektor lain yang terkait.

Data dari sumber yang didapat peneliti, sampai tahun 2012 ini terdapat 9 lembaga Kelompok Belajar (Kejar) Paket A dan juga 25 lembaga Kejar Paket B. Dengan warga belajar yang masing-masing berjumlah 206 untuk Kejar Paket A dan 1044 Kejar Paket B. Jika dikaitkan dengan kontribusi pendidikan non formal, dalam menyerap akses pendidikan anak usia 7-15 tahun, dengan jumlah anak usia 7-15 tahun sebesar 186.458, maka prosentase penyerapannya adalah sebesar 0,67 persen. Dan juga prosentase penyerapan terhadap jumlah total siswa SD/SMP adalah sebesar 0,61 persen, dengan jumlah total siswa SD/SMP yaitu sebesar 204.887. Dengan kecilnya angka prosentase tersebut, menunjukkan bahwa masih sedikitnya kontribusi pendidikan non formal ini.

Namun lepas dari semua masalah itu, dari hasil kajian peneliti bahwa kehadiran program kesetaraan ini, tetap memiliki kontribusi dalam akselerasi penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Paling tidak Program Luar Sekolah ini telah berhasil mengurangi jumlah anak usia 7-15 tahun yang tidak bisa mengakses pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal.

b) Program Peningkatan Daya Tampung

1) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)

Sumber dari Kasi Sarana dan Prasarana TK/SD sampai pada tahun 2012 ini, sudah terdapat kurang lebih 10 Unit Sekolah Baru (USB) SD yang sudah dibangun. Untuk USB SMP sampai pada tahun 2012 ini memang belum ada yang terealisasi, tetapi seperti yang dikemukakan oleh Kasi Sarana dan Prasarana SMP, Drs. Faizin, namun dalam waktu dekat ini akan dibangun beberapa USB. Dimana hal tersebut ditandai dengan sudah ditunjuknya sponsor yang akan menangani

pembangunan USB tersebut. Diharapkan jika nantinya pembangunan USB tersebut sudah terealisasi, USB tersebut bisa menampung ana-anak yang selama ini belum tertampung di bangku sekolah.

2) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)

Data yang diperoleh peneliti dari Kasi Sarana dan Prasarana TK/SD dan juga Kasi Sarana dan Prasarana SMP, di tahun 2012 ini, untuk tingkat SD terdapat 9 Ruang Kelas Baru (RKB) yang dibangun untuk 9 lembaga yang mendapat bantuan. Dimana pendanaannya bersumber dari APBD. Sedangkan untuk tingkat SMP terdapat 25 RKB yang dibangun untuk 14 lembaga. Dan sumber pendanaannya berasal dari APBN. Adanya penambahan ruang kelas ini, tentunya sangat berdampak banyak terhadap peningkatan daya tampung. Dengan asumsi bahwa 1 RKB mempunyai kapasitas daya tampung siswa sebanyak 40 anak, maka untuk tingkat SD sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa pada tahun 2012 ini terdapat 9 RKB yang sudah berhasil dibangun, maka terdapat penambahan kapasitas daya tampung sebanyak 360 anak. Sedangkan untuk jenjang SMP, dimana jumlah total RKB yang dibangun adalah sebanyak 25 RKB, maka untuk penambahan kapasitas daya tampung adalah sebanyak 1.000 anak. Tentunya dengan adanya pembangunan RKB tersebut sangat banyak membantu anak-anak yang selama ini belum tertampung di bangku sekolah. Dimana hal tersebut dibuktikan dengan jumlah penambahan kapasitas daya tampung yang cukup banyak, seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

3) Rehabilitasi Ruang Kelas

Menurut sumber dari Kasi Sarana dan Prasarana TK/SD, pada tahun 2012 ini terdapat 60 ruang kelas dari 21 lembaga yang sudah direhabilitasi dengan sumber pendanaan dari APBN sebesar 90% dan APBD 10%. Selain itu juga telah direhabilitasi sebanyak 807 ruang kelas dari 281 lembaga yang pendanaanya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Sementara itu rehabilitasi yang dananya bersumber dari DID juga sudah terealisasi sebanyak 123 ruang kelas dari 35 lembaga yang mendapatkan bantuan.

Data rehabilitasi ruang kelas untuk tingkat SMP, menurut sumber dari Kasi Sarana dan Prasarana SMP, pada tahun 2012 ini sudah terdapat 19 ruang kelas yang direhabilitasi, dari 3 lembaga yang mendapat bantuan yaitu 2 SMP negeri dan 1 SMP swasta, dengan sumber pendanaan dari APBN. Dengan adanya program rehabilitasi ruang kelas ini, diharapkan ruang kelas yang dalam kondisi rusak, baik rusak ringan maupun rusak berat dapat segera diperbaiki, sehingga kedepannya tidak ada siswa sekolah yang karena disebabkan oleh kondisi ruang kelas yang rusak tidak dapat mengikuti pelajaran. Dengan kata lain tidak ada proses belajar mengajar yang terganggu yang diakibatkan oleh rusaknya ruang kelas.

c) Program Bantuan Pembiayaan Bagi Anak dari Keluarga Miskin

1) Pemberian Bantuan Melalui Program BOS

Seperti tertera dalam buku petunjuk teknisnya, pemerintah menggulirkan bantuan yang bernama BOS yang dimulai pada tahun 2005 ini adalah untuk menanggulangi secara bertahap pemenuhan Biaya Satuan Pendidikan (BSP) yang

diperlukan untuk menunjang proses belajar mengajar sesuai dengan standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan. BSP ini terdiri dari biaya investasi, yaitu biaya untuk menyediakan sumber daya tidak habis pakai yang dapat digunakan lebih dari setahun (misalnya untuk pengadaan tanah, bangunan, perabot kantor) dan biaya operasional yaitu biaya yang dipergunakan untuk menyediakan sumber daya yang habis pakai yang mencakup biaya personil dan non personil.

Unit *cost* BOS yang ditetapkan untuk siswa pertahun untuk tingkat SD/MI sebesar Rp. 580.000,- dan untuk tingkat SMP/MTs sebesar Rp. 710.000,-. Paling tidak, demikian diungkapkan oleh salah seorang Staf Perencanaan, Drs. Hendi Septo, bahwa besarnya jumlah dana BOS tersebut telah banyak membantu beban banyak sekolah pinggiran yang sebelumnya sering dihadapkan kepada besarnya beban operasional sekolah karena tidak sedikit anak dari keluarga miskin yang tidak mampu membayar iuran sekolah. Jika dulu pihak sekolah sering dihadapkan pada banyak kesulitan karena banyak anak dari keluarga miskin yang tidak bisa membayar iuran sekolah, kini masalahnya teratasi karena ada bantuan BOS.

2) Pemberian Bantuan Melalui Program Lainnya

Sasaran BSM-SD adalah siswa SD yang pada tahun pelajaran 2012/2013 masih berstatus sebagai siswa sekolah dasar kelas I s/d V, sedangkan sasaran BSM-SMP adalah siswa SMP yang pada tahun ajaran 2012/2013 masih berstatus sebagai siswa SMP kelas 7 s/d 9. Dengan perincian sebagai berikut, dana bantuan siswa yang diterima oleh setiap siswa SD sebesar Rp. 360.000,-/tahun. Sedangkan untuk siswa SMP kelas 7 dan 8 sebesar Rp. 550.000,-/tahun, sedangkan untuk kelas 9 sebesar Rp. 275.000,-/6 bulan (Januari-Juni). Penggunaan dana BSM-

SD/SMP bagi siswa jenjang SD/SMP untuk keperluan pendukung biaya pendidikan, khususnya: pembelian peralatan sekolah; pembelian baju seragam sekolah, pramuka dan olahraga; dan juga untuk biaya transportasi ke sekolah dan uang saku. Diharapkan dengan adanya program Bantuan Siswa Miskin yang digulirkan oleh pemerintah dapat membantu keperluan biaya pendidikan siswa yang selama ini sering menjadi kendala yang dialami oleh anak dari keluarga miskin.

d) Sosialisasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Menurut penjelasan salah satu Staf Perencanaan, Drs. Hendi Septo, terdapat beberapa kegiatan strategis yang telah dirumuskan dalam rangka melaksanakan langkah sosialisasi kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun tersebut.

Yang pertama, adalah sosialisasi yang dilakukan melalui kegiatan pertemuan atau rapat dinas antara jajaran pimpinan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kediri dengan para Kepala Cabang Dinas yang diselenggarakan secara rutin setiap bulan. Melalui forum itulah, kinerja masing-masing Tim Koordinasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar tingkat kecamatan, bahkan desa dievaluasi, dibahas dan diumpunbalikan. Tidak sampai di situ, melalui forum itulah pula berbagai masalah dan kendala yang muncul dalam proses sosialisasi diangkat dan dipecahkan.

Yang kedua, sosialisasi melalui berbagai media lain, khususnya media cetak yaitu poster. Melalui poster inilah seluruh kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar yang telah dirumuskan disosialisasikan untuk dapat membantu dan mendukung implementasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

c. Hasil Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9

Tahun bagi Anak dari Keluarga Miskin

Meskipun masih terdapat masalah dan kendala yang belum terpecahkan, namun tidak sedikit indikator bisa diangkat untuk menjelaskan beberapa keberhasilan yang dicapai dari pelaksanaan Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun bagi anak dari keluarga miskin selama ini.

a) Keberhasilan Meningkatkan Akses Pelayanan

Di bawah ini adalah data yang bisa diangkat untuk menjelaskan berbagai intervensi kebijakan atau program yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kediri dalam meningkatkan akses pelayanan pendidikan bagi seluruh anak usia 7-15 tahun pada umumnya, dan anak dari keluarga miskin pada khususnya:

Tabel 17. Daya Tampung Lembaga Pendidikan dalam Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

URAIAN	TAHUN				
	2007	2008	2009	2010	2011
Jml Anak Usia 7-15 Tahun (Usia Wajib Dikdas)	222.171	225.524	222.005	204.643	204.887
Jml Total Anak Usia 7-15 Tahun yang tertampung	202.980	186.240	188.911	185.453	186.458
Jml Anak Usia 7-15 Tahun yang Belum/Tidak Tertampung	19.191	39.284	33.094	19.190	18.429
Prosentase Anak yang Tidak Tertampung	9,45	21,09	17,51	10,35	9,88

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Kediri

Dari tabel di atas nampak bahwa prosentase jumlah anak usia Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang tidak tertampung dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan, meskipun pada tahun 2007 ke tahun 2008 prosentasenya

mengalami kenaikan, namun pada tahun berikutnya yaitu tahun 2008-2011 terjadi penurunan secara signifikan.

b) Peningkatan Angka Melanjutkan Sekolah

Sebagai bahan evaluasi, di bawah ini disampaikan pula tabel yang menunjukkan trend peningkatan Angka Melanjutkan Sekolah dari Tingkat SD/MI ke tingkat SLTP sekaligus merupakan indikator lain yang bisa diangkat untuk menjelaskan bahwa tidak sedikit hasil yang dicapai dalam implementasi percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun selama ini.

Tabel 18. Trend Angka Melanjutkan Sekolah SD/MI ke Jenjang SLTP

TAHUN PELAJARAN	JUMLAH LULUSAN	MELANJUTKAN	% MELANJUTKAN
2006/2007	23.694	20.684	87,29
2007/2008	21.936	20.630	94,05
2008/2009	21.936	20.680	94,27
2009/2010	22.912	22.173	96,77
2010/2011	21.847	21.262	97,32

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Kediri

Dari tabel di atas nampak bahwa walaupun setiap tahunnya belum seluruh lulusan SD/MI bisa melanjutkan, namun angka melanjutkan sekolah dari tingkat SD/MI ke tingkat SLTP dari periode lima tahun meningkat dari 20.684 siswa pada tahun ajaran 2006/2007 menjadi 21.262 siswa pada tahun ajaran 2010/2011, atau dari 87,29 persen menjadi 97,32 persen.

Itu semua menjadi isyarat kuat bahwa meskipun prosentase yang melanjutkan sekolah cenderung meningkat setiap tahunnya, tetapi sesungguhnya masih begitu berat tantangan yang dihadapi dalam program penuntasan Wajib Belajar

Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Kediri ini. Dan hampir bisa dipastikan bahwa sebagian besar, walaupun tidak seluruhnya yang tidak melanjutkan sekolah itu adalah anak dari keluarga miskin dengan karakteristiknya yang begitu kompleks.

c) Peningkatan Angka Partisipasi

Merujuk kepada salah satu ukuran yang secara umum sering digunakan dalam mengevaluasi pembangunan di bidang pendidikan, inilah indikator penting lain yang bisa diangkat untuk menggambarkan keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun bagi anak dari keluarga miskin selama ini. Persisnya di bawah ini adalah trend angka partisipasi sekolah, baik Angka Partisipasi Kasar (APK) maupun Angka Partisipasi Murni (APM) yang bisa diangkat untuk menjelaskan keberhasilan implementasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada jenjang SD/MI sebagai berikut:

Tabel 19. Perkembangan Penduduk, Siswa dan Angka Partisipasi Sekolah pada Jenjang Pendidikan SD/MI

No	KOMPONEN	Tahun Pelajaran				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Jml Penduduk 7-12 Tahun	145.901	146.801	146.921	133.555	135.442
2	Jml Total Siswa SD/MI	153.055	151.393	150.968	147.403	148.652
3	Jml Total Siswa Usia 7-12 Tahun	134.855	138.672	141.788	132.572	134.616
4	APK SD/MI	104,93	103,16	102,78	110,37	109,99
5	APM SD/MI	92,43	94,46	96,51	99,26	99,46

Dari tabel di atas nampak bahwa meskipun pernah mengalami penurunan pada tahun 2009 dan 2011, namun secara umum Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang pendidikan dasar (SD/MI) menunjukkan trend peningkatan yang cukup berarti. Itu semua mengandung arti bahwa implementasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada jenjang SD/MI yang dilaksanakan selama ini cukup efektif dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah.

Trend yang sama juga terjadi pada Angka Partisipasi Murni (APM) yang mengalami peningkatan dari 92,43 persen pada tahun 2007 menjadi 99,46 pada tahun 2011. Itu semua mengandung arti bahwa implementasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada jenjang SD/MI sudah menunjukkan keberhasilan yang cukup meyakinkan.

Tabel 20. Perkembangan Penduduk, Siswa dan Angka Partisipasi Sekolah pada Jenjang Pendidikan SMP/MTs

No	KOMPONEN	Tahun Pelajaran				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Jml Penduduk 13-15 Tahun	76.270	78.723	75.084	71.088	69.545
2	Jml Total Siswa SMP/MTs	59.470	61.779	61.246	64.997	64.327
3	Jml Total Siswa Usia 13-15 Tahun	46.278	47.568	47.123	52.881	51.842
4	APK SMP/MTs	77,97	81,84	83,67	90,40	94,00
5	APM SMP/MTs	61,51	62,58	65,14	75,58	74,54

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Kediri

Dari tabel di atas nampak bahwa implementasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Kediri telah menunjukan hasil yang memuaskan karena telah mampu meningkatkan angka partisipasi secara signifikan. Angka

Partisipas Kasar (APK), misalnya, meningkat dari 77,97 persen pada tahun 2007 meningkat menjadi 94,00 persen pada tahun 2011, atau peningkatan sebesar 16.03 point persen dalam kurun waktu lima tahun.

Absolutnya, angka anak yang ada di bangku sekolah jenjang SLTP meningkat dari 59.470 anak pada tahun 2007 menjadi 64.327 anak pada tahun 2011, atau penambahan sebanyak 4.857 anak dalam periode lima tahun. Padahal dalam kurun waktu yang sama jumlah penduduk usia 13-15 tahun berkurang sebanyak 6.725 anak, termasuk di dalamnya adalah anak yang kendati usianya sudah melebihi 15 tahun tetapi masih duduk dibangku sekolah jenjang SLTP. Hal tersebut memang menunjukkan bahwa APK meningkat secara tajam.

Hal yang sama juga terjadi pada peningkatan Angka Partisipasi Murninya (APM). Persisnya jumlah anak usia 13-15 tahun yang berada pada bangku sekolah jenjang SLTP meningkat dari 46.278 anak pada tahun 2007 menjadi 51.842 anak pada tahun 2011, atau naik 5.564 anak sealam periode lima tahun.

Seperti juga terlihat pada angka partisipasi tingkat SD/MI, terdapat pencapaian antara APK dan APM. Dimana APK lebih tinggi daripada APM. Itu semua menunjukan bahwa sebagian diantara anak yang selama ini aktif berada pada bangku SLTP, adalah mereka yang umurnya di luar 13-15 tahun.

Tabel 21. Pencapaian Angka Partisipasi Sekolah

NO	INDIKATOR	POSISI 2007	TARGET 2011	PENCAPAIAN 2011	KETERANGAN
1	APK SD/MI	104,93	108,09	109,99	Lebih 1,9 point persen dibanding target
2	APM SD/MI	92,43	99,50	99,46	Minus 0,04 point persen dibanding target

3	APK SMP/MTs	77,97	92,70	94,00	Lebih 1,3 point persen dibanding target
4	APM SMP/MTs	61,51	-	74,54	-

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kab. Kediri

Apa yang bisa ditegaskan dari tabel di atas adalah bahwa implementasi Kebijakan Wajar Pendidikan Dasar 9 Tahun selama ini telah menunjukkan hasil yang efektif yang antara lain ditandai dengan adanya peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan juga Angka Partisipasi Murninya (APM). Dan yang lebih membanggakan adalah angka pencapaiannya yang melebihi target, hal tersebut terlihat dari APK SMP/MTs yang melebihi dari target yang diharapkan sebelumnya. Lain halnya dengan proyeksi capaian untuk APK SD/MI, meskipun menunjukkan angka yang tinggi dari target pencapaian, namun sebenarnya target untuk APK SD/MI tersebut diupayakan menurun, hal tersebut dikarenakan memperhatikan perkembangan penduduk usia 7-12 tahun dalam kurun waktu tahun 2007-2009, yang menunjukkan penurunan, sebaliknya pencapaian target APM-nya diupayakan meningkat. Hal ini mengingat bahwa orientasi pembangunan pendidikan SD/MI saat ini diarahkan ke pengembangan mutu, karena memang pada tingkat SD/MI Wajib Belajar Pendidikan Dasar telah mencapai ketuntasan.

Untuk APM SD/MI menunjukkan angka sebenarnya kurang sedikit lagi sudah bisa melebihi target, yaitu hanya minus 0,04 dari target yang diharapkan. Tetapi hal tersebut sudah dapat dikatakan memuaskan. Dan tentu saja ini prestasi yang membanggakan yang dapat diraih oleh si pelaku kebijakan, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kediri beserta jajarannya.

Singkatnya, meskipun implementasi Kebijakan Wajib Pendidikan Dasar 9 Tahun melalui berbagai bentuk programnya telah berhasil menyentuh dan sekaligus membantu meningkatkan akses anak dari keluarga miskin dalam mengakses pendidikan dasar sebagai bagian dari haknya, namun masih banyak di antara mereka yang karena kemiskinan dengan karakteristiknya yang begitu kompleks itu ternyata belum tersentuh. Karenanya, efektifitas implementasi kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun selama ini layak dipersoalkan, atau paling tidak dipertanyakan.

Tegasnya, selama ini pemerintah, melalui kebijakan-kebijakannya, telah memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh anak, termasuk anak dari keluarga miskin untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan dasarnya. Namun karena keterbatasan-keterbatasan yang dimilikinya, pemerintah belum mampu memenuhi semua tuntutan dan kebutuhan pendidikan mereka sehingga aspek efektivitas kinerja kebijakan masih menyisakan banyak beban dan garapan.

8. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun bagi Anak dari Keluarga Miskin

Uraian berikut akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang akan menentukan keberhasilan implementasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar sekaligus merupakan indikator dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung implementasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun pada khususnya.

a. Faktor Pendukung

Terdapat beberapa faktor yang menjadi faktor pendukung dalam proses implementasi kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun bagi anak dari keluarga miskin di Kabupaten Kediri. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah dukungan sarana, prasarana dan juga yang paling banyak memberikan kontribusi dalam penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun itu sendiri adalah ketersediaan dana, dalam hal ini adalah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Kabid Perencanaan, Drs. Hidayat Wasis, bahwa:

“Yang menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, antara lain adalah dukungan sarana, prasarana, serta ketersediaan dana BOS yang memberikan kontribusi besar dalam penuntasan implementasi kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun selama ini.” (*wawancara: Jum’at, 8 Juni 2012*)

Dijelaskan pula oleh, Drs. Hidayat Wasis, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai serta ketersediaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memberikan kontribusi yang sangat besar demi kesuksesan penuntasan implementasi kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun selama ini, hal ini bisa dibayangkan jika selama ini tidak ada sarana dan prasarana seperti gedung-gedung sekolah beserta fasilitas yang memadai dan juga ketersediaan tenaga pengajar, maka tidak mungkin kesuksesan penuntasan implementasi kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun bisa tercapai. Maka dari itu, kedepannya diharapkan ketersediaan sarana dan prasarana harus bisa lebih ditingkatkan lagi, jangan sampai prestasi yang telah diraih oleh Kabupaten Kediri dalam rangka

implementasi penuntasan kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun bisa menurun.

Selanjutnya, masih menurut Drs. Hidayat Wasis, bahwa dukungan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memegang peran penting dalam kesuksesan penuntasan implementasi kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, disamping dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Dimana dana BOS itu sendiri banyak membantu siswa dalam mengakses pelayanan pendidikan dasar, khususnya membantu siswa yang berasal dari keluarga miskin. Seperti yang kita ketahui, bahwa selama ini yang sering kali menjadi problem pendidikan bagi anak dari keluarga miskin adalah kendala biaya, tidak jarang karena masalah biaya tersebut menyebabkan si anak putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dengan adanya biaya BOS sangat membantu anak-anak dari keluarga miskin untuk tetap bisa mengakses pelayanan pendidikan, dan tentu saja hal ini dapat mendukung kesuksesan penuntasan implementasi kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam implementasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun bagi anak dari keluarga miskin itu sendiri sebenarnya adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat akan arti pentingnya pendidikan. Faktor tersebut hadir menjadi kendala utama dalam upaya penuntasan implementasi kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Kabid Perencanaan, Drs. Hidayat Wasis, bahwa:

“Sebenarnya yang menjadi faktor penghambat dalam upaya penuntasan implementasi kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun adalah

faktor kesadaran, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan. Dimana hal tersebut selama ini menjadi kendala utama yang hadir dalam upaya penuntasan implementasi kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.” (wawancara: *Jum'at, 8 Juni 2012*)

Selanjutnya, ditambahkan pula oleh Drs. Hidayat Wasis, dengan pola berpikir masyarakat yang cenderung tidak mementingkan akan arti pentingnya pendidikan mengakui pihaknya masih merasa kesulitan dalam penuntasan implementasi kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Diakuinya, bahwa meskipun selama ini pihaknya yaitu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kediri beserta jajaran yang terlibat telah berhasil mensukseskan penuntasan implementasi kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dari target yang diharapkan, tetapi diakui bahwa memang selama ini masih terdapat anak-anak yang putus sekolah dan yang tidak melanjutkan sekolah, bahkan ada yang sama sekali belum mengenyam pendidikan. Hal ini terkait dengan kurangnya kesadaran dari masyarakat sendiri akan arti pentingnya pendidikan.

Berikut ini potret dari sebagian anak yang pada saat dilakukan penelitian belum banyak tersentuh dengan kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Dalam uraian berikut ini akan diangkat sejumlah kasus dari anak dari keluarga miskin, yakni anak yang pada saat diteliti belum tersentuh dengan kebijakan yang dilaksanakan. Melalui deskripsi ini, gambaran ketidaksesuaian mengenai layanan pendidikan dasar yang diberikan pemerintah dengan tuntutan atau kebutuhan anak dari keluarga miskin bisa diangkat dan dikaji. Dan disitulah pula efektivitas kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang dilaksanakan selama ini bisa dikaji dan dievaluasi lebih dalam lagi. Banyak sekali faktor yang selama ini hadir menjadi alasan seorang anak tidak melanjutkan

sekolah, kendatipun pemerintah, melalui kebijakan-kebijakannya, telah berupaya mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, khususnya layanan pendidikan dasar 9 tahun.

Contohnya, adalah Lukas yang beralamat di Desa Wonokerto Kecamatan Plemahan ini terpaksa meninggalkan bangku sekolah. Alasannya dia cenderung memilih untuk bekerja ketimbang kembali bersekolah ke sekolah yang jaraknya sebenarnya tidak jauh dari rumahnya. Bahkan orang tua Lukas sendiri mengetahui kalau penyelenggaraan pendidikan dasar di daerahnya tersebut, melalui program BOS-nya telah dibebaskan dari segala bentuk iuran alias gratis. Di sini, masalah biaya sekolah, khususnya biaya langsung (*direct cost*) bukanlah merupakan masalah utama karena ada faktor lain yang selama ini menjadi kendala bagi anak miskin dalam mengakses pendidikan.

Dari hasil penelitian terungkap juga bahwa beban berat hidup keluarga dengan segala dampak psikologisnya terhadap sikap dan perilaku anak yang diperkuat dengan miskinnya kesadaran orang tua akan arti pentingnya pendidikan hadir menjadi penyebab dominan anak bernama Haroyo yang beralamat di Desa Senowo Kecamatan Kepung yang memiliki ayah hanya sebagai buruh tani terpaksa untuk meninggalkan bangku sekolah.

Apa yang dialami Haroyo juga dialami oleh Bagus, anak dari seorang ayah yang hanya memiliki pekerjaan sopir dan ibunya sebagai pembantu rumah tangga. Persisnya, Bagus yang beralamat di Desa Semanding Kecamatan Pare itu terpaksa harus meninggalkan bangku sekolah lantaran kurang memperoleh perhatian sama sekali dari orang tuanya. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Bagus, bahwa:

“Saya terpaksa berhenti sekolah karena memang orang tua saya tidak memaksa saya untuk terus melanjutkan sekolah. Orang tua saya cuek saja, mau saya sekolah atau tidak terserah saya saja katanya.” (wawancara: Senin, 11 Juni 2012)

Seperti dialami keluarga Bagus, maka beban berat ekonomi keluarga serta kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan hadir menjadi faktor penyebab si anak harus meninggalkan bangku sekolah.

Itulah pula alasan yang banyak dialami oleh anak dari keluarga miskin yang lainnya, Noval yang berasal dari Desa Botorejo Kecamatan Kepung, terpaksa harus meninggalkan bangku sekolah karena merasa kasihan terhadap kondisi ekonomi orang tuanya yang berprofesi sebagai buruh tani itu. Dia mengabaikan ajakan gurunya untuk kembali bersekolah, karena dia memilih untuk bekerja. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Noval, bahwa:

“Alasan saya berhenti sekolah karena saya kasihan lihat orang tua saya. Saya nggak tega lihat mereka kerja buat biayai saya sekolah. Saya pengen bantu mereka bekerja. Meskipun guru saya sering datang ke rumah bujuk saya supaya tetap sekolah tapi saya nggak mau. Saya pengen bekerja saja.” (wawancara: Selasa, 12 Juni 2012)

Di sini masalah motivasi anak dan beban ekonomi keluarga hadir saling memperkuat menentukan sikap anak dan keluarga terhadap pendidikan.

Sangat berbeda dengan yang dialami oleh anak-anak dalam kasus di atas adalah beberapa kasus yang dialami oleh anak di bawah ini. Deby yang beralamat di Desa Kapasan Kecamatan Pare ini, misalnya, terpaksa meninggalkan bangku sekolah bukan karena tidak mendapat dukungan dari orang tuanya, tetapi lebih karena faktor motivasi yang dimiliki anaknya sendiri, dia tetap bersikeras untuk tidak mau melanjutkan. Di sini, kondisi kemiskinan keluarga dengan banyak

dimensinya adalah akar yang menjadi penyebab hilangnya motivasi anak untuk melanjutkan pendidikan.

Hal yang sama juga dialami oleh Febri yang berasal dari Desa Kencong Kecamatan Kepung. Dalam kasus ini meskipun orang tuanya sekaligus gurunya terus mendorong anaknya untuk kembali bersekolah, namun Febri ngotot meninggalkan bangku sekolah karena malas. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan ayah Febri, Bapak Ahmad, bahwa:

“Sudah saya suruh Febri masuk sekolah, tapi anaknya sendiri yang memang tidak mau sekolah, malas katanya. Gurunya juga sudah sering datang ke rumah bujuk Febri, tapi anaknya tetap tidak mau sekolah.” (wawancara: Selasa, 12 Juni 2012)

Singkatnya, bahwa dorongan orang tua bahkan motivasi sang guru saja tidak cukup karena aspek motivasi dan kesadaran anak juga berpengaruh.

Faktor jauhnya jarak antara rumah dengan lokasi sekolah, adalah merupakan salah satu faktor yang selama ini hadir menjadi alasan kenapa masih banyak anak yang putus atau tidak melanjutkan sekolah. Itulah pula yang terutama banyak dialami oleh anak-anak dari keluarga miskin yang tinggal di daerah-daerah terpencil. Hal ini menunjukkan bahwa program-program implementasi kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang selama ini digulirkan pemerintah belum mampu menyentuh dan menjawab persoalan yang dimiliki anak dari keluarga miskin.

Yuda contohnya, Yuda yang beralamat di Desa Senowo Kecamatan Kepung ini memilih untuk meninggalkan bangku sekolah hanya karena jauhnya jarak antara rumahnya dengan sekolah. Dimana, Yuda yang orang tuanya hanya berprofesi sebagai buruh tani ini, mengeluhkan tidak mempunyai alat transportasi

berupa sepeda untuk menjangkau sekolah yang jaraknya jauhnya dengan rumahnya. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan Yuda, bahwa:

“Saya terpaksa berhenti sekolah karena sekolah saya jaraknya jauh dari rumah saya, mau berangkat ke sekolah tapi nggak punya sepeda. Kalau naik angkot juga mahal, bingung saya.” (wawancara: Selasa, 12 Juni 2012)

Faktor psikologis yang ditandai dengan perasaan rendah diri merupakan alasan lain kenapa seorang anak tidak mau melanjutkan sekolah. Itulah yang dialami oleh Utari, yang beralamat di Desa Bogo Kidul Kecamatan Plemahan. Persisnya, Utari yang sudah berusia 17 tahun saat dia baru memasuki bangku kelas 2 SMP ini, kini tidak mau bersekolah lagi atau putus di tengah jalan (*drop out*) yang padahal jarak sekolah hanya sekitar 200 meter dari rumahnya itu karena merasa malu berkait dengan usianya yang sudah melebihi rata-rata usia maksimal SMP. Hal tersebut ditegaskan oleh Ibu Tari orang tua Utari, selain karena faktor usia, Utari juga minder karena cacat yang dimilikinya, yaitu badannya lebih kecil dibandingkan dengan anak-anak seusianya.

Alasan karena orang tuanya ingin menikahkan anaknya, ataupun si anak sendiri yang ingin menikah adalah salah satu faktor lain yang di Kabupaten Kediri cukup berpengaruh terhadap upaya penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Sebuah alasan klasik memang, tetapi kecenderungan ini sesuai dengan budaya yang memang melekat kuat dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Kediri, khususnya yang tinggal di daerah pedesaan pinggiran. Bahwa orang tua banyak yang beranggapan untuk tidak menyekolahkan anak perempuannya ke jenjang yang lebih tinggi.

Seperti halnya yang dialami oleh Tina yang beralamat di Desa Terte Kecamatan Pare, dia terpaksa meninggalkan bangku sekolah karena disuruh menikah oleh orang tuanya. Ayah Tina yang berprofesi hanya sebagai tukang becak, dan ibunya hanya sebagai buruh tani itu menyuruh anaknya menikah lantaran kurang sadaran orang tua akan arti pentingnya pendidikan. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan Tina, bahwa:

“Saya disuruh orang tua saya berhenti sekolah karena saya mau dinikahkan. Kata orang tua saya, anak perempuan gak usah sekolah yang tinggi-tinggi, begitu katanya.” (wawancara: Senin, 11 Juni 2012)

Apa yang dialami oleh banyak anak dari keluarga miskin seperti yang diangkat dari dalam beberapa kasus di atas sesungguhnya hanyalah merupakan representasi saja dari sekian banyak kasus yang sama, atau setidaknya cenderung sama, yang umumnya banyak dialami oleh anak dari keluarga miskin lainnya.

E. Pembahasan

1. Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun bagi Anak dari Keluarga Miskin

Sejak berlakunya UU no.22 Tahun 1999, dan telah disempurnakan mejadi UU no.32 Tahun 2004, yang mana pendidikan termasuk bidang yang didesentralisasikan, memberikan ruang gerak dan inisiatif bagi pemerintah kabupaten untuk meningkatkan layanan pendidikan. Jika inisiatif tersebut terus berkembang, layanan pendidikan akan dapat segera membaik secara signifikan.

Secara umum, dari hasil penelitian terungkap bahwa meskipun kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Kediri ini telah memiliki

arah yang jelas dan dukungan yang kuat, namun karena kompleksnya permasalahan yang dihadapi, pada tataran implementasinya masih menunjukkan adanya kelemahan. Lebih-lebih jika dikaitkan dengan upaya untuk menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun bagi anak dari keluarga miskin sesuai dengan fokus penelitian ini. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Eugene Bardach sebagaimana dikutip oleh Agustino (2006) mengemukakan, bahwa:

“Adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga bagi para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk yang memuaskan semua orang”.

Dan gejala itulah yang oleh Andrew Dunsire sebagaimana dikutip oleh Abdul Wahab (1997) disebut *implementation gap*, yaitu suatu istilah yang digunakan untuk menjelaskan suatu keadaan dimana dalam suatu proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan atau direncanakan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai sebagai hasil dari sebuah pelaksanaan kebijakan publik. Oleh sebab itu, penting dalam suatu implementasi kebijakan dilakukan beberapa pendekatan, salah satunya adalah pendekatan berperilaku (*Behavioral Approach*), sebagaimana dikemukakan menurut Abdul Wahab (2008), bahwa:

“Pendekatan berperilaku adalah suatu pendekatan yang lebih memusatkan pada perilaku manusia beserta segala sikapnya. Pendekatan ini diawali dengan suatu kesadaran bahwa seringkali terdapat kebijakan baru yang dikeluarkan. Oleh karena itu, harus dijelaskan sejak awal tentang alasan, tujuan, sasaran, dan perlu juga mempersiapkan sarana yang mendalam supaya kebijakan tersebut mendapat dukungan. Tujuan pendekatan ini untuk menunjukkan perhatian yang besar terhadap kepentingan orang-orang atau masyarakat banyak.”

Jelasnya, kebijakan yang ditujukan kepada program pemerataan dan perluasan akses, maka pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun diharapkan bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali yang kurang beruntung alias miskin yang selama ini masih banyak menyisakan sasaran. Hal tersebut sesuai dengan misi pendidikan nasional, yaitu yang salah satunya adalah mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.

a. Bentuk-bentuk Program Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Seperti telah diuraikan sebelumnya, tidak sedikit bentuk program-program yang telah dilaksanakan oleh Kabupaten Kediri dalam mengimplementasikan kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun sebagai penjabaran dari arah kebijakan yang telah ditetapkannya. Dan dari hasil penelitian terungkap bahwa Kabupaten Kediri ternyata sudah mampu mencapai target yang diharapkan, meskipun tidak semua program yang dilaksanakan ternyata bisa menjawab dan mengakomodasi kebutuhan dan tuntutan anak dari keluarga miskin sebagai salah satu kelompok sasaran yang menjadi target sasaran. Alasannya adalah persoalan miskinnya sumber daya untuk mengoptimalkan dan mendukung kelancaran implementasi berbagai bentuk program intervensinya.

Oleh karenanya perlu dilakukan pendekatan-pendekatan dalam suatu implementasi kebijakan. Adapun pendekatan-pendekatan yang biasa dilakukan dalam proses implementasi kebijakan menurut Abdul Wahab (2008), salah satunya adalah pendekatan berperilaku (*Behavioral Approach*), “Pendekatan

keperilakuan adalah suatu pendekatan yang lebih memusatkan pada perilaku manusia beserta segala sikapnya. Pendekatan ini diawali dengan suatu kesadaran bahwa seringkali terdapat kebijakan baru yang dikeluarkan”. Oleh karena itu, harus dijelaskan sejak awal tentang alasan, tujuan, sasaran, dan perlu juga mempersiapkan sarana yang mendalam supaya kebijakan tersebut mendapat dukungan. Tujuan pendekatan ini untuk menunjukkan perhatian yang besar terhadap kepentingan orang-orang atau masyarakat banyak.

b. Pelaksanaan Program Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, tidak sedikit bentuk-bentuk program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun telah digulirkan oleh pemerintah Kabupaten Kediri sebagai bentuk implementasi dari arah kebijakan yang telah ditetapkan baik yang dilakukan melalui jalur formal, termasuk melalui jalur pendidikan alternatifnya seperti SD/SMP Seatap, SD/SMP Kecil, SMP Terbuka, Kelas Jauh, maupun jalur pendidikan non formal. Bersamaan dengan itu, tidak sedikit pula hasil telah dicapai sebagai dampak dari pelaksanaan program-program tersebut.

Menurut David Easton sebagaimana dikutip oleh Abdul Wahab (2004), bahwa hakikat kebijakan adalah bersangkut-paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu, dalam hal ini adalah mengenai implementasi kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, dimana pemerintah harus benar-benar melaksanakan program-program yang telah ditetapkan sebelumnya dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan oleh

pemerintah dalam bidang-bidang tersebut. Jadi, pengertiannya di sini adalah pemerintah harus benar-benar melaksanakan atau merealisasikan program-programnya yang telah ditetapkan, demi tercapainya target yang diharapkan.

c. Hasil Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9

Tahun bagi Anak dari Keluarga Miskin

Dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapainya, dari hasil penelitian terungkap bahwa arah kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Kediri juga ternyata telah dipertegas dengan rencana pencapaian target yang merupakan salah satu tolok ukur penting untuk melihat kinerjanya. Persisnya, dari hasil penelitian dalam rangka penuntasan kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun ini, dapat diketahui bahwa Kabupaten Kediri telah berhasil meningkatkan akses pelayanan pendidikan bagi anak usia 7-15 tahun atau usia jenjang pendidikan dasar. Dimana hal ini terbukti dari prosentase anak usia 7-15 tahun yang tidak dapat mengakses pelayanan pendidikan dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa dari tahun ke tahun semakin banyak anak yang bisa mengakses pelayanan pendidikan, khususnya pendidikan dasar. Selain itu, Kabupaten Kediri juga telah berhasil dalam meningkatkan angka melanjutkan sekolah, keberhasilan tersebut bisa dilihat dari prosentase jumlah anak yang melanjutkan sekolah meningkat dari tahun ke tahun. Selain keberhasilan dalam peningkatan akses pelayanan pendidikan, serta peningkatan angka melanjutkan sekolah, sebuah prestasi yang membanggakan juga telah diraih oleh Kabupaten Kediri dalam peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK), baik APK SD/MI maupun APM SMP/MTs dan

juga peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM), baik APK SD/MI maupun APM SMP/MTs.

Keberhasilan yang dicapai Kabupaten Kediri dalam penuntasan kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, tidak lain karena dukungan semua pihak. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Winarno (2005), dimana implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan: “alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun bagi Anak dari Keluarga Miskin

a. Faktor Pendukung

Dari hasil penelitian terungkap bahwa faktor pendukung kesuksesan implementasi penuntasan kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Kediri ini, antara lain adalah dukungan sarana dan prasarana yang memadai, serta dukungan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Ketersediaan sarana dan prasarana seperti gedung sekolah beserta fasilitas yang memadai, serta ketersediaan tenaga pengajar yang memadai, sangat bermanfaat terhadap implementasi penuntasan kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Selain itu adanya dukungan dana juga BOS telah banyak memberikan bantuan bagi biaya pendidikan, khususnya pendidikan dasar. Dimana, pengertian dari program BOS itu sendiri, seperti yang tertera dalam buku petunjuk teknisnya,

adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Maka dari itu, adanya BOS memang sangat berperan penting terhadap kesuksesan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

Dukungan sarana dan prasarana, serta dana yang memadai berperan sangat penting terhadap suatu proses implementasi, hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Hogwood dan Gun, sebagaimana dikutip oleh Abdul Wahab (1997) yang menyatakan bahwa: “Untuk dapat mengimplementasikan suatu kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa kondisi atau persyaratan tertentu seperti dukungan sarana dan prasarana serta dana yang cukup memadai”. Dikaitkan akan pentingnya fungsi pendidikan, sebagaimana dikemukakan oleh Tilaar (2002) yang menyebutkan paling tidak ada lima fungsi dari pendidikan, yaitu:

- f. Pendidikan merupakan investasi manusia (*human investment*) yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi.
- g. Pendidikan mempunyai dampak peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat.
- h. Pendidikan merupakan wahana untuk membangun dan meningkatkan martabat bangsa.
- i. Pendidikan akan memperlancar mobilitas vertikal.
- j. Pendidikan dapat memperkuat lembaga-lembaga sosial serta dapat memberi sumbangan yang berarti dalam proses pembentukan masyarakat madani.

Oleh karena itu diharapkan dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, serta dukungan dana Bantuan Operasional Sekolah yang mencukupi, akan turut membantu kesuksesan implementasi kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

b. Faktor Penghambat

Dari hasil wawancara dengan Kabid Perencanaan, Drs. Hidayat Wasis, terungkap bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam kesuksesan implementasi penuntasan kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, sekaligus kendala terberat yang dialami Kabupaten Kediri adalah faktor kurang sadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan. Dimana seharusnya dalam suatu proses implementasi dukungan dari segala pihak sangat dibutuhkan demi tercapainya tujuan dari kebijakan itu sendiri, hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sunggono (1994), bahwa: “Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut”. Hal tersebut menyiratkan bahwa dukungan dari masyarakat, dalam hal ini adalah kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan sangat dibutuhkan demi kesuksesan implementasi penuntasan kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun itu sendiri. Senada dengan yang diungkapkan oleh Hogwood dan Gunn sebagaimana dikutip oleh Abdul Wahab (1997), mengemukakan: “Implementasi yang tidak berhasil terjadi manakala suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan, kebijaksanaan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki.”

Dari beberapa anak putus sekolah yang ada di beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Kediri, yaitu yang berada di wilayah Kecamatan Pare, Kecamatan Plemahan, dan Kecamatan Kepung yang sengaja diwawancarai dan diobservasi

dalam penelitian ini, maka setelah dilakukan klasifikasi dan kategorisasi, maka setidaknya ada setidaknya empat faktor dominan yang sekaligus menjadi alasan anak dari keluarga miskin di Kabupaten Kediri selama ini terpaksa meninggalkan bangku sekolah.

Dari hasil penelitian pula, terungkap bahwa masing-masing faktor tersebut tidak selamanya hadir terpisah dari faktor lainnya, melainkan melekat atau hadir tidak terpisahkan dari satu atau bahkan semua faktor lainnya. Dikemukakan oleh Chambers sebagaimana dikutip oleh Soetrisno (1997), mencoba menawarkan apa yang dikenal dengan konsep kemiskinan terpadu (*integrated poverty*). Menurutny, kemiskinan yang dialami oleh negara berkembang, khususnya masyarakat pedesaan, pada umumnya melibatkan beberapa faktor kemalangan atau ketidak beruntungan (*disadvantage*) yang satu sama lain saling terkait melingkari kehidupan orang miskin.

Pengklasifikasian faktor-faktor penghambat implementasi penuntasan kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di sini dibuat untuk sekedar memudahkan analisis sekaligus menjelaskan faktor dominan paling berpengaruh yang selama ini muncul menjadi penyebab anak dari keluarga miskin putus sekolah.

Pertama, dan yang paling utama, adalah menyangkut faktor ekonomi keluarga, sebutlah beban berat ekonomi keluarga. Inilah pula faktor yang pada akhirnya banyak mempengaruhi lahirnya banyak faktor penyebab lain, seperti menyangkut faktor kesadaran atau motivasi, baik motivasi anak maupun orang tuanya, bahkan motivasi kedua belah pihaknya.

Masalah pokoknya muncul ketika tuntutan biaya yang dibutuhkan untuk menyekolahkan anaknya harus menyedot tuntutan biaya untuk memenuhi kebutuhan keseharian hidup mereka, bahkan untuk kebutuhan sangat primer karena menyangkut pemenuhan kebutuhan perut atau makan sehari-hari mereka.

Kedua, adalah faktor kesadaran, baik menyangkut kesadaran orang tua maupun kesadaran anaknya sendiri, bahkan menyangkut kesadaran dua-duanya, yakni kesadaran anak dan orang tuanya. Persisnya, dari banyak kasus anak yang tidak bersekolah yang diteliti, sebagian diantaranya karena berkait dengan persoalan miskinnya kesadaran mereka. Kondisi ini diperkuat oleh tingkat pendidikan orang tua mereka yang secara rata-rata memang tidak lebih dari tamatan SD, bahkan banyak yang tidak tamat SD.

Toenlie (1994), mengemukakan paling sedikit ada dua hal penyebab rendahnya jumlah lulusan SD yang melanjutkan ke SMP, yakni rendahnya kemampuan ekonomi orang tua kalau bukan berkait dengan masalah kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan tingkat SMP bagi anaknya. Namun perlu dicatat bahwa faktor kesadaran ini tidaklah berdiri sendiri atau lepas dari faktor lainnya yang memang karakter khas dari keluarga miskin. Jelasnya, dari hasil penelitian juga terungkap bahwa kesadaran mereka akan arti pentingnya pendidikan menjadi berkurang lantaran memang terdesak oleh tuntutan hidup yang dihadapi mereka. Karena beratnya beban hidup yang harus ditanggung mereka, misalnya, motivasi mereka untuk melanjutkan pendidikan anaknya menjadi berkurang. Hal tersebut didukung oleh tesis Bruner dan Beeby yang menegaskan bahwa kemampuan ekonomi masyarakat miskin yang rendah dapat

mengurangi hasrat orang tua dan semangat anak untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi (Bruner 1970: Beeby 1979).

Ketiga, faktor jarak jauh antara tempat tinggal anak dengan lokasi sekolah, adalah merupakan masalah berat tersendiri yang selama ini menjadi penyebab sebagian anak dari keluarga miskin tidak melanjutkan atau putus sekolah. Dari banyak kasus anak tidak yang diteliti, sebagiannya mengeluh karena biaya transportasi. Membicarakan upaya untuk meringankan beban biaya pendidikan bagi anak dari keluarga miskin seharusnya juga berbicara mengenai banyak item pembiayaan atau *cost* yang harus dikeluarkan anak berkait dengan proses penyelenggaraan pendidikan secara utuh dan menyeluruh. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Supriadi (2003), bahwa pemahaman tersebut sangat penting bukan saja ketika pemerintah akan merumuskan kebijakan pendidikan, tetapi juga untuk bisa memahami dengan tepat mengenai beratnya beban pembiayaan pendidikan yang harus dipikul anak dari keluarga miskin. Dalam konteks itu, efektivitas semua kebijakan yang diimplementasikan pemerintah selama ini jelas-jelas belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan dan tuntutan anak dari keluarga miskin.

Keempat, adalah menyangkut faktor psikologis seperti perasaan rendah diri atau minder, baik karena status sosialnya yang memang miskin maupun karena faktor kelainan atau cacat fisik yang dimilikinya, termasuk di dalamnya faktor psikologis karena memang anaknya yang karena berbagai hal malas bersekolah. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Lewis (1961) yang banyak melihat kemiskinan dari aspek budaya yang disebut budaya kemiskinan (*culture poverty*),

yang menegaskan bahwa dilihat dari perilaku kesehariannya, budaya miskin itu tampak dari tanda-tandanya seperti tidak berharga, tidak berdaya, rendah diri, dan ketergantungan.

Salah satu wujud konkritnya, sebagian diantara dari mereka terpaksa meninggalkan bangku sekolah lantaran umurnya sudah berada di atas umur anak yang lainnya atau karena bukan karena malu karena cacat tubuh yang dimilikinya. Di sini kondisi internal turut memperparah penderitaan anak dari keluarga miskin. Itulah keempat faktor yang dari hasil penelitian ini terangkat sebagai penyebab kenapa anak dari keluarga miskin tidak bisa menyelesaikan pendidikan dasarnya.



BAB V

PENUTUP

F. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk program yang telah dilaksanakan oleh Kabupaten Kediri dalam mengimplementasikan kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun sebagai penjabaran dari arah kebijakan yang telah ditetapkan, antara lain Program Peningkatan Akses Pendidikan, Program Peningkatan Daya Tampung, Program Bantuan Pembiayaan bagi Anak dari Keluarga Miskin, dan Sosialisasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
2. Pelaksanaan program implementasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang telah digulirkan oleh pemerintah Kabupaten Kediri sebagai bentuk implementasi dari arah kebijakan yang telah ditetapkan baik yang dilakukan melalui jalur formal, termasuk melalui jalur pendidikan alternatifnya, antara lain seperti SD/SMP Seatap, SD/SMP Kecil, SMP Terbuka, Kelas Jauh, maupun jalur pendidikan non formal dan juga program peningkatan daya tampung, antara lain pembangunan Unit Sekolah Baru, pembangunan Ruang Kelas Baru, dan rehabilitasi Ruang Kelas, serta program pemberian bantuan pembiayaan antara lain, pemberian bantuan melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan pemberian bantuan melalui program lainnya, dan juga sosialisasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Bersamaan dengan

itu, tidak sedikit pula hasil telah dicapai sebagai dampak dari pelaksanaan program-program tersebut.

3. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa meskipun pelaksanaan program-program tersebut telah banyak memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam membantu meringankan beban anak dari keluarga miskin yang ditandai dengan telah tercapainya target yang diharapkan, akan tetapi pada kenyataannya masih saja terdapat anak pada usia sekolah dasar yang tidak bisa melanjutkan sekolah atau putus di tengah jalan, yaitu dari data yang diperoleh peneliti pada tahun ajaran 2010/2011 terdapat jumlah lulusan SD/MI sebanyak 21.847 anak dan yang melanjutkan ke jenjang SLTP sebanyak 21.262 anak, atau dengan kata lain ada sebesar 97,32 persen yang melanjutkan.
4. Faktor pendukung kesuksesan implementasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Kediri, antara lain adalah dukungan sarana dan prasarana yang memadai, serta dukungan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dimana dukungan sarana dan prasarana, serta dana yang memadai berperan sangat penting terhadap keberhasilan suatu proses implementasi.
5. Adapun kendala utama yang menghambat keberhasilan implementasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Kediri, adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan. Akumulasi dari masalah ekonomi yang sering menjadi persoalan kehidupan anak dari keluarga miskin, masalah kesadaran atau motivasi

akan arti pentingnya pendidikan, termasuk kesadaran orang tua dan juga kesadaran si anak sendiri, serta masalah psikologis, malu bersekolah berkaitan dengan kelainan fisik, usia atau karena faktor lainnya, adalah beberapa faktor penting yang dari penelitian terungkap menjadi penyebab mereka tidak bisa mengakses pendidikan dasar 9 tahun. Itulah pula beberapa faktor saling terkait yang selama ini belum banyak terpecahkan dengan layanan pendidikan yang diberikan pemerintah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, meskipun selama ini telah banyak upaya dan langkah dilakukan oleh pemerintah dalam upaya untuk membantu meningkatkan akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin namun dalam beberapa aspeknya belum mampu mengakomodasi dan memecahkan seluruh masalah yang dihadapi anak dari keluarga miskin. Dengan kata lain masih ada *gap* antara layanan pendidikan yang telah diberikan pemerintah selama ini dengan kebutuhan pendidikan yang dituntut anak dari keluarga miskin.

G. Saran

Sesuai dengan kesimpulannya, paling tidak ada beberapa rekomendasi yang perlu disampaikan sebagai bentuk saran dari hasil penelitian ini.

1. Perlunya meningkatkan integrasi program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dengan program sektor terkait lainnya, salah satunya adalah dengan cara melibatkan BKKBN, BPS, maupun Dinas Sosial dalam mendata berapa banyak jumlah anak usia sekolah yang sedang tidak bersekolah. Diharapkan semakin terintegrasi dalam penanganannya, maka

semakin efektif hasil yang dicapai dalam penuntasan kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Kediri.

2. Perlu dilakukannya pemberian penghargaan (*reward*) kepada setiap kecamatan yang berhasil dalam penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Adapun *reward* tersebut bisa berupa bantuan dana yang bisa digunakan untuk pembiayaan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di kecamatan tersebut. Diharapkan dengan adanya pemberian penghargaan tersebut, setiap kecamatan akan termotivasi untuk mensukseskan implementasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
3. Perlunya menggalakkan sosialisasi akan arti penting Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, terutama sosialisasi terhadap masyarakat yang berada di daerah pinggiran. Sosialisasi tersebut bisa dilakukan dengan cara pihak dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga meninjau secara langsung ke daerah-daerah pinggiran sekaligus memberikan penyuluhan kepada masyarakat.
4. Perlunya mengemas pelaksanaan kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dalam sebuah gerakan masyarakat yang mampu mensinergikan sekaligus memadukan kekuatan yang dimiliki pemerintah dan potensi yang dimiliki masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara membentuk kader-kader dalam membantu mensukseskan implementasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Tentunya, dengan peran serta masyarakat tersebut, diharapkan dapat menumbuhkan kebanggaan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, Solichin. 1997. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Jakarta: Bumi Aksara.

_____. 2004. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

_____. 2008. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.

Abdurrahmansyah. 2001. Desentralisasi: Harapan dan Tantangan bagi Dunia Pendidikan. *Jurnal Studi Agama Millah*, 1, 55-69.

Abidin, Zainal. 2000. *Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004*. Bab VII Pembangunan Pendidikan. Jakarta: Mini Jaya Abadi.

Agustino, Leo. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: Puslit KP2W Lemlit Unpad dan Bandung AIPI.

American Dictionary. 2010. "Definition Poor Family", diakses pada Tanggal 5 Februari 2012 dari <http://education.yahoo.com/reference/dictionary/entry/poorfamily>.

Anderson, James. 1979. *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Wiston.

Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2000. Program Pembangunan Nasional 2000-2004, diakses pada Tanggal 5 Februari 2012 dari [www.bappenas.go.id/node/42/320/program-pembangunan-nasional-2000-2004-propenas/-](http://www.bappenas.go.id/node/42/320/program-pembangunan-nasional-2000-2004-propenas-/).

_____. 2009. *Evaluasi Pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 Tahun*. Jakarta: Kedeputan Evaluasi Kinerja Pembangunan.

Badan Pusat Statistik (BPS). 2007. *Indikator Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

_____. 2008. *Pedoman Survei Sosial Ekonomi Nasional*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Berita Jatim. 2010. Ratusan Anak Usia Sekolah di Kabupaten Kediri Gagal Nikmati Wajar Dikdas 9 Tahun, diakses pada Tanggal 9 Februari 2012 dari www.beritajatim.com.

Bruner, C.E. 1970. *Antropological Perspectives on Primary Education*. Bogor: Kertas Kerja dalam Workshop mengenai Pendidikan di Negara Berkembang.

Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Desentralisasi Pendidikan*. Jakarta: Komisi Nasional Pendidikan.

_____. 2001. *Menuju Pendidikan Dasar Bermutu dan Merata*. Jakarta: Komisi Nasional Pendidikan.

_____. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

_____. 2007. *Panduan Program Kegiatan dan Pemanfaatan Dana Block Grant Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun (GN-P2WB)*. Jakarta: Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas.

Didin. 2010. Hakekat Pendidikan Dasar, diakses pada Tanggal 5 Februari 2012 dari www.e-smartschool.co.id.

Djohar, MS. 2003. *Pendidikan Stratejik: Alternatif Untuk Masa Depan*. Yogyakarta: LESFI.

Dunn, William N. 1981. *Public Policy Analysis; An Introduction*. Prentice Hall. Inc: Englowd Clifftsw.

Faisal, Sanapiah. 1980. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Fiske, Edward B. 1998. *Arah Pembangunan Desentralisasi Pengajaran, Politik dan Konsensus*. PT Grafindo, Jakarta.

Gaffar, Mohammad Fakry. 1987. *Perencanaan Pendidikan; Teori dan Metodologi*. Jakarta: Depdikbud.

Hamid, Dedi. 2006. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Pendidikan Nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Husen, Torsten dan Postlethwaite, Neville. 1994. *The International Encyclopedia of Education*. England, New York, Tokyo: Elsevier Science.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 1971 tentang Pembangunan Sekolah Dasar.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.

Irwanto, dkk. 1995. *Pekerja Anak di Tiga Kota Besar: Jakarta, Surabaya, Medan*. Jakarta: Unika Atma Jaya dan UNICEF.

Islamy, M.I. 2000. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Jalal, Fasli dan Dedi Supriadi. 2001. *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.

Jhingan, M.L. 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Penerjemah: D. Guritno. Edisi Pertama. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Jones, T.H. 1985. *Introduction to School Finance: Technique and School Policy*. New York: Macmilan Publishing Company.

Kompas, 2010. Angka Putus Sekolah di Kabupaten Kediri, diakses pada Tanggal 9 Februari 2012 dari <http://beritahariangrandong.com/2011>.

Kompas, 2010. Ribuan Siswa di Kabupaten Kediri Putus Sekolah, diakses pada Tanggal 9 Februari 2012 dari <http://edukasi.kompas.com/read/2010>.

Lewis, Oscar. 1961. *"Five Families" Mexican Case Studies in Culture of Poverty*. New York. Basic Books.

Manap, Soemantri. 1993. *Penelusuran Penyebab Rendahnya Tingkat Melanjutkan Dari SD ke SLTP dan Implikasinya Bagi Pemantapan Rencana Pelaksanaan Wajib Belajar SLTP di Kabupaten Bogor*. Tesis PPS IKIP. Bandung: Tidak diterbitkan.

Makmun, Abin Syamsudin. 1987. *Psikologi Kependidikan*. Bandung: IKIP Bandung.

Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UI-Press.

Muhammad, Farouk dan H. Djaali. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial*. Edisi Revisi. Jakarta: PTIK Press & Restu Agung.

Mustopadijaja, A.R. 2002. *Manajemen Proses Kebijakan Publik; Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

2003. *Formulasi Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Mohammad. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor. Ghalia Indonesia.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 1998. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, Dwijowijoto Riant. 2006. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Gramedia.
- Prasetyo, Eko. 2004. *Orang Miskin Dilarang Sekolah (Seri Dilarang Miskin)*. Yogyakarta: INSIST Press Printing.
- Pusat Statistik Pendidikan. 2011. Publikasi Pendidikan, diakses pada Tanggal 5 Februari 2012 dari www.bphn.go.id/data/html.
- Ruslan, Rosady. 2003. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sanit, Arbi. 2000. *Penelitian paradigma baru hubungan pusat daerah di Indonesia: Format otonomi daerah masa depan*. Jakarta: Laporan penelitian.
- Sen, Amartya. 2001. *Masih Adakah Harapan Bagi Kaum Miskin?*. Diterjemahkan dari On Ethics and Economics oleh Rahman Astuti. Bandung: Mizan Media Utama.
- Sjahrir. 1988. *Kebijaksanaan Negara: Konsistensi dan Implementasi*. Jakarta: LP3ES.
- Soemanto, Wasti dan Hendyat Soetopo. 1982. *Dasar & Teori Pendidikan Dunia: Tantangan bagi Para Pemimpin Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Soetrisno, L. 1997. *Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Soenarko. 2000. *Public Policy: Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Subarsono. 2005. *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka.
- Sudrajat, Akhmat. 2010. *Definisi Pendidikan*, diakses pada Tanggal 5 Februari 2012 dari <http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/12/04/definisi-pendidikan-menurut-uu-no-20-tahun-2003-tentang-sisdiknas/>.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum Dan Kebijakan Publik*. Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika.

Supriadi, Dedi. 2003. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Suryadi, Ace dan H.A.R.Tilaar. 2004. *Analisis Kebijakan Pendidikan. Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Swasono, SE. 1999. *Sekitar Kemiskinan dan Keadilan, dari Cendekiawan Kita Tentang Islam*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Thomas, Alan J. 1971. *The Productive School of Analysis Approach to Educational Administration*. United States of America: University of Chicago.

Tilaar, H.A.R. 2002. *Pendidikan Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Tjokrowinoto, Moeljarto. 1995. *Teori Pembangunan Sebuah Analisis, Konsep, Arah dan Strategi*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.

Todaro, Michael P. 1997. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Edisi Ke Enam, Alih Bahasa: Drs. Haris Munandar, M. A. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.

Toenlie, A.J.E. 1994. *Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

UNDP. 2011. Laporan Pembangunan Manusia Indonesia 2011, diakses pada Tanggal 5 Februari 2012 dari <http://beritakawanua.com/berita/nasional/indeks-pembangunan-manusia-indonesia-anjlok.html>.

Widodo, MS Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.

Wikipedia. Pendidikan Dasar, diakses pada Tanggal 5 Februari 2012 dari <http://en.wikipedia.org/wiki/pendidikan> dasar.

Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

World Bank. 2007. *Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: The World Bank Office.



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK & PERLINDUNGAN MASYARAKAT
JALAN SOEKARNO HATTA NOMOR 1 TELEPON 689969
KEDIRI

Kediri, 5 Juni 2012

Nomor : 070/ 275 / 418.62 / 2012
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

KEPADA
YTH. SDR. KA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
& OLAH RAGA KAB. KEDIRI
DI
KEDIRI

REKOMENDASI

Menunjuk Surat Saudara Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya Malang tanggal 1 Mei 2012 Nomor ;
4146/UN.10.3/PG/2012 perihal Pengantar Untuk Kegiatan Penelitian

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 29 Tahun 2008;
4. Peraturan Bupati Kediri Nomor 21 Tahun 2007;
5. Peraturan Bupati Kediri Nomor 55 Tahun 2008;
6. Surat Edaran Bupati Kediri tanggal 6 Januari 2006 Nomor 973/038/418.58/2006 Perihal
Penerbitan Rekomendasi PKL / Survey / Riset / PSG / Prakerin dan sejenisnya

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : **PUTRI ANGGUN ARVIANI**
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Brawijaya Malang
Alamat : Jl. MT Haryono 163 Malang
Kebangsaan : Indonesia

Diberikan Rekomendasi untuk mengadakan kegiatan dimaksud di Unit / Wilayah
Kerja Saudara dengan :

Judul : *Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Bagi
Anak Dari Keluarga Miskin (Studi Pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olah Raga Kab. Kediri)*
Waktu : 3 (tiga) minggu dimulai sejak tanggal rekomendasi diterbitkan
Lokasi : Dinas Pendidikan Pemuda & Olah Raga Kabupaten Kediri
Peserta : -

Penerima rekomendasi wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku dan
apabila selesai melaksanakan kegiatannya diwajibkan memberikan laporan.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA BAKESBANGPOLLINMAS
KABUPATEN KEDIRI

Drs. PURNOMO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19560417 198203 1 008

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Ibu Bupati Kediri (sebagai laporan);
2. Sdr. Ka Polres Kediri di Pare;
3. Sdr. Dan Dim 0809 Kediri;
4. Sdr. Kepala BAPPEDA Kab. Kediri;
5. Sdr. Yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

Jalan. MT. Haryono 163, Malang 65145, Jawa Timur, Indonesia
Telp. +62-341-553737, 568914, 558226 Fax. +62-341-558227
E-mail: fia@ub.ac.id Website: http://fia.ub.ac.id

Program Studi: • Sarjana: - Ilmu Administrasi Publik - Administrasi Pemerintahan - Perencanaan Pembangunan - Ilmu Perpustakaan - Ilmu Administrasi Bisnis - Perpajakan
- Bisnis Internasional - Hospitality dan Pariwisata • Magister: - Ilmu Administrasi Publik - Ilmu Administrasi Bisnis • Doktor Ilmu Administrasi

Nomor : 4146 /UN.10.3/ P9 /2012
Lampiran :
Perihal : Pengantar Untuk Kegiatan Penelitian Skripsi

Kepada : Yth. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kediri

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/ Ibu/ Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan kegiatan penelitian skripsi bagi mahasiswa yang tercantum di bawah ini dalam kurun waktu sampai selesai:

Nama : Putri Anggun Arviani
NIM : 0810310328
Jurusan : Administrasi Publik
Konsentrasi : -
Judul : **Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
Bagi Anak Dari Keluarga Miskin (Studi Pada Dinas Pendidikan
Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kediri)**

Kami percaya bahwa demi pembinaan pendidikan kita, maka Bapak/ Ibu/ Saudara akan bersedia membantu kami.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/ Ibu/ Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 11 Mei 2012
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Administrasi Publik
u.b. Sekretaris

Drs. Minto Hadi, M.Si
NIP. 195401270 198103 1 003

Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jln. Erlangga Desa Paron Kec. Gampengrejo Kediri
Telepon. (0354) 682997 Fax (0354) 680420
Website : www.dispendik-kabkediri.net
Email : info@dispendik-kabkediri.net

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR: 4234/1762/418/47/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. SUJARWO Y, MM
NIP : NIP. 19620606 198201 1 013
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I/ IV b
Jabatan : Sekretaris Dikpora Kabupaten Kediri

Dengan ini menyatakan bahwa Mahasiswi dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang yang disebut di bawah ini:

Nama : PUTRI ANGGUN ARVIANI
Tempat/Tgl Lahir : Kediri, 12 April 1988
Kebangsaan : Indonesia
Tema Penelitian : Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun bagi Anak dari Keluarga Miskin.
Waktu Penelitian : 5 Juni-25 Juni 2012

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kediri.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kediri, 16 Juli 2012

a.n Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kab.Kediri



Drs. SUJARWO Y.MM
Pembina Tk. I
NIP. 19620606 198201 1 013

CURRICULUM VITAE

Nama : Putri Anggun Arviani

Nomor Induk Mahasiswa : 0810310328

Tempat, tanggal lahir : Kediri, 12 April 1988

Pendidikan : 1. SD N Kayenlor Tahun 1994 tamat tahun 2000
 2. SMP N 2 Pare Tahun 2000 tamat tahun 2003
 3. SMA N 2 Pare Tahun 2003 tamat tahun 2006
 4. Universitas Brawijaya Masuk tahun 2008

Publikasi-publikasi atau Karya Ilmiah : -

